BAMSOET LANTIK WAKIL KETUA MPR RI YANDRI SUSANTO MENGGANTI ZULKIFLI HASAN

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MAJELIS

EDISI NO.07/TH.XVI/JULI 2022

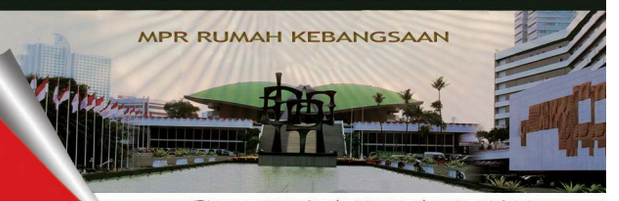

AKHIRNYA PENDIDIKAN PANCASILA KEMBALI DI AJARKAN DI SEKOLAH

ISSN 0854-6371

06 **Refleksi** Stunting, Anak Putus Sekolah dan Endapan Dana Pemda

16 **Nasional** Pimpinan Lembaga Negara Direncakan Sampaikan Langsung

39 **Selingan** Malioboro, Sejuta Kisah Berawal dari Sana

59 **Sosialisasi** Peristiwa Lepasnya Sipadan-Ligitan Jangan Terulang

MAJELIS

INI BARU INDONESIA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

Daftar Isi

08 BERITA UTAMA

Pancasila Kembali Diajarkan di Sekolah

Implementasi Pendidikan Pancasila melalui Kurikulum Merdeka mengedepankan proses belajar yang menyenangkan dan relevan sehingga peserta didik dapat memahami cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

16 Nasional
Pimpinan Lembaga Negara Sampaikan Laporan Secara Langsung

50 Sosialisasi
Lestari Moerdijat Ajak Alumni UI Jaga Nilai-Nilai Kebangsaan

39 SELINGAN
Jalan Malioboro

76 Profil
Sodik Mudjahid

Pengantar Redaksi 04
Perspektif 06
Kolom 34
Aspirasi Masyarakat 47
Gema Pancasila 48
Varia MPR 68
Wawancara 70
Figur 72
Ragam 74
Dari Rumah Kebangsaan 80
Rehal 82

COVER
Edisi No.07/TH.XVI/Juli 2022
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi

Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila

MULAI tahun ajaran baru 2022/2023 para peserta didik, baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekolah dasar, sekolah menengah (pertama dan atas), maupun perguruan tinggi akan mendapatkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Bila pada waktu lalu pelajaran Pancasila hanya disisipkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) maka pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2022 ini, Pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran tersendiri. Mata pelajaran Pancasila menjadi mata pelajaran yang wajib diikuti para siswa dan mahasiswa.

Pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran tersendiri setelah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memasukkan Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. Kurikulum yang mulai berlaku pada tahun ajaran baru ini telah mengganti nama mata pelajaran sebelumnya PPKn menjadi Pendidikan Pancasila. Kurikulum Merdeka tertuang dalam Surat Keputusan Mendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran (Kurikulum Merdeka).

Surat Keputusan Mendikbudristek itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Revisi atas PP Standar Nasional Pendidikan itu dilakukan karena PP itu mengundang polemik. Pasalnya, dalam PP 57 Tahun 2021 tidak menyebut sama sekali tentang pendidikan Pancasila. Artinya, Pancasila hilang sebagai pelajaran di sekolah.

Setelah PP Nomor 57 Tahun 2021 direvisi menjadi PP Nomor 4 Tahun 2022, pemerintah memasukkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran di sekolah. Dalam Pasal 40 ayat 2 PP tersebut tertulis Pendidikan Pancasila termasuk pelajaran wajib di sekolah tingkat dasar dan menengah, di samping mata pelajaran agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPS, IPA, seni budaya, Penjas, keterampilan serta muatan lokal. Kemudian, pada Pasal 40 ayat 6, disebutkan Pendidikan Pancasila juga wajib diajarkan di tingkat pendidikan tinggi, baik tingkat sarjana maupun diploma.

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyebutkan Pendidikan Pancasila di sekolah akan mengedepankan proses belajar mengajar yang menyenangkan dan relevan sehingga para siswa bisa memahami cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga disertai praktik nyata. *Goal* atau tujuan akhir Pendidikan Pancasila mengacu pada profil Pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebhinnekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyambut baik keputusan pemerintah yang menjadikan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran tersendiri yang wajib diikuti para siswa dan mahasiswa. Sudah sejak lama, yaitu sejak masa kepemimpinan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (2004 – 2009), MPR mengusulkan kepada pemerintah agar Pancasila kembali diajarkan sebagai mata pelajaran kepada para siswa, seperti mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada waktu lalu. Usulan itu sudah berulangkali disampaikan kepada pemerintah. Namun baru pada tahun ini, Kemendikbudristek merealisasikan usulan MPR tersebut.

Sekadar mengingatkan, dalam konteks pendidikan, proses belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila jangan hanya sekadar teori, tetapi juga praktik sehari-hari. Tak kalah penting adalah adanya contoh keteladanan dari para pemimpin negeri. Tentu kita berharap dengan menjadikan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran tersendiri yang wajib diikuti para siswa, maka Pancasila akan melekat dan mewarnai serta menjadi *way of life* generasi milenial atau generasi Z baik di sekolah, kampus, keluarga, dan masyarakat. ❑

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

PENASEHAT
Pimpinan MPR-RI
PENANGGUNG JAWAB
Ma'ruf Cahyono
PEMIMPIN REDAKSI
Siti Fauziah
DEWAN REDAKSI
Yana Indrawan, Dyastasita, Heri Herawan, Maifrizal
REDAKTUR PELAKSANA
Budi Muliawan
KOORDINATOR REPORTASE
Ario Setiawan
REDAKTUR FOTO
Oni Arief Benyamin, Slamet Eko Suprayitno
REPORTER
Bayu Nugroho, Yenita Revi, Try Syilvani, Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta
FOTOGRAFER
Ahmad Suryana, Frinda, Restu, Suprianto, Faridz Rizky, Wira, Subhan
PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR DISTRIBUSI
Cucu Riwayati
STAF DISTRIBUSI
Ati Oktafia, Anggun Permana, Achmad Farobi, Widya Permataningrum
SEKRETARIS REDAKSI
Djarot Widiarto
TIM AHLI
Syahril Chili, Jonni Yasrul, Ardi Winangun, Budi Sucahyo, Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI
Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238, 57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

76
1 JULI 1946 • 1 JULI 2022
BHAYANGKARA
Selamat Hari
BHAYANGKARA KE-76

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

EMPAT PILAR MPR RI
Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
NKRI Sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara
INDONESIA

Stunting, Anak Putus Sekolah dan Endapan Dana Pemda

SIMPANAN dana pemerintah daerah (Pemda) di bank yang mencapai Rp 200,75 triliun itu untuk apa dan mau diendapkan sampai kapan? Pertanyaan ini layak dikedepankan, karena pembangunan nasional yang berkelanjutan masih menghadirkan fakta masalah tentang kemiskinan hingga kemiskinan ekstrim, masalah puluhan ribu balita yang gagal tumbuh ideal akibat kekurangan gizi kronis (stunting), puluhan ribu anak putus sekolah, hingga belum terpenuhinya infrastruktur dasar pada belasan ribu desa .

Rangkaian fakta masalah itu nyaris mengemuka di semua daerah dan desa. Jangankan daerah atau desa, bahkan Jakarta yang berstatus Ibukota negara sekali pun belum dapat menyelesaikan stunting dan kemiskinan ekstrim. Fakta masalah ini menjadi bukti bahwa banyak pemerintah daerah belum menunjukkan kepedulian akan hakekat dan urgensi membangun manusia sebagai bagian tak terpisah dari pembangunan bangsa.

Semua pemerintah daerah diharapkan segera bergerak cepat menangani dan menyelesaikan rangkaian masalah itu. Sebab, di era terkini, rangkaian fakta masalah itu sungguh tak manusiawi. Bayangkan, saat sebagian besar masyarakat sudah beradaptasi dengan era digitalisasi dan industri 4.0, jutaan masyarakat Indonesia justru belum dapat memenuhi kebutuhan dasar, termasuk warga pada belasan ribu desa yang masih menghadapi kendala akibat infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang tidak memadai.

Rangkaian fakta masalah itu tidak sulit-sulit amat untuk segera ditangani dan diselesaikan. Sumber daya yang tersedia di semua daerah lebih dari memadai. Setiap tahun, selalu ada update data tentang kemiskinan, stunting, anak putus sekolah, termasuk informasi persoalan tentang minimnya infrastruktur dasar di banyak desa. Masalahnya, adakah kepedulian aparatur pemerintah daerah terhadap rangkaian fakta masalah tersebut?

Sekadar contoh kasus, publik tentu masih ingat ketika pada pekan pertama Desember 2021 Presiden Joko Widodo menerima oleh-oleh satu truk buah jeruk yang dibawa enam wakil warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo , Provinsi Sumatera Utara, di Istana Merdeka. Berhari-hari mereka menempuh perjalanan jauh untuk sekadar dapat menyampaikan aspirasi warga desa Liang Melas Datas.

Selain menyerahkan oleh-oleh itu, tujuan utama mereka adalah melapor dan memohon kepada Presiden untuk membenahi jalan di desa mereka. Sudah barang tentu bahwa mereka terpaksa melapor langsung kepada Presiden, karena laporan dan permohonan mereka tidak ditanggapi Pemda setempat. Kecenderungan seperti ini pun masih dihadapi masyarakat di belasan ribu desa.

Pembangunan nasional yang berkelanjutan memang telah membawa kemajuan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, harus pula diakui bahwa proses pembangunan itu belum menyentuh semua warga negara. Sebab, masih ada fakta tentang kemiskinan hingga kemiskinan ekstrim. Juga masalah puluhan ribu balita yang gagal tumbuh ideal akibat kekurangan gizi kronis (stunting).

Jangan lupa pula bahwa puluhan ribu anak putus sekolah karena berbagai alasan. Selain itu, infrastruktur dasar pada belasan ribu desa belum terpenuhi, seperti jalan, jembatan, air bersih hingga penerangan. Keterbatasan infrastruktur menghambat warga desa untuk menjangkau kemajuan serta beraktivitas lain sebagaimana mestinya.

Tentang kemiskinan, data Badan Pusat Statistik (BPS)

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrim pada 2021 mencapai empat (4) persen atau 10,86 juta jiwa. Sedangkan angka kemiskinan 26,5 juta atau 9,71 persen. Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah minimnya infrastruktur dasar yang menyulitkan warga untuk ragam kegiatan produktif.

Fakta lain yang perlu mendapat perhatian semua Pemda adalah stunting atau kondisi gagal tumbuh ideal pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) karena kekurangan gizi kronis. Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka stunting di Indonesia masih 24,4% atau 5,33 juta dari jumlah 23 juta anak balita per 2021. Masih berada di atas standar yang ditetapkan WHO, yakni 20%.

Masih dalam konteks pembangunan manusia, semua pemerintah daerah pun hendaknya menyimak Laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dampak pandemi Covid-19 pada dunia pendidikan sangat besar. Salah satu dampak itu adalah meningkatnya jumlah anak putus sekolah.

Banyak anak didik berhenti bersekolah karena ikut membantu ekonomi keluarga selama pandemi. Dilaporkan, ada 75.303 orang anak yang putus sekolah pada 2021. Paling banyak adalah anak putus sekolah di tingkat sekolah dasar (SD) dengan 38.716 orang.

Aspek lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah infrastruktur desa. Idealnya, semua desa memiliki akses untuk beradaptasi dengan era digitalisasi sekarang ini. Warga desa harus memiliki akses untuk mempromosikan potensi desanya. Nyatanya, banyak desa yang masih harus berjuang untuk sekadar melengkapi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan listrik hingga jaringan internet.

Fakta masalah seperti kemiskinan, stunting, anak putus sekolah hingga penyediaan infrastruktur dasar pedesaan mengemuka di semua daerah. Sejatinya, semua fakta masalah itu bisa diselesaikan oleh semua pemerintah daerah.

Sumber daya yang tersedia di daerah cukup memadai untuk menanganinya. Bukankah banyak Pemda memiliki simpanan dana di perbankan? Sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Keuangan, hingga akhir Mei 2022, simpanan dana Pemda di perbankan mencapai Rp 200,75 triliun. Jumlah ini menggambarkan peningkatan signifikan, karena ada kenaikan Rp 9,18 triliun atau 4,79, dibanding April 2022 yang jumlahnya Rp 191,57 triliun.

Disimpan di bank untuk apa? Dan, mau sampai kapan dana ratusan triliun itu diendapkan begitu saja? Padahal, di hadapan semua Pemda, masih mengemuka fakta masalah tentang kemiskinan hingga kemiskinan ekstrim, masalah stunting, masalah anak putus sekolah, hingga belum terpenuhinya infrastruktur dasar pada belasan ribu desa. ❑

Akhirnya Pendidikan Pancasila

Kembali Diajarkan di Sekolah

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Implementasi Pendidikan Pancasila melalui Kurikulum Merdeka mengedepankan proses belajar yang menyenangkan dan relevan sehingga peserta didik dapat memahami cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

ADA yang baru dalam kurikulum sekolah pada tahun ini. Mulai Juli 2022, Pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran tersendiri di setiap jenjang, mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai sekolah menengah atas (SMA) dan perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran baru 2022/2023. Pancasila tak lagi dimasukkan atau disisipkan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) seperti yang berlangsung selama ini. Sebaliknya, Pendidikan Kewarganegaraan sekarang justru menjadi bagian dari Pancasila.

Pergantian nomenklatur PPKn menjadi Pendidikan Pancasila merupakan amanat Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebelumnya PP No. 57 Tahun 2021 menjadi sorotan karena hilangnya pendidikan Pancasila dalam muatan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kini PP No. 4 Tahun 2022 yang merevisi PP No. 57 Tahun 2021 telah mengubah beberapa pasal, salah satunya ketentuan terkait muatan kurikulum.

Dalam Pasal 40 ayat 2 PP tersebut tertulis Pendidikan Pancasila termasuk pelajaran wajib di sekolah tingkat dasar dan menengah, di samping mata pelajaran agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPS, IPA, seni budaya, Penjas, keterampilan serta muatan lokal. Kemudian, pada Pasal 40 ayat 6, disebutkan Pendidikan Pancasila juga wajib diajarkan di tingkat pendidikan tinggi, baik tingkat sarjana maupun diploma.

Sebagai tindak lanjut dari PP ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan Keputusan Kemendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran (Kurikulum Merdeka). Dalam Keputusan Kemendikbudristek itu, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diganti menjadi Pendidikan Pancasila.

Bersamaan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, pada 1 Juni 2022, dilakukan Pencanangan Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menjelaskan bahwa implementasi Pendidikan Pancasila melalui Kurikulum Merdeka mengedepankan proses belajar yang menyenangkan dan relevan sehingga peserta didik dapat memahami cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam kurikulum itu adalah untuk melahirkan profil pelajar Pancasilais, yaitu pelajar Indonesia yang memiliki semangat belajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi global, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya sekadar teori, pembelajaran Pendidikan

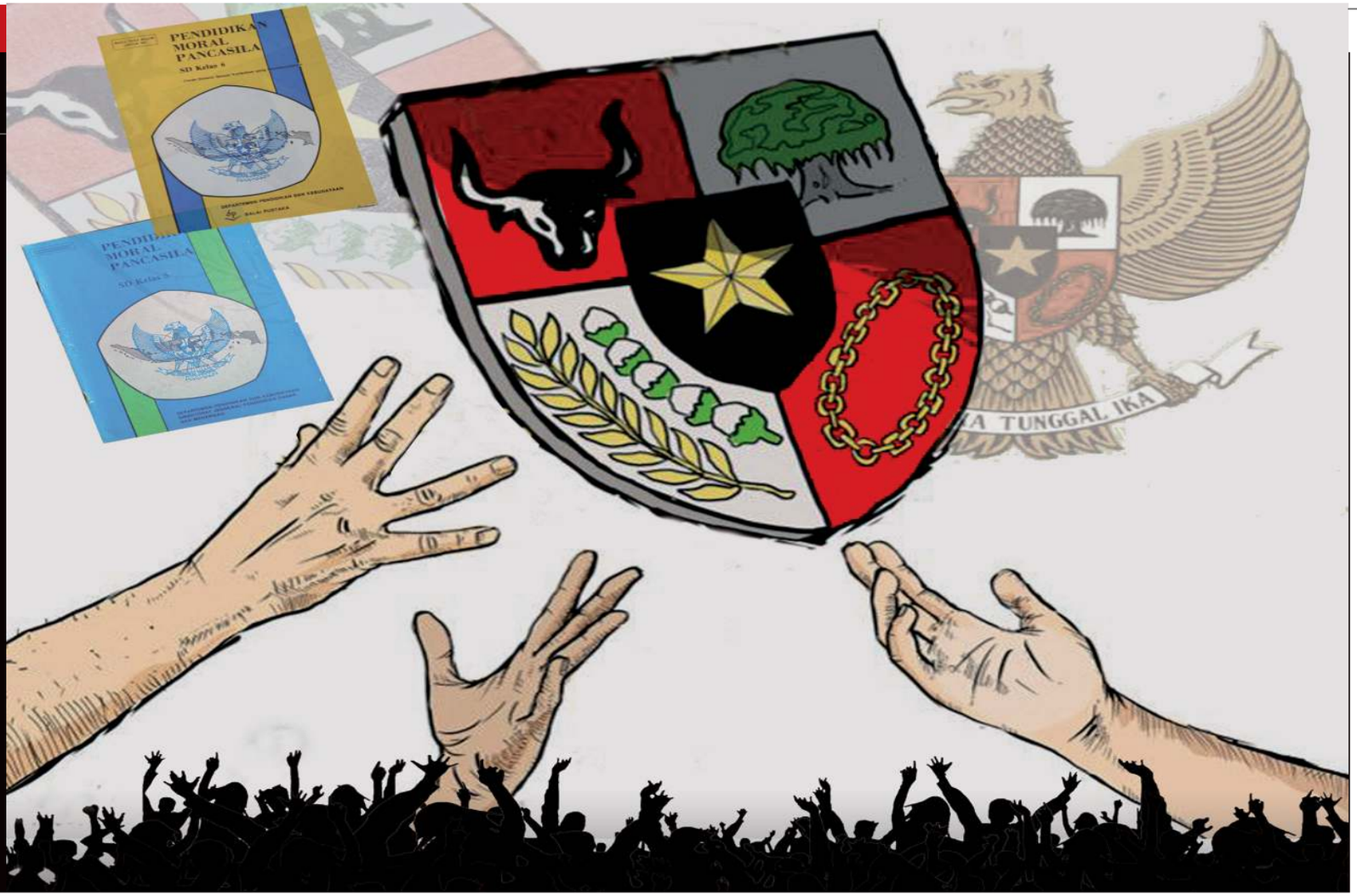

Pancasila juga disertai proyek atau praktik nyata agar peserta didik bisa memahami dan mengambil pelajaran secara langsung dari apa yang mereka praktikkan.

Kemendikbudristek juga mengampanyekan profil Pelajar Pancasila. Ada enam profil Pelajar Pancasila yang diambil dari nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebhinnekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif.

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menyambut baik keputusan pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran tersendiri yang diajarkan di setiap jenjang pendidikan. "Saya mendukung dan menyambut baik upaya-upaya implementasi nilai-nilai Pancasila kepada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan mahasiswa dan alumni perguruan tinggi dalam dan luar negeri, dan juga kalangan masyarakat luas, termasuk para pengusaha," katanya.

Wapres mengatakan, Pancasila adalah dasar negara yang telah diterima seluruh masyarakat Indonesia. Namun, dalam praktiknya, masih perlu berbagai upaya agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik secara pribadi, berkelompok, maupun dalam organisasi. "Sampai saat ini masih ada pihak yang mempertentangkan, misalnya antara Pancasila dan Islam. Mungkin itu perlu diberi penjelasan-penjelasan yang tepat sehingga tidak ada lagi orang yang mempertentangkan antara Pancasila dan agama," ujarnya.

Dukungan Wapres itu disampaikan ketika bertemu dengan jajaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam pertemuan itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan, BPIP telah menyiapkan 15 buku pelajaran Pancasila untuk tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Menurut Yudian Wahyudi, 15 buku pelajaran Pancasila untuk tingkat PAUD hingga perguruan tinggi telah diujicoba dan mendapat masukan dari Komisi II DPR RI dan Kementerian terkait. Materi buku itu adalah 70% praktik Pancasila dan 30% teori. Untuk teori misalnya sejarah Pancasila, sedangkan praktik Pancasila meliputi tindak lanjut gotong royong dan keadilan sosial.

"Intinya guru mengajak siswa berpikir untuk menemukan diri mereka dalam ber-Pancasila di lingkungan masing-masing, sehingga diharapkan nanti akan lahir pahlawan-pahlawan dalam berbagai dimensi yang bisa dilihat dari lingkungan masing-masing," kata Yudian dalam pertemuan dengan Wapres K.H. Ma'ruf Amin, seperti dikutip Antara, Rabu 6 April 2022.

Dukungan Parlemen

Kalangan anggota parlemen juga mendukung Pendidikan Pancasila diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri di sekolah, mulai PAUD, sekolah dasar, tingkat menengah sampai perguruan tinggi. Wakil Ketua MPR, Dr. Hidayat Nur Wahid, MA., menyambut baik keputusan pemerintah yang menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di semua tingkatan pendidikan mulai tahun ajaran baru 2022/2023. Hidayat menyatakan bahwa MPR sudah sejak lama mengusulkan agar Pancasila kembali diajarkan di sekolah-sekolah.

"Pada prinsipnya saya mendukung

Pancasila akan menjadi mata pelajaran wajib tersendiri. Bila kita lihat ke belakang, MPR sudah lama mengusulkan Pancasila menjadi mata pelajaran tersendiri di sekolah. Sejak saya menjabat Ketua MPR masa jabatan 2004-2009, selalu ada tuntutan untuk dihadirkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan kalau sekarang itu dihadirkan kembali, menurut saya, itu adalah keputusan yang baik," katanya kepada *Majelis*.

Hidayat berpendapat bahwa Pancasila memang harus diajarkan secara formal di seluruh jenjang pendidikan dengan baik dan benar, serta terutama dengan keteladanan. Apalagi bangsa Indonesia masih paternalistik. Dengan menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran tersendiri maka pemerintah pun sudah siap hadir menjadi contoh terbaik dalam pemahaman dan pelaksanaan Pancasila.

"Sebab, metode pendidikan dan pengajaran yang terbaik adalah dengan keteladanan. Dengan mewajibkan mata pelajaran Pancasila di sekolah, maka pemerintah sudah siap memosisikan diri sebagai teladan dalam melaksanakan Pancasila dengan baik dan benar," katanya.

Dukungan serupa juga disampaikan Wakil Ketua MPR, Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA. Dia mendukung penuh kebijakan pemerintah yang menetapkan Pancasila sebagai mata pelajaran tersendiri dalam kurikulum untuk setiap jenjang pendidikan yang mulai berlaku pada tahun ajaran baru ini. "Ditetapkannya Pancasila sebagai mata pelajaran tersendiri merupakan salah satu strategi negara dalam memasyarakatkan ideologi dan dasar negara ini," katanya kepada *Majelis*.

Syarif Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, berharap, dengan menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran di semua jenjang pendidikan maka Pancasila akan melekat dan mewarnai serta menjadi way of life generasi milenial, baik di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, dan di masyarakat. Dengan demikian, melalui pendidikan Pancasila, peserta didik dapat merekatkan ikatan persatuan bangsa. "Ini bisa menjadi benteng untuk menangkal paham-paham lain di luar Pancasila yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa," jelasnya.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra,

Sjarifuddin Hasan

Elnino Husein Mohi, juga mendukung Pancasila dikembalikan menjadi mata pelajaran tersendiri dalam kurikulum pendidikan. Bahkan, Elnino menyebut sudah sejak lama MPR mengusulkan agar Pancasila kembali diajarkan di sekolah. Namun, usulan MPR itu belum terealisasi hingga saat ini. Alasannya, Pancasila sudah disisipkan di semua mata pelajaran sehingga tidak perlu menjadi mata pelajaran tersendiri.

"Sejak sekitar 10 tahun lalu, MPR sudah pernah merekomendasikan agar pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP)—yang kemudian diganti menjadi PPKn—dihidupkan kembali. Tetapi, usulan MPR itu tidak pernah dibahas di Kemendikbud," ungkap anggota Komisi X DPR ini.

Elnino Husein Mohi

Dalam perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia, mata pelajaran PMP sudah diganti dengan PPKn, kemudian berganti lagi menjadi PKn. "Coba lihat, di judulnya saja seharusnya kita punya 'moral dan Pancasila', tapi kemudian kita kehilangan 'moral', lalu kita mencampakkan 'Pancasila'. Kata 'moral dan Pancasila' menjadi hilang di ingatan generasi masa kini," ujarnya.

Tak jauh berbeda, anggota MPR dari Fraksi PAN, Desy Ratnasari, menyambut baik keputusan pemerintah menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran tersendiri di setiap jenjang pendidikan. "Ini menjadi semacam sosialisasi dan internalisasi secara kontinu kepada peserta didik di setiap tataran pendidikan," katanya kepada *Majelis.*

Menurut Desy, mata pelajaran Pancasila tidak hanya menjadi hafalan tetapi juga dipraktikkan dalam perilaku. Pancasila menjadi jati diri bangsa. Sebab, nasionalisme berakar dari ideologi bangsa. Karena itu, dengan mata pelajaran Pancasila, diharapkan bisa menguatkan jati diri dan nasionalisme peserta didik, tidak hanya menjadi wacana tetapi benar-benar dipraktikkan sehari-hari.

"Dengan mata pelajaran Pancasila ini bisa membuat peserta didik mendapatkan relasi sosial yang baik sehingga tercipta kedamaian tidak hanya antaranak siswa, antarsekolah, tetapi antarmasyarakat kita yang beragam. Selain itu perlu juga kolaborasi antarinstitusi dalam tataran implementasi. Jadi bukan hanya hafalan tetapi lebih menekankan behaviour (perilaku)," jelas anggota Komisi X DPR ini.

Anggota MPR dari Faksi PKS, Abdul Fikri, juga menyatakan, sangat setuju dengan keputusan pemerintah menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran tersendiri di sekolah. Hanya, ia mengatakan, kebijakan seperti ini harus kokoh tidak tambal sulam. "Secara prinsip saya sangat setuju. Tapi jangan sampai seperti sebelumnya, tiba-tiba ada mata pelajaran yang hilang. Ini disebabkan regulasinya sangat lemah," katanya kepada *Majelis.*

Menurut Abdul Fikri, regulasi itu akan semakin kuat bila mengikuti sistem perencanaan pembangunan nasional. "Jadi jangan sampai mata pelajaran Pancasila hanya sebutan saja. Kita khawatir nanti seperti rancangan undang-undang HIP

(Haluan Ideologi Pancasila) yang ditolak masyarakat. Karena itu, perlu regulasi yang kokoh untuk pendidikan Pancasila. Kalau dimasukkan dalam UU kemudian diturunkan dalam peraturan pemerintah maka akan semakin kuat dan sulit untuk berubah," ujar Abdul Fikri yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR ini.

Kesiapan Guru

Jika Pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran tersendiri lalu bagaimana dengan metode pembelajaran Pancasila? Dan, bagaimana dengan kesiapan guru-guru mengajarkan Pendidikan Pancasila? Menurut Hidayat Nur Wahid, yang paling penting dalam konteks pendidikan bukan sekadar teori semata melainkan juga praktik dan keteladanan. "Jika pemerintah sudah memutuskan Pendidikan Pancasila mulai diajarkan di sekolah maka sudah seharusnya para pejabat Negara, termasuk kementeriannya, menjadi teladan dalam ber-Pancasila sehingga para peserta didik melihat praktik Pancasila secara riil dan konkrit," paparnya.

"Bayangkan, teori Pancasila bagus, tetapi peserta didik melihat perilaku para pejabat negara tidak mencerminkan Pancasila maka pendidikan Pancasila bisa dibilang gagal. Peserta didik akan bertanya, kami disuruh berperilaku Pancasila tetapi pejabat negara sendiri tidak melaksanakan Pancasila. Jadi, kalau pemerintah berani menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran maka pejabat pemerintah juga harus menjadi contoh dan teladan ber-Pancasila yang sesungguhnya," sambung politisi PKS ini.

Lebih lanjut Hidayat memaparkan contoh-contoh keteladanan (pejabat) pemerintah dalam melaksanakan Pancasila dengan baik dan benar. Untuk sila Ketuhanan yang Maha Esa, mereka harus memberi keteladanan dengan tidak membiarkan perilaku-perilaku anti-agama, bahkan tidak membuka ruang bagi atheis, atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan agama.

Begitu juga dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka pelaksanaan sila kedua ini harus menghadirkan perilaku dalam berbangsa dan bernegara yang bisa menjadi teladan, yaitu perilaku manusiawi, yang adil dan beradab. "Sehingga hukum yang diterapkan benar-benar hukum yang

Desy Ratnasari

memberi keadilan dan berdampak pada hadirnya kemanusiaan yang beradab, bukan perilaku biadab dengan hukum tebang pilih, atau hukum yang menyasar pihak-pihak berdasarkan like dan dislike," kata Hidayat.

Pemerintah juga harus memberi teladan dalam pelaksanaan sila Persatuan Indonesia. Agar sila ini dipahami peserta didik maka perlu mendapatkan keteladanan dari pemerintah dalam merawat dan menguatkan persatuan Indonesia. Misalnya, menerima perbedaan dan keragaman dalam konteks mempersatukan. "Jangan sampai peserta didik mendapat kesan pemerintah membiarkan buzzer yang menyebar kebencian dan memecah belah persaudaraan dan persatuan bangsa. Juga pemerintah harus

Abdul Fikri

bertindak tegas terhadap gerakan separatis," katanya.

Pancasila, lanjut Hidayat, menyebutkan secara gamblang sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. "Artinya, orientasi pemerintah adalah menguatkan semangat bermusyawarah, bukan dengan memberi kesan keputusan diambil dengan menang-menangan dan banyak-banyakan suara atau melalui voting," tuturnya.

Kemudian, pemerintah harus berorientasi pada sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. "Pemerintah harus menampilkan contoh teladan realisasi dari sila kelima ini. Sementara rakyat masih merasakan ketimpangan dan belum terwujudnya keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Agar tujuan Pendidikan Pancasila tercapai, sambung Hidayat, maka guru atau dosen perlu dipersiapkan secara baik. Sehingga ketika berhadapan dengan peserta didik, kata Hidayat, para guru dan dosen tidak menghadapi kendala. Jika perlu para guru dan dosen mengikuti sosialisasi Empat Pilar MPR.

"Di MPR sendiri kegiatan sosialisasi Empat Pilar juga menyasar target para guru dan staf pengajar. Langkah ini untuk meningkatkan wawasan mereka terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," ungkap Hidayat.

Sependapat dengan Hidayat, Syarief Hasan pun meminta para guru untuk membekali diri dengan pengetahuan yang luas seputar Pancasila. Sebab, mereka akan berhadapan langsung di depan kelas menerangkan mata pelajaran ini kepada siswa dan mahasiswa. "Ini sangat penting, sebab kita ingin anak-anak kita mendapatkan pembelajaran soal Pancasila secara utuh," tegas Guru Besar Universias Negeri Makassar ini.

Desy Ratnasari juga berpendapat sama. Desy berharap, para pendidik dan tenaga kependidikan harus siap secara pengetahuan dan secara sikap mental dan perilaku. Desy mengakui, para pendidik pasti sudah dibekali pengetahuan tentang Pancasila, tetapi perlu meningkatkan pemahaman untuk menghadapi peserta didik yang lebih kritis dalam melihat kenyataan di masyarakat. ❑

DER/BSC

Dari Civics ke Pendidikan Pancasila

Dalam sejarah pendidikan Indonesia, sejak Orde Lama hingga reformasi, pemerintah sudah berulangkali mengganti nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada Juli 2022 ini, pemerintah mengganti mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi Pendidikan Pancasila.

PENDIDIKAN kewarganegaraan (*civics education*) diperkenalkan untuk pertama kalinya pada tahun 1790 di Amerika Serikat. Saat itu, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah agar penduduk Amerika Serikat memiliki satu identitas sebagai bangsa Amerika. Sebab, penduduk Amerika Serikat sangat beragam karena imigran dari banyak negara di dunia yang datang ke negara itu.

Di Indonesia, *civics education* itu pun diadopsi dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pertama kali muncul dalam sistem pendidikan nasional pada tahun 1957. Tak jauh berbeda dengan Amerika Serikat, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mendidik anak bangsa mengenai hak dan kewajiban warga negara serta cara-cara untuk memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan.

Kemudian pada tahun 1959, ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K) mengeluarkan Surat Keputusan No. 122274/S pada 10 Desember 1059 terkait pembentukan panitia yang terdiri dari tujuh orang untuk menyusun buku pedoman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia (WNI) serta sejarah maupun tujuan revolusi Indonesia.

Panitia yang terbentuk itu kemudian menyusun buku "Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia." Buku ini disebut dengan istilah Inggris "Civics" atau dalam istilah bahasa Indonesia "Kewarganegaraan". Sejak saat itu, buku "Civics" atau Kewarganegaraan menjadi sebuah nama mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah. Civics mulai diajarkan di sekolah pada tahun 1961.

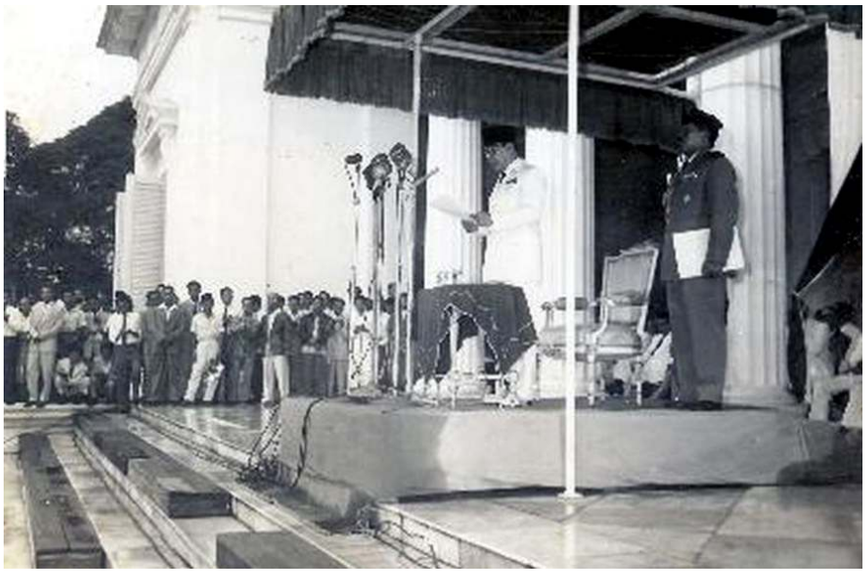

Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959

Materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan berisi tentang sejarah pergerakan atau perjuangan rakyat Indonesia, Pancasila, UUD 1945, demokrasi dan ekonomi terpimpin, konferensi Asia Afrika, kewajiban dan hak warga negara, manifesto politik, lampiran tentang Dekrit Presiden, Declaration of human rights, dan Panca Wardhana (ilmu perkembangan). Civics menjadi alat untuk mendorong manifesto politik yang memiliki landasan sosialisme.

Pada era Orde Baru, seiring dengan jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto setelah peristiwa pemberontakan G30S/PKI, mata pelajaran Civics atau "Pendidikan Kewarganegaraan" kemudian berubah menjadi "Pendidikan Kewargaan Negara". Perubahan nama ini atas usul Menteri Kehakiman pada waktu itu, Mr. Suhardjo.

Hampir seluruh materi dari Civics dibuang karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pada masa Orde Baru, WNI yang baik adalah warga negara yang Pancasilais, manusia pembangunan, dan sebagainya. Sementara itu, pemerintah Orde Lama mendefinisikan warga negara yang baik adalah warga negara yang berjiwa revolusioner, anti imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme.

Namun, usulan itu hanya berlaku sebentar. Pada 1968, pemerintahan Soeharto memberlakukan Kurikulum 1968. Dalam kurikulum itu, nama mata pelajaran "Pendidikan Kewargaan Negara" berubah lagi atau kembali menjadi "Pendidikan Kewarganegaraan" atau Civics. Masih di era Soeharto, pada Kurikulum 1975, ada tambahan bidang studi dalam mata pelajaran "Pendidikan Kewarganegaraan" atau Civics, yaitu Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Bidang studi PMP dimaksudkan untuk membentuk warga negara yang Pancasilais.

PMP sebagai salah satu mata pelajaran dalam kurikulum 1975 terkait dengan Ketetapan MPR No IV/MPR/1973 tentang GBHN. Dalam Ketetapan itu disebutkan pendidikan nasional di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan atas ideologi

Pancasila. Pendidikan harus mampu meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selain kecerdasan, keterampilan, budi pekerti, kepribadian, dan paham kebangsaan.

Pada masa Orde Baru pun keluar Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Sesuai dengan ketetapan tersebut, pemerintah menetapkan bahwa setiap warga negara wajib menyimak materi pendidikan moral yang bernama Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Penyusunan materi pembelajaran PMP kemudian disesuaikan dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

P4 mendominasi bidang studi PMP. Dalam pelaksanaannya, bukan hanya pelajar yang mendapatkan P4, tetapi masyarakat umum juga melalui penataran P4 oleh Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Karena itu, P4 dianggap sebagai bahan indoktrinasi semasa Orde Baru.

Dalam sebuah Ketetapan MPR tahun 1983 disebutkan, "Untuk mencapai cita-cita (pembangunan jangka panjang), maka kurikulum di semua tingkat pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila." PMP menjadi mata pelajaran wajib dan salah satu dasar pembentukan landasan ideologis dan moral rakyat Indonesia pada masa Orde Baru.

Secara umum, PMP berisi materi

Presiden Soeharto

pembelajaran tentang Pancasila dan UUD 1945, serta sedikit tentang sejarah bangsa Indonesia. Materi PMP didesain sedemikian rupa dengan tujuan menanamkan doktrin ideologi Pancasila secara sistematis.

Berikutnya, pada Kurikulum 1984, kembali terjadi perubahan nama. Nama "Pendidikan Kewarganegaraan" termasuk di dalamnya bidang studi Pendidikan Moral Pancasila (PMP), diubah menjadi "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)". Namun, terjadi tumpang tindih mata pelajaran PPKn dengan mata pelajaran lain dalam kurikulum yang baru ini, yakni mata pelajaran Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB) dengan Sejarah Nasional maupun P4. Pasalnya, saat itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1983-1985) Nugroho Notosusanto memasukkan pelajaran Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB) dalam kurikulum. PSPB merupakan pelajaran yang tumpang tindih dengan Sejarah Nasional dan PMP (termasuk P4).

Di era reformasi, gonta-ganti nama mata pelajaran seiring perubahan kurikulum seperti masa Orde Baru masih kerap terjadi. Melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, terjadi lagi perubahan nama dari mata pelajaran PPKn menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Namun, perubahan dari Kurikulum 2006 ke Kurikulum 2013 menandai pergantian nama mata pelajaran dari PKn menjadi PPKn kembali. PPKn menjadi salah satu sarana bagi para siswa untuk mengenal nilai-nilai Pancasila.

Jika kurikulum tahun 2006 mata pelajaran PKn fokus pada pembentukan warga negara untuk memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya, maka pada kurikulum tahun 2013, mata pelajaran PPKn menggunakan materi Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika). Hingga saat ini, PPKn menjadi salah satu sarana masyarakat untuk mengenal nilai-nilai Pancasila.

Kini di awal tahun ajaran baru 2022/2023, mata pelajaran PPKn pun berganti nama menjadi Pendidikan Pancasila. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menetapkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka mulai tahun ajaran 2022/2023. Sekitar 140.000 satuan pendidikan mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia, mulai menerapkan Pendidikan Pancasila.

"Implementasi Pendidikan Pancasila melalui Kurikulum Merdeka mengedepankan proses belajar yang menyenangkan dan relevan sehingga anak-anak kita memahami cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari," kata Mendikbudristek Nadiem Makarim. ❑

BSC (dari berbagai sumber)

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dr. Hidayat Nur Wahid, MA Wakil Ketua MPR RI

Saya Mendukung Pancasila Menjadi Mata Pelajaran Tersendiri

MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Surat Keputusan Mendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran (Kurikulum Merdeka). Dalam Kurikulum Merdeka itu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diganti menjadi Pendidikan Pancasila.

Penggantian nomenklatur PPKn menjadi Pendidikan Pancasila merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP No. 57 Tahun 2021 ini mengundang polemik karena menghilangkan Pendidikan Pancasila dalam muatan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kini, mulai tahun ajaran baru 2022/2023, Pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran tersendiri di semua jenjang pendidikan.

Untuk mengetahui respon Pimpinan MPR terhadap Pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran tersendiri di sekolah, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid, MA. Berikut petikan wawancara Majelis dengan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.

Pancasila kembali menjadi mata pelajaran tersendiri yang diajarkan mulai tahun ajaran baru 2022/2023 di semua tingkatan pendidikan. Apa komentar atau pendapat Bapak ?

Pada prinsipnya saya mendukung Pancasila menjadi mata pelajaran wajib tersendiri. Bila kita lihat ke belakang, sejak saya menjabat Ketua MPR masa jabatan 2004-2009, selalu ada tuntutan untuk dihadirkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Kalau sekarang Pancasila kembali diajarkan di sekolah, itu adalah keputusan yang baik.

Dengan kembalinya Pancasila menjadi mata pelajaran tersendiri yang diajarkan di semua tingkatan sekolah maka bisa membendung sejak dini berkembangnya paham-paham radikalisme di kalangan siswa/mahasiswa. Apa komentar dan pendapat Bapak?

Jika kurikulum dibuat dengan benar dan melibatkan banyak pihak yang *concern* kepada Pancasila, serta ada penyesuaian *link and match* antara teori praktik dan keteladanan, saya rasa pendidikan Pancasila kepada anak didik akan membentengi mereka dari serbuan pemahaman negatif seperti komunisme, radikalisme, atheisme, kapitalisme, yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

Apakah metode pengajaran Pendidikan Pancasila hanya pada aspek kognitif (hanya pengetahuan)) atau juga aspek pembentukan karakter (penanaman pada perilaku yang Pancasilais)?

Sebaiknya dalam konteks pendidikan, bukan hanya sekedar teori semata tapi praktik dan keteladannya. Jadi, jika sudah dibuat

keputusan demikian maka sudah seharusnya para pejabat Negara, termasuk kementerian, menjadi teladan ber-Pancasila sehingga Pancasila yang riil dan konkret itu hadir

Coba bayangkan kalau teorinya bagus-bagus tapi anak-anak melihat perilaku para pejabat pemerintah tidak mencerminkan Pancasila berarti pendidikan Pancasila bisa gagal. Kasarnya, anak-anak bisa mengatakan, kami sebagai siswa kok disuruh-suruh, sedangkan Anda sendiri (pejabat negara) tidak melaksanakannya. Jika mereka (pemerintah) berani menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib maka mereka (pejabat negara) harus berani menjadi contoh manusia ber-Pancasila yang sesungguhnya.

Misalnya, pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka harus menjadi manusia yang berketuhanan yang maha esa bukan menjadi manusia yang anti pada ketuhanan yang maha esa, anti agama, membiarkan pelecehan terhadap agama, membiarkan terjadinya perilaku atheistic dan komunistik.

Kedua, Kemanusian yang Adil dan Beradab, artinya kalian (pemerintah atau pejabat negara) harus menjadi contoh manusia yang adil dan beradab, hukumnya juga harus adil dan beradab. Jangan sampai anak-anak kita dipertontonkan dengan berlakunya hukum yang tidak adil.

Ketiga, Persatuan Indonesia. Jangan sampai anak-anak diajarkan tentang persatuan, tapi mereka melihat ada sekelompok orang seperti *buzzer* yang merusak persatuan dan memecah belah bangsa dibiarkan saja atau separatisme tidak diselesaikan.

Keempat, pada sila keempat, kalau yang dipertontonkan ke anak-anak kita yakni politik hanya sekedar main banyak-banyakan atau voting, di mana musyawarahnya? Demikian juga dengan sila ke lima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bagaimana kita semua menerapkan keadilan sosial dalam tataran riil, di saat segelintir konglomerat negeri ini menguasai hampir 75% aset negara atau aset keekonomian negara.

Sistem pendidikan yang paling baik adalah pendidikan dengan keteladanan. Bukti keteladanan akan menjadi salah satu faktor penentu suksesnya mata pelajaran Pancasila.

Bagaimana agar Pancasila bisa diajarkan secara efektif dan sesuai dengan harapan?

Agar hasilnya sesuai apa yang diharapkan maka pemyusunan kurikulumnya harus tepat. Perlu komunikasi secara holistik dengan semua elemen bangsa, seperti MPR dengan badan sosialisasi dan pengkajiannya, BPIP, Kementerian Agama, Komisi X dan VIII DPR RI. Selain itu, juga dengan elemen masyarakat seperti Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia yang di dalamnya ada Majelis Pendidikan Dikdasmen Muhammadiyah, PGRI, BP MPK dan Himpunan Sekolah dan Madrasah Seluruh Indonesia.

Komunikasi ini penting agar jangan sampai Pancasila malah tidak dimuat sebagai pelajaran wajib untuk siswa dan mahasiswa, seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomer 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ini sangat ironis. Mungkin hal ini karena adanya ego sektoral sehingga tidak melibatkan pihak lain atau mendengarkan elemen lain.

Bagaimana dengan kesiapan tenaga pengajar untuk Pendidikan Pancasila di sekolah?

Tentu saja begitu Pendidikan Pancasila ditetapkan menjadi mata pelajaran wajib tersendiri maka kurikulum, termasuk kemampuan guru dan dosennya, harus dipersiapkan secara baik. Sehingga ketika para guru berhadapan dengan siswa tidak ada kendala

Apakah para guru perlu mendapat tambahan pengetahuan tentang Pancasila (melalui penataran atau sosialisasi Empat Pilar MPR)?

Menurut saya sangat perlu. Di MPR sendiri dalam kegiatan sosialisasi Empat Pilar juga menyasar target para guru dan dosen. Hal ini untuk meningkatkan wawasan mereka terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 , NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika

Pendidikan Pancasila di sekolah bisa meringankan tugas MPR menyosialisasikan Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika)?

MPR adalah Lembaga negara yang memiliki salah satu tugas, yakni sosialisasi Empat Pilar MPR antara lain Pancasila. Tugas melakukan sosialisasi tentang nilai luhur bangsa adalah tugas setiap elemen bangsa, bukan hanya MPR. Pendidikan Pancasila di sekolah akan lebih baik karena terstruktur melalui kurikulum.

Tugas MPR melakukan sosialisasi adalah amanah UU. Karena sangat penting memberi pemahaman tentang nilai-nilai luhur bangsa itu kepada generasi muda. Sebab, mereka adalah generasi penerus kepemimpinan bangsa dan pewaris Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. ❑

Sidang Tahunan MPR RI 2022

Pimpinan Lembaga Negara

Direncanakan Sampaikan Laporan Kinerja Secara Langsung

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2022 rencananya dilakukan sesuai konsep yang telah dimatangkan sejak tahun 2020.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo bersama para Wakil Ketua MPR RI tengah mematangkan persiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2022. Mengingat situasi pandemi Covid-19 sudah mulai terkendali, maka dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2022 ini rencananya dilakukan sesuai konsep yang telah dimatangkan sejak tahun 2020 lalu.

Sesuai hasil rapat konsultasi pimpinan MPR dengan berbagai pimpinan lembaga Negara, seperti DPD RI, MA, MK, BPK, dan KY yang dilakukan pada tahun 2020 lalu disepakati bahwa Sidang Tahunan MPR RI akan memfasilitasi para pimpinan Lembaga Negara menyampaikan laporan kinerjanya selama setahun terakhir secara langsung kepada rakyat melalui Sidang Tahunan MPR RI. Untuk mematangkannya, dalam waktu dekat pimpinan MPR RI akan melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR RI dan juga Presiden Joko Widodo serta para pimpinan Lembaga Negara lainnya.

"Sidang Tahunan MPR RI yang dihadiri anggota DPR RI sebagai representasi politik dan anggota DPD RI sebagai representasi daerah, sangat pas dijadikan tempat untuk memfasilitasi pimpinan Lembaga Negara dari mulai Presiden, MPR RI, DPR RI, DPD RI, MK, MA, BPK, dan KY, dalam menyampaikan laporan kinerjanya selama setahun terakhir kepada rakyat. Jadi dalam forum tersebut, MPR RI juga melaporkan kinerjanya selama setahun terakhir. Penilaian terhadap laporan berbagai lembaga negara sepenuhnya diserahkan kepada rakyat, bukan kepada MPR RI. Pelaksanaanya tidak berarti para pimpinan lembaga negara bertanggungjawab kepada MPR RI, melainkan tetap bertanggungjawab secara langsung kepada rakyat," ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Jakarta, Selasa (21/6/22).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain: Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarif Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, penyampaian laporan kinerja tahunan lembaga negara secara langsung kepada rakyat melalui Sidang Tahunan MPR RI bukan hanya menjadi legacy MPR RI secara kelembagaan. Melainkan juga menjadi legacy bangsa Indonesia dalam peningkatan sistem akuntabilitas penyelenggaraan ketatanegaraan yang sejak dulu digagas oleh Bapak Empat Pilar MPR Almarhum Taufiq Kiemas.

"Melalui Sidang Tahunan MPR RI, rakyat bisa mendengar dan mengetahui apa saja yang sudah dijalankan berbagai lembaga negara

dan juga lembaga kepresidenan selama setahun terakhir. Sehingga bisa mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta mendewasakan pembangunan demokrasi. Sekaligus dijadikan ajang bagi lembaga negara dan kepresidenan untuk unjuk prestasi kepada rakyat," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, menghadapi tahun Pemilu 2024 yang sudah semakin dekat, Pimpinan MPR RI akan kembali memasifkan silaturahim kebangsaan ke berbagai organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan. Mengajak berbagai kalangan menjaga Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi rakyat, jangan terprovokasi oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang ingin menjadikan Pemilu 2024 sebagai ajang memecah belah bangsa.

"Silaturahim Kebangsaan juga diperlukan agar MPR RI bisa tetap membumi di berbagai kalangan. Menjadi Rumah Kebangsaan yang menjaga kemajemukan bangsa, pengawal ideologi Pancasila, serta penegak konstitusi dan kedaulatan rakyat. Menjadi benteng bagi tetap berdirinya NKRI," pungkas Bamsoet. ❑

Perubahan Nomenklatur Forum Majelis Syuro Dunia

Pimpinan MPR Sepakat Menjadi Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia

"Kita memerlukan sebuah wadah di mana negara-negara bersikap netral dan tidak memihak suatu kekuatan adidaya di dunia," ungkap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, dalam Rapat Pimpinan MPR RI disepakati perubahan nomenklatur Forum Majelis Syuro Dunia yang digagas MPR RI menjadi Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia (The Forum For World Consultative Assembly). Forum ini bisa menjadi jembatan bagi negara-negara non-blok untuk mengelola isu-isu geo-strategis. Kerjasama ini berbasis parlemen dan anggota Forum MPR Dunia diharapkan negara-negara non-blok.

"Kita memerlukan sebuah wadah di mana negara-negara bersikap netral dan tidak memihak suatu kekuatan adidaya di dunia. Meski perang dingin sudah berakhir dan komunisme sudah runtuh, Amerika dan Rusia masih menjadi negara adidaya yang memiliki pengaruh besar bagi dunia. Selain itu, kemunculan kekuatan-kekuatan baru, seperti Cina dan Uni-Eropa, menciptakan blok lain yang memiliki daya tarik kekuasaan dan pengaruh politik. Kekuatan baru ini cukup agresif dalam penetrasi ekonomi," ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Jakarta, Selasa (21/6/22).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain: Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarif Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, tahap awal Indonesia akan mengajak negara-negara berpenduduk mayoritas muslim bergabung dalam Forum MPR Dunia. Saat ini tercatat ada 50 negara di dunia yang jumlah populasi muslimnya mayoritas. Setelah itu, Indonesia akan mengajak negara-negara di Asia dan Afrika dengan menggunakan wadah International Parlieamentary Union (IPU) untuk menyeleksinya.

"Dukungan pembentukan Forum MPR Dunia telah diberikan Raja Arab Saudi, King Salman bin Abdulaziz al-Saud, Ketua Parlemen Arab Saudi H.E. Mr. Abdullah Bin Muhammad Al Ash-Sheikh, Ketua Parlemen Maroko H.E Mr. Hakim Benchamach, dan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam Al Islami) Sheikh Mohammed bin Abdulkarim Al Issa. Dukungan juga diberikan duta besar sejumlah negara sahabat, seperti Duta Besar Kesultanan Oman, Duta Besar Maroko, Duta Besar Yaman, Duta Besar Iran, Duta Besar Qatar, dan Duta Besar Bahrain," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Forum MPR Dunia diharapkan bisa terbentuk pada Oktober 2022. Proses pembentukannya akan dilakukan di Gedung Asia-Afrika, Bandung. Mengingat tempat tersebut sangat bersejarah sebagai tempat lahirnya Konferensi Asia Afrika, yang memainkan peranan penting bagi diplomasi internasional Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia.

"Forum ini juga belajar dari Konferensi Asia-Afrika 1955, yang menghasilkan resolusi yang dikenal dengan 'Dasasila Bandung.' Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari konferensi ini adalah menggalang kerjasama negara-negara anggota untuk melonggarkan ketergantungan ekonomi pada negara-negara maju. Selain, mengutamakan kerjasama ekonomi di antara mereka, serta menjembatani negara-negara anggota untuk membuka peluang-peluang ekonomi.," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum SOKSi ini menambahkan, salah satu sebab kemunduran ekonomi negara-negara di Asia dan Afrika adalah karena absennya transparansi dan pengelolaan negara secara demokratis. Pemerintahan yang otoriter cenderung memikirkan dirinya sendiri, keluarga, dan koleganya. Perubahan ekonomi sulit dilakukan di negara-negara yang tertutup.

"Forum ini bisa menjadi wadah untuk membantu negara-negara anggota memperbaiki kualitas demokrasi mereka atau membantu melakukan konsolidasi demokrasi. Tidak ada yang bisa mengungguli kerjasama antar parlemen dalam hal demokrasi. Tujuan parlemen adalah merawat demokrasi dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih bebas," pungkas Bamsoet. ❑

Terima Pengurus Besar IDI

Bamsoet Dorong Sistem Kesehatan Nasional Diatur dalam Undang-Undang

“Momentum menghadirkan Undang-Undang Sistem Kesehatan Nasional saat ini sangat tepat. Mengingat pandemi Covid-19 telah membuka mata semua pihak betapa sistem kesehatan nasional masih sangat rapuh,” ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

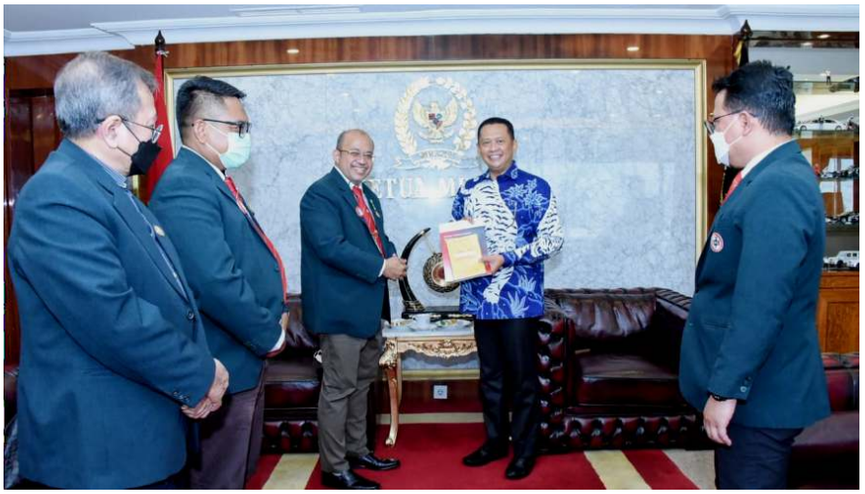

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendorong Sistem Kesehatan Nasional yang selama ini diatur dalam Peraturan Presiden No.72/2012 disempurnakan menjadi diatur dalam undang-undang. Dengan memiliki kedudukan hukumnya lebih kuat, penguatan sistem kesehatan nasional bisa meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan nasional.

Selain itu, juga dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dunia kesehatan. Dari mulai penyediaan sumber daya tenaga kesehatan melalui praktik kedokteran, skema pembiayaan kesehatan untuk masyarakat, hingga penyediaan sumber daya kesehatan. Seperti fasilitas puskesmas, rumah sakit, kefarmasian, laboratorium, serta ketersediaan berbagai alat kesehatan. Berbagai permasalahan tersebut terlihat dalam laporan Bappenas yang mencatat pada triwulan III tahun 2021, hanya 56,4% fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 88,4% rumah sakit yang terakreditasi, serta masih ada 4,97% puskesmas tanpa dokter.

“Kehadiran Undang-Undang Sistem Kesehatan Nasional juga bagian dari pengejawantahan amanat konstitusi, khususnya dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Serta Pasal 34 ayat 3 yang menyatakan, negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak,” ujar Bamsoet usai menerima Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Senin (20/6/22).

Pengurus PB IDI yang hadir antara lain, Ketua Umum Moh. Adib Khumaidi, Wakil Ketua Umum 2 Mahesa Paranadipa, Sekjen Ulul Albab dan Ketua Dewan Pakar Anwar Santoso.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, ini menjelaskan, momentum menghadirkan Undang-Undang Sistem Kesehatan Nasional saat ini sangat tepat. Mengingat pandemi Covid-19 telah membuka mata semua pihak betapa sistem kesehatan nasional masih sangat rapuh.

“Sebagaimana dicatat Bappenas, beberapa pembelajaran penting atas kurangnya respon sistem kesehatan nasional menghadapi pandemi Covid-19, antara lain terlihat dalam hal kurangnya tenaga kesehatan, lemahnya pemanfaatan teknologi informasi untuk surveilans, kapasitas pelayanan kesehatan yang terbatas, hingga mekanisme mobilisasi pembiayaan kesehatan yang rendah,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, kehadiran Undang-Undang Sistem Kesehatan Nasional juga bisa memperkuat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sekaligus memastikan lebih detail agar amanat Pasal 171 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menekankan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar lima persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji; dan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal sepuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji, bisa dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

“Selama ini, persentase anggaran kesehatan yang dikeluarkan Indonesia hanya sekitar 1,4% dari PDB. Jauh lebih kecil dibandingkan Vietnam sebesar 2,7%, Inggris 7,6%, dan Jerman 8,7%. Pada periode 2017–2020, rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran fungsi kesehatan hanya mencapai 22,5% per tahun, yaitu dari Rp 57.225,1 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp 105.088,5 miliar pada tahun 2020,” pungkas Bamsoet. ❑

Kunjungan Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia

Kembalikan Prasasti Pucangan Demi Keutuhan Peradaban Bangsa

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat berharap, semua pihak mengambil peran dalam proses pengembalian benda-benda bersejarah yang terkait dengan perjalanan bangsa ini. Seperti Prasasti Pucangan yang masih berada di India, agar segera dikembalikan ke Tanah Air.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendesak agar Prasasti Pucangan peninggalan Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan di Jawa Timur yang saat ini berada di India agar dikembalikan ke Tanah Air. Karena prasasti itu merupakan bagian dari sejarah Nusantara yang di dalamnya sarat nilai-nilai peradaban tinggi yang wajib diwariskan kepada generasi penerus bangsa.

Rerie, sapaan Lestari Moerdijat, menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia di ruang kerjanya, Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Senin (20/6). “Upaya untuk mengembalikan Prasasti Pucangan ke Tanah Air harus dilakukan, mengingat prasasti itu merupakan bagian dari perjalanan sejarah di Nusantara yang mengandung nilai-nilai budaya bangsa ini,” katanya.

Ketua Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia, Dr. Ninie Susanti mengungkapkan, Prasasti Pucangan merupakan peninggalan penting di Nusantara, karena prasasti pada tahun 1037 Masehi itu berisi tentang riwayat hidup Raja Airlangga yang paling lengkap. Ketika itu Airlangga merupakan raja terbesar di Asia Tenggara. Menurut Ninie, Prasasti itu dibawa ke India pada masa Raffles berkuasa di Nusantara.

Menurut Lestari, identitas bangsa yang memiliki nilai sejarah peradaban yang tinggi, seperti Prasasti Pucangan, harus menjadi prioritas untuk dipulangkan ke tanah air. Dia berharap, semua pihak mengambil peran dalam proses pengembalian benda-benda bersejarah yang terkait dengan perjalanan bangsa ini.

Kepedulian pemerintah dalam melakukan repatriasi sejumlah peninggalan sejarah bangsa yang saat ini berada di luar negeri, tegas Rerie, sangat diharapkan. Agar nilai-

nilai budaya yang diwariskan peradaban Nusantara di masa lalu, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dapat dipelajari dan dipahami oleh generasi penerus bangsa.

Pemahaman terhadap nilai-nilai peradaban Nusantara yang tinggi itu, menurut Rerie, bisa menjadi modal untuk membangkitkan semangat dan kebanggaan anak bangsa terhadap tanah air. Di tengah upaya bangsa ini untuk bangkit dari ancaman keterpurukan di sejumlah bidang, tegas Rerie, berbagai potensi untuk memicu semangat dan bersatu untuk bangkit harus segera direalisasikan. ❑

Hari Melawan Ujaran Kebencian Dunia

Lawan Ujaran Kebencian untuk Perkuat Persatuan

Upaya melawan ujaran kebencian di tanah air harus terus dilakukan di tengah kebhinekaan bangsa yang dituntut memperkuat persatuan dalam setiap proses pembangunan Ibu Pertiwi.

DI TENGAH keberagaman dan kompleksnya tantangan pembangunan saat ini, bangsa ini membutuhkan kebersamaan yang kuat untuk menjawab setiap tantangan. Pola komunikasi yang baik dan bebas dari ujaran kebencian di ruang publik menjadi sebuah keharusan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/6).

Pada Sabtu (18/6) dunia untuk pertama kalinya memperingati hari Melawan Ujaran Kebencian Sedunia, setelah tahun lalu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyoroti keprihatinan global terhadap ujaran kebencian, terutama cyber bullying di seluruh dunia.

Februari 2022 lalu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan 1.042 akun media sosial untuk diberikan peringatan, karena diduga menyebarkan konten bermuatan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Menurut Lestari, efek ujaran kebencian di ruang publik yang mampu memecah belah suatu bangsa itu harus menjadi perhatian serius semua pihak di negeri ini.

Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam waktu dekat tahapan pemilu serentak yang sarat dengan aksi kompetisi perorangan hingga kelompok berpotensi menimbulkan friksi.

Menurut Rerie, upaya dini untuk terus menginformasikan pola-pola komunikasi yang santun dan bertanggung jawab di ruang publik harus disosialisasikan kepada masyarakat luas.

Karena, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sebagian besar pelaku ujaran kebencian mengaku tidak tahu batasannya.

Upaya sosialisasi, jelas Rerie, harus diikuti dengan langkah edukasi yang mudah dipahami masyarakat untuk menekan potensi ujaran kebencian di ruang-ruang publik. ❑

Perkawinan Beda Agama

HNW: Tidak Sejalan dengan Konstitusi

Agar masalah perkawinan beda agama tidak makin banyak menimbulkan korban dan keresahan masyarakat tak semakin meluas, maka ketentuan pelarangan itu harusnya segera dibahas dan disahkan oleh DPR dan Pemerintah.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mendukung sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta agar penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengizinkan perkawinan beda agama dibatalkan, karena perkawinan jenis tersebut sejatinya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

"Perkawinan beda agama jelas tidak sejalan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Itu mudah dibaca pada Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (23/6).

Ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Sedangkan, soal apa itu perkawinan yang "sah", sudah jelas dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama kedua pasangan. Sementara Agama Islam mengatur tidak sahnya perkawinan beda Agama.

HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, menambahkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) juga mengatur bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia tidaklah liberal, tetapi mengakui adanya pembatasan praktik hak asasi manusia dalam rangka menghormati HAM pihak yang lain, termasuk dalam hak untuk menikah, yang salah satunya mempertimbangkan nilai-nilai agama.

"Ini antara lain yang jadi rujukan di dalam UUD NRI Tahun 1945 bahwa perkawinan beda agama tidak diakui, termasuk dalam praktik HAM, di Indonesia," tukas Anggota Komisi VIII DPR RI yang salah satunya membidangi urusan keagamaan ini.

Lebih lanjut, HNW mengatakan, Mahkamah Konstitusi yang berwenang menafsirkan dan menjaga konstitusi juga telah berulangkali memutus perkara judicial review terkait perkawinan beda agama. "Dan, MK juga telah menolak permohonan-permohonan agar perkawinan beda agama dinyatakan sah, karena UU Perkawinan yang berlaku saat ini, yang mengatur tidak sahnya perkawinan beda agama dinyatakan sah dan konstitusional," ujarnya.

HNW menyayangkan sikap hakim tunggal di PN Surabaya yang mengesampingkan aturan-aturan dasar tersebut dengan mengizinkan perkawinan beda agama. Dalam penetapannya, hakim di PN Surabaya menggunakan Pasal 35A UU Administrasi dan Kependudukan (UU Adminduk).

Pasal 35A berbunyi, "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan." Sedangkan Penjelasan Pasal 35A UU Adminduk menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama."

HNW mengatakan bahwa meski maksud ketentuan itu untuk pencatatan perkawinan, tentunya bukan pencatatan perkawinan beda agama yang melibatkan calon mempelai yang beragama Islam, karena Islam mengatur hal pelarangan itu dengan ketat. Sayangnya, ketentuan itu justru digunakan oleh pengadilan untuk mengizinkan perkawinan beda agama, termasuk yang beragama Islam. Ia menegaskan bahwa sejak pembahasan di DPR, ketentuan ini telah ditolak oleh sejumlah kalangan, termasuk oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), karena dinilai sebagai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan UU Perkawinan yang berlaku.

"Namun, sayangnya, ketentuan itu masih lolos ke dalam UU Adminduk. Oleh karenanya, sebaiknya DPR dan Pemerintah segera merevisi kembali ketentuan tersebut sehingga tidak bertabrakan dengan UU Perkawinan dan UUD NRI Tahun 1945. Atau agar MA membatalkan penetapan pengadilan

yang bertentangan dengan UU dan UUD itu," tukasnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahera (PKS) ini juga mengomentari pandangan sebagian kalangan yang membandingkan, lebih baik diizinkan perkawinan beda agama daripada mereka melakukan kumpul kebo. "Ini juga logika yang tidak tepat, karena kedua hal itu sama-sama tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Apalagi sikap DPR dan Pemerintah pun sudah tegas, akan melarang perilaku kumpul kebo sebagaimana dalam Pasal 418 ayat (1) Rancangan KUHP," tegas HNW.

Karenanya, menurut HNW, agar masalah ini tidak makin banyak menimbulkan korban dan keresahan masyarakat tak makin meluas maka ketentuan pelarangan itu harusnya segera dibahas dan disahkan oleh DPR dan Pemerintah. ❑

Data Keluarga Miskin Tidak Update

Hambat Migrasi Siaran Analog ke Digital

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, mempertanyakan soal data keluarga miskin yang tidak update, karena akan mempersulit pengalihan dari televisi analog ke televisi digital.

WAKIL Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mempertanyakan data keluarga miskin yang akan menjadi penerima bantuan perangkat Set Top Box (STB) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pasalnya, data keluarga miskin tersebut masih belum update sehingga menyebabkan penyaluran bantuan tidak optimal.

Memang, data keluarga miskin yang tidak update akan mempersulit penyelesaian penghentian siaran televisi analog (Analog Switch Off) yang dilakukan Kementerian Kominfo. Informasi ini didapatkan dari Rapat Panja dengan Dirut Media Group, SCM Group, MNC Group, Transmedia Group, dan Viva Group di Ruang Komisi I pada Kamis, (23/6/2022).

Penghentian siaran televisi analog (Analog Switch Off) yang dilakukan Kementerian Kominfo merupakan langkah awal dari proses migrasi dari TV Analog ke TV Digital. Penghentian siaran TV analog sebagai upaya digitalisasi penyiaran menuju penyiaran yang lebih canggih lagi dan tidak ketinggalan zaman.

Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat ini melanjutkan, masyarakat miskin belum banyak menerima bantuan perangkat STB. "Masyarakat miskin yang menjadi penerima perangkat STB masih sangat rendah. Bahkan, dari data menunjukkan bahwa baru 16% masyarakat miskin yang menerima perangkat STB tersebut," ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan menilai, target migrasi siaran analog ke siaran digital tidak akan sesuai target Pemerintah. "Melihat kondisi hari ini di mana masyarakat miskin masih sedikit yang menerima perangkat STB, target migrasi dari Kementerian Kominfo pada 2 November 2022 akan sangat sulit tercapai," katanya.

Menurut Syarief Hasan, masyarakat miskin yang akan menjadi korban jika program ini tidak optimal. "Jika program televisi analog ini dihentikan pada November 2022 saat masyarakat miskin belum menerima program bantuan perangkat STB maka masyarakat yang jadi korban karena tidak bisa menikmati layarkaca digital," ujar Syarief Hasan.

Politisi senior Partai Demokrat ini menegaskan, program penghentian siaran analog ini lebih baik ditunda jika penyaluran perangkat STB belum tuntas. "Program penghentian siaran analog lebih baik dievaluasi karena masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapat perangkat STB sehingga dapat merugikan masyarakat miskin," tutup Syarief Hasan. ❑

Aspirasi Wapres RI ke-6 Try Sutrisno

Agar Indonesia Memiliki Pola Road Map Pembangunan Jangka Panjang

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno sepakat, apabila tidak memungkinkan melalui amandemen konstitusi, PPHN dapat dihadirkan melalui konsesus nasional.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menerima aspirasi dari Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 sekaligus Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno, agar MPR RI bisa mengkaji ulang amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang telah dilakukan empat kali serta menghadirkan dan menetapkan kembali Garis Besar Haluan Negara/Haluan Negara, atau yang kini dikenal dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Dukungan serupa sebelumnya juga datang dari Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, yang dalam Rakernas PDI Perjuangan Tahun 2022 maupun dalam pengukuhan Gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan pada tahun 2021 lalu menegaskan bahwa MPR RI perlu melakukan amandemen konstitusi agar bisa memiliki kewenangan membuat Haluan Negara sebagai road map pembangunan bangsa.

"Kedua pandangan dari Bapak dan Ibu bangsa tersebut memiliki prinsip yang sama, bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, Indonesia perlu memiliki Haluan Negara. Sehingga siapapun presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan, sudah memiliki gambaran tentang apa yang harus dikerjakan selama lima tahun ke depan. Haluan Negara juga memastikan sebuah pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga memberikan jaminan tidak ada proyek yang mangkrak," ujar Bamsoet usai silaturahim ke kediaman Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 sekaligus Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno, di Jakarta, Jumat (24/6/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno juga sepakat apabila tidak memungkinkan melalui amandemen konstitusi, PPHN dapat dihadirkan melalui konsesus nasional yang dihasilkan oleh partai politik, DPR, DPD, pemerintah serta didukung berbagai elemen masyarakat.

"Saya juga laporkan kepada beliau bahwa MPR RI melalui Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan telah memiliki materi substansi PPHN. Pada 7 Juli nanti secara resmi akan diserahkan oleh Badan Pengkajian MPR RI kepada pimpinan MPR RI. Untuk selanjutnya kita bawa dalam Rapat Gabungan MPR RI, dan diserahkan kepada fraksi dan kelompok DPD serta pimpinan partai politik.

Mengenai bentuk hukum yang ideal terhadap PPHN, Badan Pengkajian telah merumuskannya dalam tiga pilihan; diatur secara langsung melalui konstitusi, diatur melalui Ketetapan MPR RI, atau diatur melalui Undang-Undang. Pilihan mana yang akan

dipilih, kita serahkan sepenuhnya kepada proses musyawarah mufakat di MPR RI," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, kehadiran PPHN tidak lain juga untuk menyempurnakan bangunan ketatanegaraan Indonesia. Yaitu dengan adanya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia NRI Tahun 1945 sebagai haluan konstitusional negara; dan PPHN sebagai kebijakan.dasar pembangunan negara.

"Hadirnya PPHN tidak dimaksudkan untuk memperlemah konsensus dalam penguatan sistem Presidensil. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat (1), tidak akan tergerus sedikitpun peran dan otoritasnya dengan hadirnya PPHN," pungkas Bamsoet. ❑

Webinar Global Aceh…

Agar Perempuan Konsisten Meningkatkan Kontribusinya di Ruang Publik

Perempuan harus mampu keluar dari stereotype yang ada saat ini, sehingga mampu lebih banyak berperan dalam mewujudkan kebijakan publik. Dorongan agar perempuan mampu meningkatkan kontribusinya di ruang-ruang publik harus konsisten dilakukan.

WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyatakan, selama ini perempuan selalu dicitrakan harus menjadi manusia yang sempurna. Untuk meningkatkan perannya dalam setiap kebijakan publik, kata Rerie, sapaan Lestari Moerdijat, perempuan harus berani untuk menjadi tidak sempurna dengan memecahkan tembok kaca stereotype yang mengungkungnya

Rerie menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara kunci dalam webinar bertema: "Diaspora Global Aceh Revisiting Pahlawan Perempuan Aceh dalam Kepemimpinan Perempuan," Sabtu (18/6).

Menurut Lestari, berkorban untuk menjadi manusia yang tidak sempurna dan keluar dari stereotype yang selama ini mengukung kaum perempuan itulah, yang saat ini menjadi tantangan besar agar keterlibatan perempuan di ruang publik bisa ditingkatkan.

Perjuangan perempuan Aceh untuk berkiprah di ruang publik, ujar Rerie, seharusnya bisa lebih baik mengingat peran perempuan Aceh yang mengemuka di masa lalu. Sejarah Nusantara mencatat, tambah Rerie, perempuan telah menjadi bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Apalagi secara khusus perempuan Aceh memiliki kedaulatan dalam kerajaan Islam antara tahun 1641-1699.

Aceh juga memiliki banyak pahlawan perempuan, antara lain Laksamana Malahayati (1550-1615), Tjut Nyak Dien (1848-1908) dan Cut Nyak Meutia (1870-1910). Namun, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, saat ini perempuan di Indonesia masih berjuang untuk mewujudkan peningkatan keterwakilannya di parlemen menjadi 30%.

Berdasarkan data World Bank (2019), ujarnya, Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Data tersebut, menurut Rerie, memperlihatkan partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih terbilang rendah.

Karena itu, tegasnya, berbagai upaya untuk mendorong agar perempuan mampu keluar dari stereotype yang mengukungnya selama ini harus terus diupayakan.

Menurut Rerie, pemberdayaan dari sisi pendidikan dan pengetahuan agar mampu membuka cakrawala berpikir para perempuan dan masyarakat harus konsisten dan masif dilakukan agar tercipta kemandirian yang sangat berguna untuk meningkatkan peran perempuan di ruang-ruang publik. ❑

Kasawan Tana Mori di Labuan Bajo

Akan Dikembangkan Menjadi Kawasan Parawisata Prioritas

Ketua MPR, Bamsoet, mendukung Indonesia Tourism Development Corporatoin (ITDC) mengembangkan Kawasan Wisata Tana Mori di Labuan Bajo, NTT, menjadi kawasan wisata prioritas berstandar Internasional.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung kinerja Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dalam mengembangkan kawasan Tana Mori di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menjadikannya sebagai kawasan wisata prioritas berstandar internasional, guna mendukung kesiapan sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan side event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 tahun 2022, ASEAN Summit pada tahun 2023 maupun event internasional lainnya.

"Selain memasukannya dalam 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Presiden Joko Widodo juga memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada ITDC sebesar Rp 470 miliar melalui APBN 2021, untuk mengembangkan infrastruktur dasar dan utilitas, fasilitas penunjang, serta aset produktif, dalam mengembangkan potensi wisata di kawasan Tana Mori, Labuan Bajo, NTT," ujar Bamsoet usai menerima Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer, di kawasan Black Stone Beach Bali, Sabtu (11/6/22).

Turut hadir antara lain Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC Arie Prasetyo, serta

Managing Director ITDC The Nusa Dua I Gusti Ngurah Ardita.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, ini menjelaskan, melalui PMN diharapkan bisa meningkatkan produk domestik bruto per kapita wilayah Tana Mori, dan menambah potensi penyerapan tenaga kerja dari sektor perhotelan sebesar 2.327 orang. Serta membuka lapangan kerja tidak langsung sebanyak 75.045 lapangan kerja per tahun, dan meningkatkan berbagai usaha kreatif dan UMKM yang terkait dengan perkembangan usaha, baik di dalam maupun di sekitar kawasan Tana Mori.

"Tidak hanya pembangunan hotel, ITDC juga akan membangun fasilitas meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE), hingga Marina. Dalam pembangunannya, ITDC tetap berkomitmen mengedepankan prinsip ekowisata berkelanjutan. Selain menjaga kelestarian alam, juga mengangkat martabat budaya dan nilai-nilai kearifan lokal," jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini mendorong guna mengoptimalkan pengelolaan kawasan pariwisata, ITDC harus terus melakukan berbagai upaya kreatif untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan pengembangan Tana Mori. Misalnya, melalui sinergi antar BUMN, maupun pendanaan ke lembaga pembiayaan dari dalam dan luar negeri.

"Melihat pengalaman ITDC mengembangkan The Nusa Dua di Bali dan The Mandalika di NTB, kita optimistis ITDC mampu mengembangkan Tana Mori di Labuan Bajo NTT agar bisa berkembang menjadi destinasi pariwisata kebanggaan Indonesia. Memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi NTT dan Indonesia," pungkas Bamsoet. ❑

DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia

Tingkat Pendidikan Politik Perempuan

Terus tingkatkan pendidikan politik terhadap perempuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam memengaruhi kebijakan publik.

TUGAS organisasi perempuan saat ini adalah fokus pada gerak dan langkah pada pendidikan politik untuk meningkatkan peran perempuan dalam setiap kebijakan publik," kata Wakil Ketua MPR RI, Koordinator bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat, saat menerima jajaran pengurus Dewan Pengurus Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (DPP KPPI) di rumah dinas Wakil Ketua MPR RI di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/6).

Menurut Lestari, pikiran-pikiran tentang peran perempuan terkait kebijakan publik harus terus disebarluaskan lewat media massa. Sehingga, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya kita untuk menyadarkan para perempuan di tanah air agar memiliki dorongan untuk terjun langsung di bidang politik, dapat terus ditingkatkan.

Saat ini, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perempuan terjun ke politik masih menghadapi banyak kendala. "Ketika kapasitas memadai, tetapi lingkungannya tidak mengizinkan perempuan untuk terjun ke bidang politik. Demikian juga sebaliknya," ujar Rerie.

Dengan kondisi itu, tegas Rerie, perlu banyak langkah dan upaya untuk memperkuat dorongan agar perempuan mampu mengatasi sejumlah kendala yang dihadapinya.

Ketua Presidium DPP KPPI, Kanti W. Janis, berpendapat, mendorong perempuan paham politik tidak hanya bertujuan agar perempuan memahami pembuatan kebijakan publik tetapi juga agar perempuan mampu memengaruhi kebijakan publik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.

Jadi, ujar Kanti, di samping meningkatkan secara kuantitas perempuan berkiprah di bidang politik, kita juga harus mendorong perempuan meningkat secara kualitas dalam memahami politik. ❑

Pelantikan Wakil Ketua MPR RI

H. Yandri Susanto, S.Pt., Menggantikan Dr. (HC). Zulkfli Hasan, SE., MM.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, bersama pimpinan MPR RI menyambut hangat kehadiran Yandri Susanto sebagai Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN menggantikan Zulkifli Hasan yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perdagangan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DENGAN dilantiknya Dr. (HC) Zulkifli Hasan, SE., MM., menjadi Menteri Perdangan dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo,15 Juni 2022, maka posisi Wakil Ketua MPR RI hanya sempat kosong beberapa pekan. Akhir Juni 2022, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengumumkan pengganti Zulkifli Hasan adalah H. Yandri Susanto, S.Pt., seorang politisi lulusan Fakultas Peternakan Universitas Negeri Bengkulu (UNIB). Pelantikan yang ditandai dengan pengucapan Sumpah/ Janji Yandri Susanto sebagai Wakil Ketua MPR RI berlangsung Kamis siang (30/6/2022) di Gedung Nusantara IV, kompleks MPR RI Senayan, Jakarta.

"Kehadiran Yandri membuat komposisi kepemimpinan MPR RI kembali lengkap, sehingga bisa membantu menyukseskan berbagai agenda penting MPR RI, seperti Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2022, Peringatan Hari Konstitusi dirangkai dengan Hari Lahir ke-77 MPR pada 18 Agustus 2022, hinga pembentukan Forum MPR Dunia," ujar Bamsoet dalam acara pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto sekaligus melantik anggota MPR Pernggantian Antar Waktu (PAW) di Kompleks MPR RI, Jakarta, Kamis (30/6/22).

Sidang Tahunan MPR yang dirintis oleh MPR masa kepemimpinan Zulkifli Hasan, lanjut Bamsoet, harus terus terpelihara dengan baik. Dilaksanakan untuk meneguhkan konvensi ketatanegaraan, sesuai

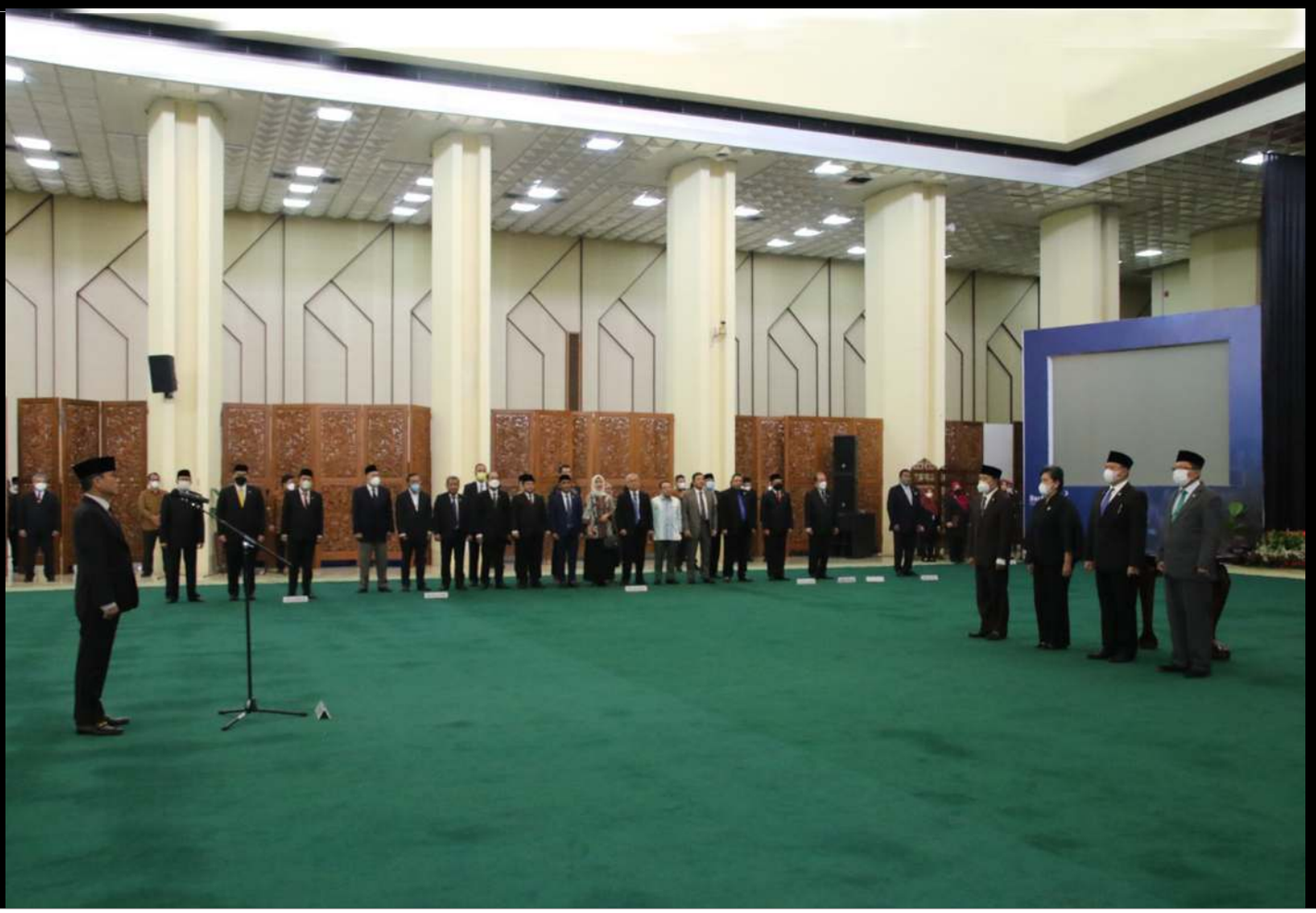

dengan prinsip demokrasi konstitusional, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Adapun anggota MPR RI yang dilantik adalah: Bahtra dan Difriadi dari Fraksi Partai Gerindra, Riswan Tony DK dari Fraksi Partai Golongan Karya, dan Ravindra Airlangga dari Fraksi Partai Golongan Karya.

"Sesuai hasil Rapat Konsultasi Pimpinan MPR dengan berbagai pimpinan lembaga Negara, seperti DPD RI, MA, MK, BPK, dan KY yang dilakukan pada tahun 2020 lalu, disepakati bahwa Sidang Tahunan MPR RI akan memfasilitasi para pimpinan Lembaga Negara menyampaikan laporan kinerjanya selama setahun terakhir kepada rakyat secara langsung. Kita harapkan bisa terealisasi pada Sidang Tahunan MPR RI 2022," ujar Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, peringatan Hari Konstitusi yang merupakan rintisan MPR pada masa kepemimpinan Hidayat Nur Wahid, bukan hanya sebagai kegiatan seremonial semata. Melainkan menjadi tanggungjawab sejarah untuk meneguhkan arah cita-cita Indonesia merdeka.

"Dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penetapan barometer, bagaimana pelaksanaan konstitusi dan capaiannya dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi sebagai hukum dasar merupakan kesepakatan umum warga negara mengenai norma dasar dan aturan

dasar dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan ini utamanya menyangkut tujuan dan cita-cita bersama, landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, tugas penting lain yang sedang dilaksanakan MPR melalui Badan Pengkajian MPR adalah menindaklanjuti rekomendasi MPR masa jabatan 2014-2019, yaitu mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Gagasan ini telah melewati dua periode keanggotaan, yaitu MPR masa jabatan 2009-2014 dan 2014-2019. Karenanya, menjadi kewajiban MPR periode ini untuk menuntaskannya, dengan harapan di akhir masa jabatan tidak merekomendasikan hal serupa kepada MPR masa jabatan berikutnya.

"Badan Pengkajian MPR RI telah memiliki materi substansi PPHN. Berbagai kalangan juga telah memberikan dukungan agar MPR RI kembali diberikan kewenangan menetapkan Haluan Negara. Antara lain datang dari Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden RI ke-6 sekaligus Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, serta berbagai pihak lainnya," pungkas Bamsoet. ❑

Biodata

Nama : **H. Yandri Susanto, S.Pt.**
Fraksi : Partai Amanat Nasional
Dapil : Banten II

Riwayat Pendidikan:
SD Negeri Agung, 1987
SMP Negeri Kedurang, Bengkulu, 1990
SMA Negeri 1 Manna, Bengkulu, 1993
Fakultas Peternakan, Universitas Negeri Bengkulu, 1998

Riwayat Pekerjaan:
2010 - 2012 : Direktur Utama PT. Suplai Plus
2009 - 2014 : Anggota DPR RI
2004 - 2012 : Manager Direktur PT. Solusi Plus
2004 - 2009 : Staf Ahili Anggota DPR RI

Riwayat Organisasi:
2010 - 2015 : Ketua Umum DPP BM PAN
2008 - 2011 : Ketua Bidang Pariwisata DPP KNPI
2006 - 2011 : Sekretaris Jenderal DPP BM PAN
2004 - 2006 : Wakil Sekretaris Jenderal DPP BM PAN

Bamsoet: Jam Terbang Yandri Susanto dalam Politik Sangat Mumpuni

PIMPINAN MPR RI sangat senang menerima kehadiran Mas Yandri. Kita siap bekerjasama menuntaskan berbagai agenda MPR RI. Mas Yandri bukan orang baru di parlemen. Rekam jejaknya selama tiga periode di parlemen sangat bagus. Terbukti dirinya saat ini dipercaya menjabat Ketua Komisi VIII DPR RI," papar Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, saat menerima Yandri Susanto, Selasa (28/6/22), atau dua hari sebelum anggota DPR/MPR dari Dapil Banten II ini dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI menggantikan Zulkifli Hasan yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perdagangan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Lebih lanjut, Bamsoet mengungkapkan, sejumlah rekam jejak selama Yandri Susanto — politisi kelahiran Palak Siring, Bengkulu, 7 November 1974 — ini berkecimpung di dunia politik. "Jam terbangnya dalam politik sangat mumpuni. Antara lain menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PAN (2020–2025), Ketua DPP PAN (2015–2020), Ketua Umum DPP BM PAN (2011–2016), Ketua Bidang Pariwisata KNPI (2008–2011), Sekretaris Jenderal DPP BM PAN (2006–2011), serta Wakil Sekretaris Jenderal DPP BM PAN (2004–2006)," ungkap Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI ini.

Bamsoet lalu memaparkan sejumlah agenda terdekat yang dihadapi MPR RI, yakni

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menyukseskan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2022, yang diselenggarakan di Gedung Nusantara pada 16 Agustus 2022. Sesuai hasil Rapat Konsultasi Pimpinan MPR dengan berbagai pimpinan lembaga Negara, seperti DPD RI, MA, MK, BPK, dan KY yang dilakukan pada tahun 2020 lalu, disepakati bahwa Sidang Tahunan MPR RI rencananya akan memfasilitasi para pimpinan Lembaga Negara menyampaikan secara langsung laporan kinerjanya selama setahun terakhir kepada rakyat.

"Gagasan tersebut sudah dicetuskan sejak lama, namun belum dapat terealisasi karena berbagai hal. Mudah-mudahan pada tahun ini bisa terlaksana. Sehingga bisa mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta mendewasakan pembangunan demokrasi. Sekaligus dijadikan ajang bagi lembaga negara dan kepresidenan untuk unjuk prestasi kepada rakyat," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, HAM, dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain menyukseskan Sidang Tahunan MPR RI, rekam jejak Yandri Susanto sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI dengan lingkup tugas di bidang Agama dan Sosial, akan sangat membantu MPR RI mewujudkan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia (Forum MPR Dunia).

Bamsoet berharap, Forum MPR Dunia, bisa terbentuk pada akhir tahun 2022. Proses pembentukannya akan dilakukan di Gedung Asia-Afrika, Bandung. Mengingat tempat tersebut sangat bersejarah sebagai tempat lahirnya Konferensi Asia Afrika, yang memainkan peranan penting bagi diplomasi internasional Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia.

"Sebagai bentuk organisasi yang tidak permanen, Forum MPR Dunia memiliki peran strategis di kancah global, dengan turut memberikan alternatif solusi, di tengah dinamika global yang sedang bergejolak, dan menawarkan agenda konsolidasi ekonomi antarnegara untuk mencapai kerjasama strategis, dengan komitmen pembangunan inklusif secara global. Menekankan bahwa Islam sebagai rahmat bagi alam semesta akan menjadi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di dunia," pungkasnya. ❑

Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad
Wakil Ketua MPR RI

Menelisik Peluang Keberhasilan Jokowi Mendamaikan Rusia dan Ukraina

KUNJUNGAN Presiden RI Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia menjadi bahan kajian yang menarik. Situasi perang di Ukraina sejak invasi tentara Rusia pada 24 Februari 2022 hingga saat ini masih mengkhawatirkan. Perang sudah memasuki bulan, kelima namun belum ada tanda-tanda akan berakhir.

Lamanya perang tersebut di luar perhitungan sejumlah pihak. Ukraina yang berdasarkan kekuatan militer jauh di bawah Rusia dan diperkirakan akan cepat "dikalahkan", ternyata mampu bertahan dengan pola pertahanan yang dibangunnya. Ukraina memang mendapat dukungan persenjataan dan dana dari negara-negara Barat yang tergabung dalam NATO (termasuk AS di dalamnya), namun Barat tidak bisa ikut berperang langsung. Mereka menghindari berhadapan langsung dengan Rusia agar tidak terjadi perang yang lebih besar.

Ukraina bukan anggota NATO sehingga tidak ada kewajiban bagi NATO mengirimkan pasukan. NATO juga melarang anggotanya ikut campur langsung dalam perang Rusia-Ukraina, dan mengancam akan memberi sanksi berat. Jika NATO memberi bantuan dengan mengirim pasukan, Rusia bisa menyerang anggota NATO dan menimbulkan perang di Eropa yang lebih besar. Begitu juga jika Rusia menyerang negara anggota NATO akan menimbulkan perang Eropa karena balasan NATO.

Skenario ini menunjukkan bahwa perang yang terjadi saat ini hanya akan melibatkan dua pihak, yaitu Ukraina dan Rusia. Ukraina akan dibiarkan sendiri melawan Rusia, sedangkan pihak-pihak yang bersimpati memberikan bantuan berupa pasokan senjata, amunisi, pelatihan militer dan dana tanpa kiriman pasukan.

AS diberitakan mengucurkan bantuan hingga US$ 40 miliar. Inggris memberi bantuan antara lain berupa pelatihan terhadap 20.000 orang Ukraina. Pelatihan juga diberikan oleh AS. Pelatihan tentu membutuhkan waktu dan waktunya berkejar-kejaran dengan makin intensifnya serangan Rusia. Dengan demikian, kemampuan Ukraina yang bisa bertahan hingga sejauh ini diapresiasi banyak pihak, karena kemampuan sendiri.

Apresiasi itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri Ukraina yang mungkin merugikan dari sisi upaya perdamaian. Hal ini tampak dari Ukraina yang dianggap menahan diri untuk berunding dengan Rusia. Apalagi ada sejumlah pihak di Eropa yang menghendaki agar mereka terus mendukung Ukraina untuk memenangkan perang. Menurut Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss, jika Rusia menang, akan menjadi ancaman bagi Eropa sehingga upaya memenangkan Ukraina menjadi penting. Ini sinyal kurang baik bagi upaya perdamaian.

Sementara Rusia menyebutkan bahwa mereka sudah membuka pintu untuk maju ke perundingan. Hanya saja hambatannya, menurut pendapat mereka, terletak pada kemauan Ukraina. "Kami, di pihak kami, siap untuk melanjutkan dialog. Tetapi saya ingin menekankan bahwa bola pembicaraan damai lebih lanjut ada di pengadilan Ukraina. Pembekuan pembicaraan adalah inisiatif sepenuhnya Ukraina," kata asisten Vladimir Putin, Vladimir Medinsky, dalam wawancara dengan stasiun televisi Belarusia, ONT, seperti dikutip Republika.

Kerugian Ekonomi

Berlarutnya perang berdampak pada ekonomi global. Baik Ukraina maupun Rusia merupakan pemasok komoditas ekonomi tertentu yang cukup signifikan. Rusia, misalnya, merupakan pemasok bahan bakar fosil (minyak bumi, gas alam, dan batu bara). Menurut perkiraan European Parliament, pada pertengahan Juni 2022, ekonomi OECD dengan mempertimbangkan rasio ketergantungan seluruh ekonomi negara-negara OECD pada impor dari Rusia untuk tiga bahan bakar fosil (batubara, gas, dan minyak bumi), penghentian tiba-tiba semua impor bahan bakar fosil dari Rusia akan memengaruhi semua sektor ekonomi, terutama sektor penghasil energi, transportasi, mineral, dan manufaktur logam. Dengan tidak mempertimbangkan substitusi sumber energi tersebut dengan sumber energi lain, secara agregat penghentian pasokan energi fosil dari Rusia dapat menyebabkan output sektor manufaktur dan jasa-jasa negara-negara OECD

akan berkurang antara 2,75%-3%. Sekitar setengah dari penurunan output tersebut akan disebabkan oleh kekurangan minyak bumi dan produk minyak bumi, dengan sebagian besar sisanya dari kekurangan gas alam.

Embargo pasokan gas dari Rusia diasumsikan akan menaikkan harga gas global sebesar 50%. Sementara harga gas yang lebih tinggi akan menaikkan harga pupuk hingga 25%. Sedangkan meningkatnya permintaan pasokan energi diperkirakan akan meluas ke pasar minyak, dengan asumsi harga minyak dunia akan naik 10%. Hal ini akan membuat pertumbuhan ekonomi negara-negara OECD terkontraksi hingga lebih dari minus 1,25% pada 2023, sedangkan pertumbuhan ekonomi dunia akan terkontraksi sekitar 0,4% pada tahun depan. Padahal pertumbuhan ekonomi sudah menurun karena pandemi Covid-19 yang sudah lebih dari dua tahun.

Gangguan lainnya terlihat dari pasokan Rusia dan Ukraina ke pasar dunia untuk sejumlah komoditas non bahan bakar fosil. Dalam produk logam, Rusia menyumbang seperempat dari ekspor paladium global pada tahun 2020. Rusia dan Ukraina menyumbang seperempat dari ekspor global besi dan produk setengah jadi baja non-paduan, dan setengah dari ekspor besi kasar dunia.

Gangguan juga akan dialami di sektor pangan. Ada risiko timbulnya krisis pangan dunia. Banyak negara yang memiliki ketergantungan bahan makanan pokok yang tinggi pada Rusia dan Ukraina, yakni gandum. Negara-negara seperti Armenia memiliki ketergantungan impor gandung hingga 99% dari Rusia-Ukraina. Bahkan negara-negara di Timur Tengah dan Afrika pun banyak yang memiliki ketergantungan impor gandum yang tinggi pada kedua negara itu. Sudan mengimpor gandum dari Rusia dan Ukraina mencapai lebih dari 93% dari total impor komoditas tersebut, Lebanon 92,6%, Mesir 86%, Libya 65%, Tunisia 61,7%, Oman 58,3%, Namibia 52,2%, dan Yaman 51%. Jika impor gandum dari Rusia-Ukraina dihentikan, maka mereka akan mengalami kesulitan pangan. Padahal negara-negara tersebut masih berhadapan dengan dampak pandemi Covid-19.

Tentu saja perang juga memengaruhi ekonomi kedua negara yang sedang berperang. Ekonomi Ukraina diperkirakan akan mengalami penurunan pertumbuhan hingga minus 45%. Demikian juga dengan Rusia. Pada April lalu pengamat AS memperkirakan ekonomi Rusia akan terkontraksi hingga minus 15%. Melihat masalah tersebut upaya perdamaian Rusia-Ukraina, selain penting buat kedua negara dari sisi ekonomi, juga penting bagi ekonomi dunia.

Peran Jokowi

Ketika diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri undangan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 pada 26-28 Juni 2022 di Jerman akan melanjutkan kunjungan ke Ukraina dan Rusia dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, banyak yang melihatnya dengan nada minor. Ada pengamat di Indonesia yang menyebutkan, Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk menekan Rusia dan Ukraina agar mereka berdamai. Negara pemrakarsa perdamaian, misalnya AS, umumnya memiliki kekuatan ekonomi atau senjata untuk mengancam kedua belah pihak yang bertikai seperti sanksi ekonomi.

Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Evi Fitriani, seperti dikutip Tempo.co, menyebutkan bahwa Indonesia tidak punya uang dan tak punya senjata untuk memaksa kedua negara berhenti berperang. Namun, menurutnya, ada satu peluang yang bisa diambil, yakni memberikan alasan pada Rusia agar negara itu mau berhenti berperang. Rusia, pada dasarnya ingin juga berhenti perang namun malu jika harus berhenti tanpa alasan yang memadai. Rusia butuh exit strategy yang elegan, dan Indonesia yang bisa berperan sebagai sahabat Rusia akan mampu memberikan exit strategy tanpa Rusia kehilangan muka.

Bagi Indonesia sendiri, jika perdamaian kedua negara tidak tercapai sebelum November 2022 ketika Indonesia menjadi tuan rumah (presidensi) KTT G20 pada 15-16 November 2022 di Bali, maka akan terjadi kerumitan. G20 terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Anggotanya adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

Sebagai salah satu anggota G20, Rusia tetap diundang Indonesia. Keputusan itu sempat mendapat reaksi dari negara-nagara Barat yang memberikan sanksi pada Rusia. Bahkan ada sejumlah negara yang mengancam akan memboikot KTT G20 di Bali jika Rusia diundang, termasuk AS. Lobi Indonesia terhadap negara-negara yang akan memboikut diragukan akan membawa hasil oleh sejumlah pihak di Indonesia.

Saya sendiri melihat, upaya Jokowi yang terus berjuang melakukan lobi ke negara-negara Barat dan mengunjungi Ukraina kemudian ke Rusia merupakan langkah yang berani. Ukraina masih berperang dan keamanan kunjungan Presiden Jokowi membutuhkan perhitungan keamanan yang rinci. Saya mendukung upaya Jokowi mendamaikan Rusia-Ukraina. Apalagi hubungan Indonesia terhadap Ukraina maupun Rusia terus membaik dari waktu ke waktu. Hubungan Indonesia dengan kedua negara itu tidak hanya dalam bidang ekonomi dan politik, tetapi juga budaya.

Banyak pemuda Ukraina yang belajar bahasa Indonesia dan mempelajari perjuangan dan budaya Indonesia. Mereka mengagumi perjuangan Indonesia dari mulai Sumpah Pemuda hingga perjuangan kemerdekaan. Begitupun di Rusia, banyak pemuda-pemuda Rusia yang belajar bahasa dan budaya Indonesia. Ini menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak.

Saya juga melihat, momentum terbaik Indonesia berperan di kancah dunia dalam menciptakan perdamaian dunia ada pada saat ini. Posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 cukup strategis mewakili kepentingan kekuatan dunia karena negara-negara anggota G20 meliputi 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Kemudian Indonesia dalam posisi netral dan kedekatan dengan kedua negara yang sedang bertikai memiliki nilai lebih. Karena itu momentum ini harus diambil. Kita berdoa semoga perjuangan Presiden mendamaikan Rusia-Ukraina bisa berhasil. ❑

Menghitung Harga Tiket Tempat Wisata

Masyarakat dihebohkan dengan rencana kenaikan tarif naik candi Borobudur menjadi Rp 750.000. Meski rencana kenaikan itu ditunda, namun kebijakan itu akan memengaruhi sektor pariwisata di Indonesia. Bagaimana sesungguhnya menentukan harga tiket tempat wisata? Berikut pendapat para wakil rakyat dalam bidangnya.

Zainuddin Maliki, Anggota MPR dari Fraksi PAN

Tiket Mahal Mengurangi Minat Berwisata

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KOMPONEN yang harus dipertimbangkan ketika menaikkan tiket wisata, antara lain analisis perubahan permintaan wisata, faktor keberlanjutan obyek wisata, kapasitas pengunjung, dan berbagai variabel sosial ekonomi lainnya. Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal ini memiliki kewenangan mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan berdasarkan wewenangnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Saat ini, wisata budaya di Indonesia merupakan destinasi paling populer. Fakta menyatakan bahwa wisata budaya menjadi pilihan utama untuk wisatawan mancanegara yang ingin mengetahui kebudayaan dan kesenian, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat dan kehidupan seni budaya. Faktor lainnya, daya tarik wisata atau atraksi, aksesbilitas, tarif, fasilitas, dan informasi merupakan satu paket yang disebut dengan produk wisata yang semuanya harus sesuai dengan permintaan pasar.

Adanya rencana pemerintah untuk menaikkan tiket masuk yang semulanya Rp50.000 menjadi Rp750.000 tentu akan mengurangi minat para wisatawan, terutama wisatawan lokal karena dianggap terlalu mahal dan tidak sesuai dengan daya beli masyarakat pada umumnya.

Tidak ada aturan khusus mengunjungi tempat wisata yang merupakan tempat ibadah agama tertentu. Setiap tempat wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh setiap warga Negara, baik lokal maupun manca negara. UU Kepariwisatawan No. 10 Tahun 2009 sebagaimana tercantum di Pasal 19 ayat 1 butir a, menyebutkan, setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata. Oleh karena itu, Negara harus melindungi hak warga negaranya untuk berwisata.

Adapun mengunjungi obyek wisata cagar budaya yang merupakan tempat ibadah agama tertentu haruslah tetap menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya yang ada sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan. ❑

AWG

Hetifah Sjaifudian, Anggota MPR dari Fraksi Golkar

Banyak Faktor Yang Menentukan Tiket Tempat Wisata

SECARA ideal, tarif masuk tempat wisata ditentukan oleh *willingness to pay* (kemauan wisatawan untuk membayar), *travel cost* (biaya perjalanan dan akomodasi wisatawan untuk mengunjungi tempat tersebut), juga biaya pengelolaan kawasan tersebut. Namun, jika kita berbicara mengenai bangunan bersejarah atau alam yang memiliki kapasitas kunjungan tertentu, maka akan ada pertimbangan lainnya dalam menentukan harga.

Dalam menentukan harga tiket wisata, siapakah yang berhak, pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Tergantung zona wisata tersebut. Ada yang wewenang Pemerintah Desa, Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah Pusat, dan ada juga yang dikelola oleh pengelola wisata/perusahaan.

Dalam beberapa riset ada kalanya harga tiket bisa memengaruhi dan bisa juga tidak memengaruhi tingkat kunjungan. Tergantung konteks lebih luas, mulai dari waktu kenaikan tiket (misal, kalau libur panjang, harga naik

tetap ramai pengunjung), siapa target pasarnya, lokasi dan aksesnya, value/nilai tawar tempat wisata tersebut, promosi, dan lain sebagainya.

UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada pasal 25 dan 26 menyatakan bahwa baik wisatawan maupun pengusaha pariwisata berkewajiban untuk menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Jadi, harus sesuai konteks, misal jika di Pura tidak apa-apa memakai kebaya dan kemben, namun di masjid tidak boleh.

Kita sudah ada UU yang mengatur terkait perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya, yaitu dalam UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pelindungan cagar budaya sebenarnya tidak bertentangan dengan pemanfaatan cagar budaya melalui pariwisata, asal saling memberikan asas kemanfaatan.

Strateginya, tentu setiap destinasi wisata dan cagar budaya berbeda. Namun, yang jelas, bagaimana caranya agar perputaran ekonomi dari pariwisata harus dapat membantu mengelola cagar budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sehingga tercapai *sustainable heritage tourism.* ❑

AWG

Fahira Idris, Anggota MPR dari Keiompok DPD

Tarif Naik Candi Borobudur Diharap Masih Bisa Terjangkau

PENUNDAAN rencana penerapan tarif baru untuk tiket naik Candi Borobudur sebesar Rp750 ribu bagi wisatawan domestik, setelah mendapat respon banyak pihak, diharapkan menghasilkan sebuah kebijakan dan skema baru. Walau Borobudur termasuk dalam lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), tetapi idealnya dapat diakses berbagai kalangan masyarakat, terutama sebagai wahana edukasi dan menanamkan kebanggaan, serta kecintaan terhadap budaya Indonesia.

Kita berharap, ada skema-skema baru tarif naik Candi Borobudur sehingga destinasi wisata budaya dan sejarah kebesaran bangsa ini bisa diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Candi yang ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan dunia pada 1991 ini adalah salah satu medium yang paling efektif untuk menumbuhkan cinta tanah air, terutama

generasi muda akan kebesaran bangsa ini.

Diharapkan harga tiket naik ke Candi Borobudur masih terjangkau, sehingga masyarakat dari seluruh Indonesia dan dari berbagai kalangan berkesempatan menyaksikan maha karya ini. Selain soal tarif, yang juga harus menjadi concern, tidak hanya bagi Pemerintah tetapi juga semua pihak, termasuk masyarakat, adalah kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian candi yang disebut sudah mulai mengalami pelapukan dan keausan batu karena beban kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, berbagai pembatasan, baik itu jumlah pengunjung maupun pembatasan berbagai area candi, yang boleh dilihat atau dinaiki adalah sebuah keniscayaan yang harus diatur agar situs kebanggaan bangsa ini tetap lestari.

Kita semua juga harus menyadari bahwa Candi Borobudur berbeda dengan destinasi wisata lainnya, misalnya destinasi wisata alam seperti pantai, laut atau danau yang lebih leluasa kita diakses. Oleh karena itu, Pemerintah memang harus membuat regulasi yang tegas dan ketat demi kelestarian Candi Borobudur. ❑

AWG

Seminar Pancasila

Basarah Ungkap Masih Ada yang Pertanyakan Hari Lahir Pancasila

Ketika berbicara dalam Seminar Pancasila di Universitas Pertahanan (Unhan), Rabu (29/6/2022), Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah berharap, bangsa Indonesia tidak melupakan amanat pendiri bangsa dalam pemahaman Pancasila.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

WAKIL Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, menyatakan, pihaknya merasa heran karena masih saja ada pihak atau individu yang mendebatkan soal hari lahir Pancasila, padahal Pemerintah sudah menetapkan 1 Juni sebagai Peringatan Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2016. Keppres tersebut melengkapi dokumen kenegaraan Keppres Nomor 18 Tahun 2008 yang menetapkan 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi.

Hal itu disampaikan oleh Basarah, yang kerap dipanggil sebagai "Doktor Pancasila" itu, saat menjadi pembicara dalam Seminar Peringatan Hari Lahir Pancasila di Universitas Pertahanan (Unhan) dengan tema: "Implementasi Pancasila untuk Memperkokoh Nasionalisme dan Bela Negara" pada Civitas Akademika Perguruan Tinggi," Rabu (29/6/2022).

Sebagai pembicara kunci di seminar itu adalah Rektor Unhan Laksdya TNI Prof. Amarulla Octavian, dan narasumber lainnya adalah Guru Besar Unhan Prof. Pribadiyono. Sementara Doktor Geopolitik dan Pertahanan, Hasto Kristiyanto, menjadi moderator acara.

Basarah menjelaskan, Pancasila telah berfungsi sebagai dasar falsafah negara, ideologi negara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan perjanjian luhur para pendiri bangsa serta pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk ini.

"Namun ironinya masih ada saja perdebatan di tengah masyarakat kita soal penepatan kapan hari lahirnya Pancasila," tambah Basarah.

Hal itu bisa dipahami, karena memang jauh sebelum Presiden Jokowi menetapkan hari lahir Pancasila, Pancasila disebut lahir tanggal 18 Agustus 1945. Padahal sudah Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2008 yang menetapkan tanggal 18 Agusutus 1945 sebagai Hari Konstitusi.

Menurut Basarah, argumentasi Pancasila ditetapkan 18 Agustus 1945 adalah karena pada saat itu PPKI menetapkan UUD 1945 dan dalam Pembukaan UUD 1945 sudah terdapat sila-sila Pancasila. Padahal disepakatinya rumusan sila-sila Pancasila tersebut bukanlah kesepakatan pendiri bangsa yang tiba-tiba, tetapi merupakan proses panjang sebelumnya sejak Pidato 1 Juni 1945 Bung Karno di depan sidang BPUPKI, pernah mengalami perkembangan dalam rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan yang diketua Bung Karno, dan barulah mencapai kesepakatan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang juga diketuai oleh Bung Karno.

"Jika Pancasila dipahami proses pembentukannya secara parsial dan tidak utuh menyeluruh maka akan banyak menimbulkan distorsi sejarah Pancasila. Misalkan saja, akan muncul pertanyaan, dari mana kita bisa mengetahui bahwa kelima sila dalam Pembukaan UUD 1945 itu bernama Pancasila? Karena tidak ada satu pun kata Pancasila dalam pembukaan UUD, kita lihat alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat, tidak ada kata Pancasila," ujar Basarah.

"Berikutnya, bagaimana kita dapat memahami filosofi sila-sila Pancasila itu sesuai maksud para pembentuk Pancasila dan para pendiri bangsa? Kalau kita mengacu kelahiran Pancasila hanya pada 18 Agustus 1945 maka resikonya bangsa Indonesia akan memahami nilai-nilai Pancasila tersebut menurut selera masing-masing. Tidak ada panduan dalam memahami falsafah bangsa yang terkandung dalam Pancasila" urai Basarah.

Padahal, lanjutnya, kelima sila Pancasila bukan kalimat mati atau satu ideologi dogmatis seperti komunisme. Demikian juga kalau dimaknai sebagai ideologi terbuka, tapi tidak bersifat bebas ditafsirkan sekehendaknya. Pancasila adalah ideologi yang terbuka dan dinamis, di mana nilai-nilai dapat terus mengikuti perkembangan zaman oleh setiap generasi bangsanya, namun makna falsafah dasarnya harus tetap berpedoman pada maksud pembentuk Pancasila dan para pendiri bangsa.

Contoh penafsiran Pancasila yang bebas adalah seperti ada yang mengatakan bahwa

sila-sila Pancasila membolehkan warga negara Indonesia menjadi atheis. Sementara penafsiran lainnya ada yang menyatakan bahwa agama yang sesuai dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa" pada sila pertama Pancasila hanya Islam saja. Pendapat bebas lainnya menyatakan bahwa roh Pancasila itu adalah NKRI Bersyariah.

"Untuk menjawab perdebatan seperti itu maka pendekatan historis dan hermeneutika sangatlah penting," kata Basarah.

Baginya, pemahaman sejarah Pancasila yang bersumber dari maksud para pendiri bangsa adalah metode dan pedoman bangsa Indonesia dalam memahami makna falsafah yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. "Jadi bukan pemahaman yang dimaksud oleh rezim tertentu, suatu golongan tertentu, atau kelompok tertentu atau individu," tukas Basarah.

Basarah juga menekankan, untuk jadi satu ideologi yang hidup di tengah bangsanya, Pancasila setidak-tidaknya memiliki 3 syarat. Syarat pertama adalah Pancasila harus diyakini rasionalitas kebenarannya.

"Bangsa Indonesia seluruhnya meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila adalah seperangkat nilai-nilai kebenaran. Oleh karenanya nilai-nilai kebenaran itu diyakini dapat mengantarkan rakyat dan bangsa Indonesia sampai pada tujuan bernegaranya," urai Basarah.

Kedua, setelah diyakini, kemudian harus dihayati dan dipahami. Agar bisa mencapainya, tentu harus mempelajari Pancasila seutuhnya sesuai yang dirumuskan dan disepakati oleh pendiri bangsa.

"Kalau Pancasila sudah diyakini rasionalitasnya, bangsa Indonesia mempunyai believe, kepercayaan, memiliki keyakinan dan kemudian dipelajari, dipahami dan dihayati, barulah Pancasila kemudian dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, dengan demikian Pancasila akan menjadi ideologi yang hidup dan bekerja di tengah-tengah masyarakatnya sendiri," beber Basarah yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut. ❑

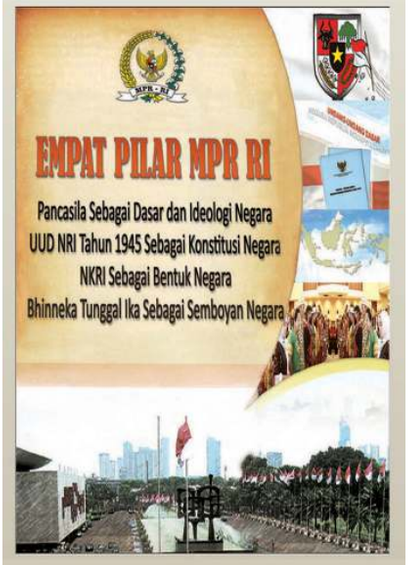

Kunjungan ke Kabupaten Sumedang

Sumedang Model Kabupaten Digital di Indonesia

Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Arsul Sani, SH., M.Si., Pr.M., mengapresiasi pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SETELAH meninjau Command Centre atau Pusat Pengendalian Pemerintahan Daerah berbasis TI, Arsul Sani menilai bahwa Kabupaten Sumedang patut dijadikan model Kabupaten digital di Indonesia. "Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumedang kini selangkah lebih maju. Mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa sudah berbasis digital," demikian disampaikan Arsul saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang pada hari Jum'at, 24 Juni 2022.

Arsul menyatakan, pemerintahan modern di era disruptif ini harus responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. "Sumedang telah memulainya dan melakukan lompatan pemerintahan dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara holistik di setiap jenjang pemerintahan. Indeks SPBE Sumedang tahun 2020 menembus 3,81 atau terbaik di Indonesia," ungkap Arsul.

Ia juga menyaksikan bukan hanya di tingkat kabupaten dan kecamatan, desa-desa di Kabupaten Sumedang sudah memiliki Mini Command Center. Di sana tersaji lengkap data desa sampai tingkat keluarga. "Canggih, para camat dan kepala desa di Sumedang mulai belajar mengambil keputusan berdasarkan data analisis dari big data yang ada di Mini Command Center," terang Arsul.

Untuk tingkat kabupaten tidak usah ditanya, Bupati Sumedang mengeksplor langsung kecanggihan Command Center Kabupaten Sumedang kepada Wakil Ketua MPR-RI yang juga anggota DPR RI Komisi III tersebut. Dari Command Center, Bupati Sumedang melakukan proses pengambilan keputusan berdasarkan big data dalam koridor Sumedang Satu Data. "Good data, good decision, good result. Sumedang satu data menjadi kata kuncinya," timpal Dony Ahmad Munir, Bupati Sumedang saat mendampingi Arsul di Command Center.

Dony menerangkan bahwa teknologi informasi dan big data hanya alat saja. Muaranya adalah kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kita merumuskan dan melaksanakan kebijakan berdasarkan data (evidence based policy), sehingga keputusannya tepat dan hasilnya optimal, yakni membidik langsung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut Arsul mengungkapkan, urgensi melakukan akselerasi reformasi birokrasi, bahkan lompatan birokrasi dengan dibantu teknologi informasi. "Sumedang sudah memberikan praktik baik (best practice) transformasi digital. Ini langkah kongkret reformasi birokrasi. Saya sarankan kepada pihak eksekutif, silahkan kombinasikan dengan praktik masa depan (future practice), jadikan Sumedang model Kabupaten digital di Indonesia. Amati, modifikasi lalu replikasi ke kabupaten/kota lainnya," ucapnya.

Berbagai hal tersebut disampaikan Arsul di sela-sela acara Silaturahim Kebangsaan Bersama Forkopimda dan Jajaran Pemda Kabupaten Sumedang di Aula Tampomas Kompleks Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan tersebut dijelaskan pula berbagai dinamika dan perkembangan penyelenggaraan negara, mulai dari perumusan Pokok-Pokok Haluan Negara, RUU KUHP, Restorative Juctice, serta permasalahan kebangsaan lainnya. ❑

Malioboro
Sejuta Kisah Berawal dan Lahir di Sana

Kawasan wisata Malioboro di Yogyakarta merupakan salah satu tujuan wisata dari sekian banyak objek wisata di Kota Pelajar itu. Selain tersedia berbagai macam oleh-oleh khas Yogya, Jalan Maliboro menyimpan banyak cerita, mulai dari Kesultanan Mataram Islam hingga Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Keunikan Malioboro menjadi inspirasi bagi seniman dan musisi untuk berkarya dan berkreasi.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MELANCONG ke Yogyakarta tanpa mengunjungi Jalan Malioboro, ibarat sayur tanpa garam. Kurang lengkap rasanya. Jalan Malioboro adalah nama salah satu kawasan (jalan) yang membentang dari Tugu Yogyakarta di bagian utara dan perempatan Kantor Pos Yogyakarta di bagian selatan. Jalan ini merupakan poros Garis Imajiner Kraton Yogyakarta. Konon poros garis imajiner ini berada dalam satu garis lurus yang menghubungkan Kraton Yogyakarta – Tugu – Gunung Merapi. Sedangkan yang termasuk ruas Jalan Malioboro dimulai dari palang kereta api Stasiun Tugu hingga Pasar Bringharjo (sisi Timur).

Di sepanjang Jalan Malioboro ini terdapat berbagai macam tentang Yogyakarta, seperti kuliner, bakpia, batik, kaos, baju-baju tradisi Jawa seperti blangkon, lurik, serta berbagai macam cendera mata. Unik dan khas yang ada di Malioboro inilah yang membuat wisatawan "gelap mata" bila berada di sana. Bila tas belanja dan uang melimpah, niscaya barang-barang yang dijajakan oleh pedagang akan diborongnya.

Malioboro mengundang ribuan wisatawan untuk selalu datang ke sana tidak hanya karena ragam oleh-oleh wisata khas Yogyakarta tersedia. Di tempat ini juga menjadi pusat kebudayaan tidak hanya budaya Jawa namun juga budaya nusantara lainnya. Karnaval yang digelar oleh Keraton Yogyakarta pasti melintas di jalan ini. Setiap saat pengamen dengan berbagai jenis musik, seperti musik bambu dari Banyumas atau kadanng grup music siswa Sekolah Musik di Yogya ikut meramaikan suasana malam di sepanjang Jalan Malioboro.

Sebagai tempat yang asyik buat ngopi sambil ngobrol *ngalor-ngidul* membuat Malioboro dijadikan tempat nongkrong bagi para seniman, baik penyair maupun penyanyi. Malioboro bukan sekolah seni namun di sini lahir banyak seniman. Suasana yang ada mampu menginspirasi mereka untuk membuat syair dan lagu tentang kehidupan atau tentang keriuhan di Malioboro.

Pada tahun 1960-an/1970-an di kalangan seniman Yogya ada satu nama yang amat dikenal oleh komunitas seniman Malioboro. Dia adalah Umbu Landu Paranggi. Umbu, pria berambut panjang itu dia biasa dipanggil. Dia

Jalan Malioboro

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

tinggal di kantor Harian Pelopor Yogya, yang terletak di Jalan Malioboro, karena dia memang pengasuh rubrik sastra di koran tersebut. Oleh para calon seniman Malioboro menjulukinya "Presiden" Malioboro. Dari tangannya banyak lahir seniman atau sastrawan, antara lain: Emha Ainun Nadjib, Linus Suryadi AG (alm), Suwarno Pragola Pati (alm), Suparno, S. Eka Ardhana, dan Suparwan Gabat.

Dalam *merdeka.com,* 13 Februari 2022, diceritakan di tahun 1960-an, Malioboro sudah menjadi pusat dan kegiatan komunitas sastra. Para sastrawan itu berasal dari beragam etnis seperti Nasjah Djamin, Motinggo Busye, A. Bastari Asnin, dan Idrus Ismail. Meski beragam etnis, namun mereka paham kultur Jawa. Namanya sastrawan, mereka pun dalam keseharian akrab dengan rakyat yang biasa di emperan toko dan warung-warung di Malioboro. Karya-karya dari para sastrawan itu, seperti kumpulan cerita pendek karya Nasjah Djamin, yang berjudul "Di Bawah Kaki Pak Dirman" dan "Lenganglah Hati di Malioboro".

Meski zaman selalu berkembang, namun di tempat ini transportasi tradisional seperti andong (dokar) dan becak tetap hadir di sana untuk melayani wisatawan jalan-jalan atau merasakan transportasi tradisional yang

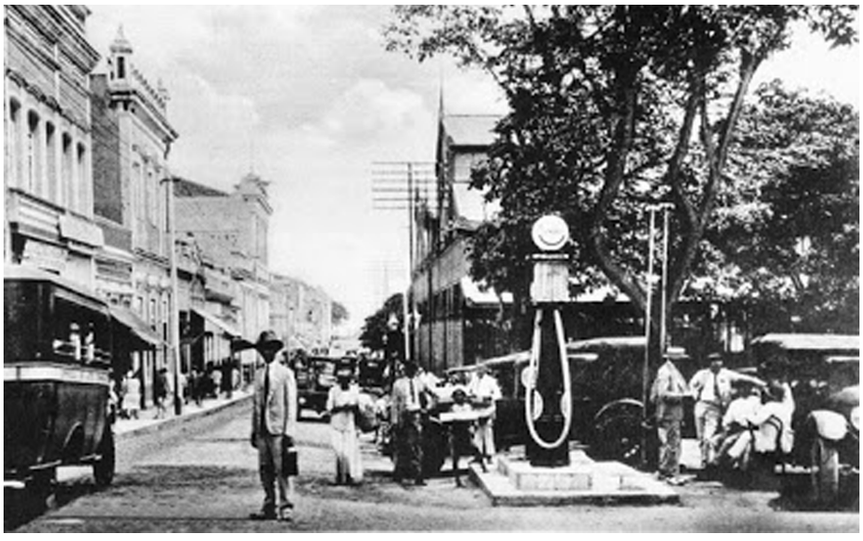

masih bertahan di tengah hadirnya kendaraan modern.

Malioboro hadir sebagai salah satu daya tarik wisata di Yogyakarta bahkan Indonesia tercipta melalui suatu proses yang panjang. Ia merupakan tempat wisata yang berada di jantung kota dan jalur menuju ke pusat kekuasaan Jawa, Keraton Yogyakarta. Menurut catatan sejarah, Jalan Malioboro ini sudah ada sebelum Keraton Yogyakarta didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 13 Maret 1755. Pada masa Kesultanan Mataram Islam yang berkedudukan di Surakarta, jalan itu merupakan laluan yang menghubungkan pasar. Pada masa itu, pasar yang dibangun tahun 1758, merupakan satu-satunya pasar yang besar. Pasar itu disebut dengan nama *Pasar Gedhe*. Pasar tersebut digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Para pedagang pada masa itu menjajakan dagangannya di bawah *payon* (payung) sebagai tempat berlindung dari panas dan hujan. Keberadaan *Pasar Gedhe* menjadi pengungkit awal mula keramaian di sana.

Kekuasaan baru di Yogyakarta dianggap potensial oleh pemerintah kolonial Belanda. Untuk menyaingi berbagai kepentingan kekuasaan Keraton Yogyakarta maka tak

antara Pesanggrahan Gerjitawati (Ayogya). Pesanggrahan itu saat ini menjadi lokasi berdirinya Keraton Yogyakarta.

Sebagai laluan yang vital pada masanya, jalan itu sebagai lintasan berbagai aktivitas masyarakat yang ada meski pada masa itu terbilang masih sepi. Laluan ini menjadi sakral ketika jenazah-jenazah raja dan keluarganya, serta iring-iringannya melintas di sini untuk menuju ke pemakaman para raja di Imogiri, Bantul.

Setelah pusat kekuasaan baru berdiri di Yogyakarta, sang penguasa, Sultan Hamengkubuwono I, membangun berbagai macam infrastruktur untuk melayani masyarakat. Pada masa awal kekuasaannya, didirikanlah jauh dari keraton Belanda membangun pusat pertahanan dan ekonomi. Kali pertama bangunan yang didirikan adalah Benteng Vredeburg, 1790. Kemudian membangun *Dutch Club* atau *Societeit Der Vereneging Djokdjakarta*, 1822. *The Dutch Governor's Residence*, 1830. *De Javasche Bank Djogdjakarta*, tahun 1879. Dan *Post, Telegraaf en Telefoon Kantoor* tahun 1910.

Bangunan-bangunan yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda itu sekarang masih kokoh berdiri. Sekarang menjadi Museum Perjuangan Vredeburg, Istana Presiden, Gedung BI, Gedung BNI 46, dan Kantor Pos. Keberadaan bangunan yang bentuknya besar dengan gaya arsitektur Indis itu, saat ini menjadi *landmark* Malioboro dan Yogyakarta. Gedung-gedung itu saat ini kerap dijadikan objek untuk swafoto, foto, dan membikin video. Alasannya, selain bangunannya sudah jarang ditemukan di Indonesia, juga karena lokasinya berada di kawasan Malioboro. *Instagramable* istilahnya untuk saat ini.

Hadirnya gedung-gedung kokoh itu membuat pihak Keraton Yogyakarta ingin melakukan hal yang sama. Untuk itu, *Pasar Gedhe* ditata ulang, revitalisasi. Pada tahun 1923-1926, bangunan yang lama diganti dengan bangunan yang lebih kokoh, beton. Dan, Sultan Hamengkubuwono VII menamakan nama itu menjadi *Pasar Beringharjo*. Nama itu abadi hingga saat ini.

Sejak dibangun *Pasar Gedhe,* hingga dalam perjalanan waktu, geliat perekonomian di sana tumbuh sangat pesat. Lalu kenapa kawasan itu dinamakan Malioboro? Ada yang menyebut istilah itu berasal dari kata *Marlborough. Marlborough* adalah gelar "1st Duke of Marlborough" yang disematkan kepada Jenderal John Churchill asal Inggris. Dari sumber lain menyebutkan *Marlborough* adalah seorang Inggris yang pernah tinggal di Yogyakarta. Jejak Inggris membekas di sana, sebab negeri itu pernah menduduki Kota Gudeg pada tahun 1811-1816.

Terkait nama-nama Inggris yang akhirnya

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dilafalkan Malioboro itu dibantah oleh Dr. O. W. Tichelaar lewat tulisannya, "The Derivation from Sanskrit of the Streetname Malioboro in Yogyakarta". Dikutip dari jurnal "Dari Jalan Kerajaan Menjadi Jalan Pertokoan Kolonial: Malioboro 1756-1941" karya Siti Mahmudah Nur Fauziah, Tichelaar mengemukakan bahwa Jalan Malioboro tidak pas untuk dinamai seperti gelar seorang jenderal Inggris, yang notabene adalah orang asing di mata masyarakat Jawa (*Kompas.com*, 11/09/2021).

Sejarawan asal Inggris, Peter Carey, sebelum menyimpulkan kata Malioboro, ia lebih dulu menceritakan nama asli kota Yogya adalah Ngayogyakarta. Nama itu terinspirasi dari kitab Ramayana, yaitu *Ayodya.* Orang Jawa menyebutnya *Ngayodya*, sehingga terdengar seperti *Ngayogya*. Di dalam kitab itu disebut ada satu jalan utama yang sangat terkenal. Jalan utama itu merupakan laluan tempat penyambutan raja dan tamu tamunya. Selain sebagai jalan untuk menyambut raja dan tamu juga merupakan jalan penting yang memiliki banyak berkah. Nama yang jalan dalam Kitab Ramayana itu adalah *Malyabhara*. Dalam Bahasa Sansekerta, *Malya* berarti bunga dan *bhara* yang diambil dari kata *bharin* yang artinya mengenakan. Jadi jalan yang mengenakan bunga (jalan yang istimewa).

Nah, maka nama itu diambil untuk menamai jalan yang terletak dekat dengan Keraton Yogyakarta itu. Karena pengaruh pengucapan orang Jawa dimana huruf a dibaca o, maka terdengar jadi Malioboro (*arsipdanperpustakaan.jogjakota.go.id*).

Jalan ini oleh banyak sejarawan tidak hanya dimaknai sebagai tempat tumbuh perkotaan dan perekonomian Yogyakarta, namun juga dikuak makna filosofis yang tersimpan di dalamnya. Dalam sebuah web disebut awalnya jalan ini merupakan laluan yang ditata sebagai sumbu imaginer antara Pantai Selatan (Pantai Parangkusumo) - Keraton Yogyakarta - Gunung Merapi. Ada pula yang menyebut Panggung Krapayak-Keraton-Tugu Golong Gilig (Tugu Pal Putih), memiliki makna filosofis yang dalam, yakni *sangkan paraning dumadi* atau asal dan tujuan hidup.

Siti Mahmudah Nur Fauziah dengan mengutip "Buku Profil Yogyakarta 'City of Philosophy'" karya Umar Priyono dkk., menuliskan dari Panggung Krapayak menuju Keraton Yogyakarta dimaknai sebagai perjalanan manusia, mulai dari kandungan, lahir, beranjak dewasa, menikah, sampai memiliki anak (*sangkaning dumadi*). "Sedangkan dari Tugu Golong Gilig ke arah selatan menggambarkan perjalanan manusia ketika hendak menghadap Sang Khalik (*paraning dumadi*), meninggalkan alam fana (dunia) menuju alam baka (akhirat)".

Jalan ini juga mempunyai arti penting bagi keberadaan bangsa Indonesia. Ketika Yogyakarta duduki kembali oleh Belanda, maka berbagai upaya dilakukan oleh para pejuang untuk merebut kembali Yogyakarta. Untuk itu direncanakanlah peristiwa yang disebut dengan Serangan Umum 1 Maret 1949. Salah satu tujuan serangan itu adalah untuk menunjukkan perlawanan Indonesia kepada Belanda, bahwa pemerintahan Indonesa masih ada.

Untuk merencanakan serangan itu dilakukanlah strategi militer. Salah satu stretegi merebut kembali Yogyakarta adalah dengan membagi-bagi sektor, yakni sektor barat, timur, selatan, dan utara. Sektor barat sendiri strategi penyerangannya hingga batas Malioboro. Sektor ini dipimpin oleh Lektol Soeharto. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Sudah Mapan Tetap Ditata Ulang

Selama ini tak terdengar adanya konflik pedagang di kawasan Jl. Malioboro. Kehidupan di jalan itu terbilang sudah mapan meski demikian pemerintah perlu menata ulang kawasan tersebut. Teras Malioboro menghadirkan titik baru tempat wisata di sana. Banyak harapan dari hadirnya teras itu, namun banyak juga yang kehilangan masa lalu.

MESKI sudah terbilang mapan, namun pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta punya anggapan dan gagasan bahwa Malioboro perlu ditata ulang. Dipandang para pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan di depan toko membuat kepadatan dan keruwetan di sana sehingga mereka perlu direlokasi ke tempat yang telah disediakan.

Mereka yang biasa membuka lapak di depan pertokoan di Jl. Malioboro oleh pemerintah setempat direlokasikan ke tempat baru yang bernama Teras Malioboro. Sebab, mereka yang membuka lapak di sana jumlahnya tidak sedikit maka teras yang disediakan ada dua. Teras Malioboro I berada di Gedung Eks Bioskop Indra, seberang Pasar Beringharjo. Teras Malioboro 2 berada di bekas Gedung Kantor Dinas Pariwisata DIY, sebelah utara Kantor DPRD Yogyakarta.

Relokasi yang telah dilakukan rupanya memberi dampak yang sangat berarti. Jalan yang biasanya ramai dengan keriuhan orang berjalan di emperan toko atau tawar-menawar dengan pedagang di sana tak terlihat lagi. Kesan yang muncul di sana malah ada yang menyebut Malioboro menjadi sepi. Kesan demikian terunggah dalam *merdeka.com*, 3 Februari 2022. Dalam web itu diungkapkan status-status *twitter* dari masyarakat. Ada beberapa *twitt* yang menuliskan Malioboro tidak seperti dulu, *jadi aneh gaada keunikan tersendiri (@callmelevi), aneh ya jadinya. Keunikannya jadi hilang (@nica.alfe), jadi kelihatan sepi ya (@eddysaputra22), kalau baru pertama kali lihat Malioboro tanpa PKL memang terasa aneh, tapi lama-lama akan terbiasa (@avieanto45).*

Tak hanya cuitan dalam web itu. Disiarkan juga ada video yang mempertontonkan lorong-lorong emperan toko yang biasanya dipenuhi oleh pedagang menjadi kosong sehingga terlihat sepi. Terlihat masih ada gerobak-gerobak pedagang yang teronggok di sana.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Penataan ulang Malioboro ini rupanya juga menjadi perhatian Staf Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek Purnawan Andra. Dalam kolom di Detik.Com, 17 Februari 2022, yang berjudul *Malioboro Ilang Kumandhange*? Ia mengatakan, penataan kawasan Malioboro memang tidak bisa menafikan kenyataan bahwa ia menjadi sentra pariwisata unggulan Pemkot Yogyakarta. Hal ini tentu saja berbanding lurus dengan kepentingan kota, seperti pendapatan daerah, produksi-distribusi ekonomi, kesejahteraan masyarakat hingga branding kota di mata khalayak luas, bahkan dunia.

Tapi yang harus digarisbawahi, relokasi PKL yang dilakukan harus tetap dapat menjaga bahkan memaksimalkan identitas kawasan Malioboro sebagai ruang publik. Tanpa kesadaran ini, ia hanya akan menjadi lokasi terpusat tempat bertemunya pedagang dan pembeli.

Padahal Malioboro dengan basis nilai-nilai kultural yang dimilikinya bisa memainkan peran untuk memadukan sistem ekonomi yang dijalankannya dalam orientasi

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kerakyatan dan kesejahteraan. Malioboro bisa merealisasikan sebagai ruang transaksi ekonomi, ruang interaksi sosial, ruang komunikasi, dan ruang hiburan komunal. Malioboro adalah kesadaran terhadap nilai-nilai tradisi, kearifan lokal, multikulturalisme, demokrasi, dan ekonomi kerakyatan.

Jika gagal maka dialektika seluruh insan manusia dan produk budaya yang dihasilkannya tidak terwujud di wajah baru Malioboro yang kian sunyi. Ia akan seperti disebut dalam Jangka Jayabaya (ramalan Prabu Jayabaya) yang ditulis Ranggawarsita tentang zaman kalabendhu (bencana). Digambarkan gunung jugrug segara asat (gunung runtuh dan laut mengering) ditandai oleh kali ilang kedhunge, pasar ilang kumandhange. Sungai hilang palung kedalamannya, karena terjadi sedimentasi dan pendangkalan kualitas hubungan sosial. Pasar hilang gaungnya karena ia bukan lagi wilayah relasi sosial yang menautkan dan menyatukan.

Lalu bagaimana selanjutnya dari Teras Malioboro itu? Hadirnya Teras Malioboro tetap menjadi perhatian bagi wisatawan. Teras Malioboro yang diresmikan oleh Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, 26 Januari 2022, itu memancing masyarakat datang melihat ke sana.

Seorang mahasiswa daerah yang kuliah di Yogyakarta segera bergegas ke Teras Malioboro begitu mendengar tempat itu dibuka. Tiba di sana, dia mengatakan kagum pada bangunan dan penataan yang dibuat. Tata lampu dan lapak-lapak para pedagang diakui sangat bagus sehingga memberi kesan yang menyenangkan dan betah di teras.

Hal yang sama diungkapkan oleh Suwandi. Wisatawan asal Jakarta itu menyebutkan, hadirnya Teras Malioboro memberi kesan tersendiri. Teras yang ada disebut menciptakan spot baru di Malioboro. Dengan hadirnya teras itu lebih memudahkan orang untuk berbelanja. “Menjadi lebih terpusat”, tuturnya. Meski demikian, diakui dia merasakan ada yang hilang dengan suasana yang dulu. Dia berharap, keberadaan Teras Malioboro dijaga dan terus diperhatikan sebab kalau tidak akan membuat pedagang meninggalkan tempat itu dan kembali ke emperan toko. “Hal demikian pastinya nanti akan membuat masalah”, paparnya.

Relokasi pedagang ke Teras Malioboro disyukuri oleh pedagang. Salah seorang pedagang menyebutkan, dengan membuka lapak yang telah disediakan membuat dirinya tak lagi harus buka tutup atau bongkar pasang dagangannya. “Kalau dulu saat pagi buka lapak, saat malam tutup lapak, ada capeknya”, ucapnya.

Tidak bongkar pasang membuat dirinya tidak hanya bisa berhemat tenaga, namun juga akan menambah barang dagangannya dengan tujuan agar apa yang dijajakan lebih bervariasi sehingga pembeli tidak perlu pindah ke lapak lain.

Sebagai tempat yang baru, diakui Teras Malioboro belum banyak orang tahu. Ia menegaskan, keberadaan Teras Malioboro perlu diviralkan. Bila masyarakat sudah tahu di mana Teras Malioboro maka mereka akan berduyun-duyun ke sana. “Bisa jadi banyak orang yang belum tahu tempat ini sehingga mereka bertanya-tanya ke mana para pedagang yang dulu ada”, ujarnya. “Nah di sinilah perlu terus diberitakan tentang Teras Malioboro dan di mana tempatnya”, tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan, pemerintah harus mengatakan bahwa Teras Malioboro merupakan tempat relokasi pedagangan yang sebelumnya berdagang di emperan toko. Hal demikian penting, sebab jangan ada anggapan Teras Malioboro merupakan mal baru dan seperti tempat-tempat belanja lainnya yang dibangun oleh pihak swasta. ❑

AWG/*dari berbagai sumber*

Bau Tak Sedap dari Malioboro

Kawasan Malioboro merupakan kawasan wisata yang terbuka. Semua kalangan bisa jalan-jalan di sana. Tak ada kasta di tempat itu. Hadirnya wisatawan dari berbagai kalangan rupanya dimanfaatkan oleh orang dan kelompok tertentu untuk menguras dompet wisatawan. Dengan praktik yang disebut nuthuk, mereka menaikkan tarif di luar kesepakatan. Untung Pemerintah Kota dan Provinsi DI Yogyakarta segera turun tangan. Ada praktik nuthuk bisa dilaporkan ke Jogja Smart Service.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KAWASAN wisata Malioboro merupakan kawasan yang terbuka. Di sana tidak ada pagar, benteng, atau pembatas. Orang yang masuk ke sana pun tidak dikenakan biaya. Laluan di jantung kota pelajar itu juga merupakan lintasan vital untuk berbagai macam keperluan, tidak hanya wisata namun juga ekonomi, pendidikan, kerja pemerintah dan wakil rakyat.

Hal demikianlah yang membuat orang suka-suka lalu lalang di sana. Keluar masuk ke Jl. Malioboro selama 24 jam tidak ada orang melarang hanya pada masa pandemi Covid-19 dibatasi. Mudahnya masuk ke Malioboro inilah yang membuat beragam orang suka wisata di sana. Mulai dari kalangan rakyat kecil hingga artis film dan sinetron pernah menginjakkan kakinya di tempat ini. Tak ada kasta untuk bisa menikmati Malioboro.

Sebagai tempat wisata yang popular dan selalu dibanjiri wisatawan, terutama pada hari Sabtu, Ahad, libur nasional, hingga pada masa libur sekolah. Di sana banyak tumbuh beragam usaha. Usaha yang disajikan di Malioboro tidak hanya satu jenis atau merk. Lihat saja di kawasan itu, jajanan bakpia tersaji dengan beragam merk. Pun demikian batik. Juga aneka kaos, selain Dagadu, juga ada Dadung, serta merk-merk lainnya.

Transportasi pendukung pun melimpah. Di sepanjang jalan terparkir becak dan andong (dokar). Untuk lebih menjangkau jalan yang lebih jauh lagi ada Trans Yogja. Kepadatan bertambah ketika taxi dan ojek serta mobil *online* hadir.

Sebagai tempat wisata yang ramai, membuat di antara pelaku wisata terjadi rivalitas atau persaingan. Bahkan dimanfaatkan oleh orang-orang yang sering disebut dengan oknum untuk 'menguras' dompet wisatawan dengan cara menaikkan harga yang tak wajar, lebih dari harga yang disepakati. Mereka membohongi wisatawan untuk mendapatkan uang lebih.

Praktik yang disebut *nuthuk* tersebut kerap terdengar dari Malioboro. Pada Mei 2021, viral ada wisatawan yang dimahali saat makan pecel lele. Setelah ia melahap pecel lele dia kaget ketika penjual mengatakan harus membayar Rp 37.000. Dijelaskan oleh

pedagang, seporsi pecel lele dan nasi Rp 27.000 dan tambahan lalapan Rp10.000.

Rp 37.000 bagi konglomerat atau artis tentu tidak ada nilainya, namun sebagai tempat wisata yang berasal dari beragam kalangan, harga itu dirasa *nuthuk,* sebab berdasarkan kesepakatan bersama di antara pedagang, harga yang wajar paket pecel lele Rp 30.000. Paket itu berisi nasi, lele, lalapan, sambal, dan segelas teh.

Cerita *nuthuk* tak hanya pada pecel lele. Baru-baru ini, tepatnya pada April 2022, ada curhatan kesal dari wisatawan selepas jalan-jalan di Maliobro. Dalam curhatan, wisatawan itu sepakat dengan tukang becak keliling Malioboro dengan tarif Rp 20.000. Dalam kayuhan pedal becak, rupanya penggenjot becak tadi membelokkan ke arah yang lain, tidak keliling Malioboro namun ke pusat oleh-oleh seperti bakpia, kaos, atau kerajinan tangan yang lain. Tukang becak melakukan demikian bukan karena kemauannya sendiri, tetapi pratik demikian merupakan kerja sama antara pusat oleh-oleh dengan para tukang becak. Dalam pratiknya tukang becak akan diberi uang bila mampu membawa wisatawan ke tempat penjualan oleh-olehnya.

Bagi tukang becak tentu hal demikian bisa menambah untung. Selain dapat uang dari wisatawan, dia juga mendapat tambahan uang dari pusat oleh-oleh yang dituju. Namun, cara seperti itu tidak membuat semua wisatawan senang, sebab target tujuan

Heroe Poerwadi

wisata bergeser dan tidak sesuai dengan rencana jalan-jalannya di Yogyakarta.

Wisatawan di atas termasuk salah satunya yang menolak cara tidak sehat dari tukang becak itu. Ia tetap tidak mau dibawa ke pusat oleh-oleh. Bisa jadi tukang becak menuruti kemauan wisatawan sehingga setelah melewati penggalan-penggalan jalan yang dilalui, ia diturunkan di penginapan. Rupanya masalah belum selesai. Si tukang becak tadi menarik tarif menjadi Rp 80.000. Kaget? Pasti, sebab perjanjian di awal hanya Rp 20.000.

Terkait masalah *nuthuk*, Camat Danurejan Kota Yogyakarta, Bambang Endro, mengatakan, kasus PKL *nuthuk* diduga kuat bukan di Jalan Malioboro, melainkan di Jalan Perwakilan. Dirinya menyatakan, sudah mengecek ke lapangan dan ternyata (dugaan kuatnya) warung lesehan yang viral itu bukan PKL Malioboro, *travel.tempo.co*, 28 Mei 2021.

Bambang dalam laman itu menjelaskan ada perbedaan antara lesehan PKL Malioboro dan usaha rumah makan dan restoran. PKL berjualan di trotoar dengan tenda tidak permanen yang bisa dibongkar pasang. Sedangkan dalam video viral, tampak latar belakangnya berupa bangunan permanen, seperti di kios rumah makan.

Wakil Wali Kota Yogjakarta, Heroe Poerwadi, sudah menindaklanjuti mengenai becak yang meminta tarif Rp 80.000. Dalam *detik.com*, 18 April 2022, dia sudah memanggil kelompok pengemudi becak Malioboro yang diduga melakukan tindakan *nuthuk*. Setelah dipanggil kelompok becak itu berjanji tak akan mengulangi hal itu lagi. Heroe menyebut, jika masih kedapatan melakukan praktik *nuthuk*, yang bersangkutan akan dikeluarkan dari kawasan Malioboro bahkan selamanya tidak boleh beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta.

Untuk mengatasi masalah demikian, Pemkot Yogyakarta telah membentuk tim terpadu yang terdiri dari gabungan beberapa OPD untuk merespons cepat atas keluhan wisatawan. Dari tim yang ada pemkot secepatnya menindak begitu ada laporan, keluhan atau pelayanan yang merugikan wisatawan. Pemkot menyediakan aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS). Di aplikasi itu wisatawan yang menjadi korban praktik *nuthuk* bisa melaporkan kejadian yang dialaminya.

Masalah ini juga didengar oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sultan meminta kepada para pedagang kuliner di Malioboro menyertakan lembaran daftar makanan. Dengan cara seperti itu selain bisa memilih aneka menu, juga melihat daftar harganya. Cara seperti itu diyakini bisa mencegah praktik *nuthuk*. “Tidak ada alasan lagi kita (pedagang kuliner) ini tidak menyediakan daftar harga itu”, ujar Sri Sultan dalam suatu media online. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Soenarto Sardiatmadja
DPP Persaudaraan Cinta Tanah Air

Pancasila adalah Identitas Kita

DALAM perjalanan sejarah bangsa, Pancasila memang telah membuktikan ketangguhannya menyatukan bangsa ini dan menghalau segala kendala dan hambatan negara Indonesia untuk berkembang.

Saya merasa Pancasila saat ini memang harus lebih banyak diperkenalkan lagi kepada anak-anak bangsa, terutama anak-anak sekolah. Sebab, di usia inilah jika pemahaman Pancasila bagus maka karakter dan sifat mereka akan baik sesuai pengamalan Pancasila.

Buku-buku tentang Pancasila, terutama bagaimana pengamalannya di tengah masyarakat sangat dibutuhkan, seperti buku karya anggota MPR dari Kelompok DPD Jimly Asshiddiqie dengan judul 'Pancasila: Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara'.

Buku-buku itu bisa menjadi sumber inspirasi dan wawasan anak bangsa agar pemahaman dan kecintaan kepada tanah airnya semakin tebal. Kecintaan kepada tanah air ini akan semakin menguatkan kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan.

Saya berharap, karya-karya tentang kebangsaan semakin sering dilahirkan sebagai pengingat bahwa kita memiliki bansga yang hebat dan tidak kalah dengan bangsa lain di dunia. ❑

DER

Dr. Bagus P Mulyadi
Dosen University of Nottingham

Kerjasama Antar kampus Indonesia dan UK harus ditingkatkan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PERGURUAN tinggi atau kampus di negara manapun pasti berkutat di bidang riset berbagai bidang ilmu pengetahuan yang bermanfaat, bukan hanya untuk kalangan kampus itu sendiri, namun juga bermanfaat untuk seluruh kehidupan manusia.

Demikian juga apa yang menjadi concern kami, para ilmuwan dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dunia, yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), University of Nottingham United Kingdom (UoN-UK), University of Warwick dean Coventry University yang tergabung dalam konsorsium UK-Indonesia Consortium for Interdisciplinary (UKICIS).

Kami melakukan kegiatan riset kolaboratif teknologi bersama, terutama seputar teknologi Energi Baru Terbarukan (EBT). Kerjasama riset yang konsorsium lakukan ini sangat penting untuk keberlangsungan energi dunia.

UKICIS memperjuangkan Diplomasi Sains, memperkuat hubungan bilateral antara Inggris dan Indonesia melalui kolaborasi ilmiah.

Kami juga sedang menjajaki beberapa perguruan tinggi di timur Indonesia, seperti Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar untuk masuk dalam konsorsium riset bersama ini. Dan, bersyukur dukungan untuk kegiatan ilmiah ini mendapatkan banyak dukungan bahkan bantuan, kami sangat apresiasi hal itu. Dan, berharap kegiatan ini akan berdampak bagus untuk dua negara. ❑

DER

Zuhdi Zainuddin, ST.

Pencari Sisa Jejak Kehidupan di Atas Awan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MENDAKI gunung adalah hobi yang memiliki risiko cukup besar. Setiap saat, para pendaki gunung bisa menghadapi tantangan alam yang datang dengan tiba-tiba. Seperti, hujan lebat, badai, petir, hingga cuaca dingin ekstrim. Meski begitu, jumlah para pendaki gunung tak kunjung berkurang. Bahkan, setiap tahun muncul para pendaki yunior yang ranum pengetahuan serta pengalaman.

Para pendaki yunior ini berpotensi besar melakukan kesalahan sehingga rawan mengalami kecelakaan. Apalagi, jika kegiatan mereka menaklukkan gunung tidak disertai pendaki senior sebagai mentor. Mereka juga kerap melakukan kegiatan yang tidak semestinya sehingga membahayakan diri sendiri serta orang lain. Karena itu, keberadaan tim rescue bagi para pendaki gunung sangat diperlukan. Khususnya jika terjadi kecelakaan yang dialami para pendaki.

Di antara banyak relawan rescue yang sering memberikan pertolongan kepada para korban di puncak gunung, salah seorang di antaranya adalah Zuhdi Zainuddin, ST., (51). Zuhdi adalah mantan mahasiswa pecinta alam Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang (Argajaladri). Di kalangan pendaki Unisula Zuhdi yang akrab disapa Zai atau Lekdin adalah sosok yang dituakan. Zuhdi sudah menaklukkan hampir seluruh gunung di Indonesia.

Sudah puluhan kali, ia melakukan pendakian. Dan, itu membuatnya memahami seluk beluk berbagai gunung di Indonesia. Termasuk sifat alam pegunungan. Karena itu, ia juga kerap diminta memandu para pendaki pemula untuk menaklukkan gunung-gunung di Indonesia.

Tidak itu saja. Lantaran pemahamannya terhadap sifat-sifat gunung di Indonesia relatif baik, pria kelahiran Semarang, 20 Mei 1971, ini kerap ikut serta dalam kegiatan rescue terhadap para pendaki yang tersesat. Dan, itu dilakukan secara suka rela dan dengan sukacita.

"Lumayan sering juga terlibat dalam pencarian para pendaki yang hilang. Karena bagi saya membantu mencari pendaki yang hilang itu adalah panggilan hati nurani. Saya berfikir, sesama pendaki saling membutuhkan satu sama lain. Hari ini bisa orang lain, tapi di lain waktu mungkin teman atau saudara kita yang membutuhkan pertolongan, karena itu saya melakukannya dengan sukacita dan sukarela," kata Zuhdi kepada Majalah *Majelis* MPR RI beberapa waktu lalu

Untuk melakukan kegiatan rescue, seorang pendaki, menurut Zuhdi, semestinya melakukan berbagai kesiapan. Tetapi, tidak jarang mereka harus berangkat secara mendadak, berkejaran dengan waktu agar pendaki yang tersesat bisa ditemukan dalam kondisi selamat.

Kisah tersebut salah satunya terjadi di Gunung Semeru. Saat itu Zuhdi yang karab disapa Zai atau Lekdin dihubungi temannya. Ia mengabarkan bahwa salah satu saudaranya hilang. Zuhdi yang berada di Semarang diminta segera berangkat ke Jawa Timur. Tanpa fikir panjang bungsu lima bersaudara pasangan (alm) H. Abdul Hamid dan Rochany Joesoef itu mengiyakan. Setelah tiga hari ikut mencari, Zuhdi menemukan korban sudah dalam kondisi tak bernyawa.

"Tempat ditemukannya jenazah itu sudah kita jelajahi selama tiga hari, tapi tidak ditemukan tanda-tanda, dan hari itu korban malah ditemukan di sana," kata Zai lagi.

Kisah lain terjadi saat dia mendapat panggilan rescue, tetapi tidak memiliki cukup uang. Bahkan uang yang dimiliki hanya cukup untuk berangkat. Tetapi, karena tenaganya diperlukan, Zai tetap berangkat. Tidak memikirkan risiko lain, kecuali ia harus cepat sampai dan segera menemukan korban yang dinyatakan hilang.

"Kalau ada panggilan rescue pokoknya jalan. Bagaimana nanti di sana itu urusan

belakang. Yang penting punya uang untuk berangkat, termasuk saat kami berangkat ke Aceh membantu warga yang terkena imbas tsunami" kata Zuhdi lagi.

Alam Gaib

Kini, Zuhdi memang tidak semuda dahulu. Kemampuan fisik dan tenaganya jauh berkurang. Urusan keluarga juga kerap membatasi kegiatannya mendaki gunung dan ikut dalam aksi rescue.

Tetapi, sehari-hari kegiatannya tidak bisa jauh-jauh dari pecinta alam. Ia masih kerap diundang untuk memberikan materi seputar dunia panjat gunung. Atau sekedar dimintai pendapat, untuk ikut urun rembug memecahkan persoalan pendakian.

Namun, karena kecintaannya terhadap alam terbuka begitu kuat, Zuhdi pun tak bisa jauh-jauh dari hobinya itu. Bahkan, ia telah menggantungkan hidupnya terhadap alam terbuka. Seperti, menjadi konsultan pembangunan wahana wisata alam, juga menyediakan perlengkapan pendakian (Adventure Corner).

"Saya sarjana teknik, dan suka memilih jenis pekerjaan yang ada di alam terbuka. Seperti menjadi konsultan pembagunan wahana wisata alam terbuka yang penuh risiko dan tantangan," kata Lekdin lagi.

Zai sendiri mengenal dunia mendaki gunung sejak SLTA. Tetapi, baru saat kuliah atau tahun 1990 kesenangan itu dilakukan lebih intensif. Terlebih setelah ia turut mendirikan dan bergabung dalam mahasiswa pecinta alam Universitas Sultan Agung Semarang (Argajaladri). Sejak saat itu satu persatu gunung di Indonesia ia taklukkan.

Banyak pengalaman yang dia peroleh setelah puluhan tahun menekuni dunia mendaki gunung. Bukan hanya yang nampak fisik, tetapi juga yang tidak nampak.

"Cerita tentang alam gaib di dalam hutan itu semuanya benar-benar ada dan itu saya alami. Pernah satu ketika saya mendaki, tetapi berkali-kali saya rasakan daerah yang saya lewati itu-itu saja, dan akhirnya kita tersadar sudah tersesat," kata mantan anggota mahasiswa Pecinta Alam Teknik Sipil (Mapateksi), Unisuka Semarang, lagi.

Karena itu Zuhdi mengimbau kepada para pendaki agar selalu berhati-hari saat melakukan pendakian. Sebaiknya, pendakian dilakukan saat siang. Karena mendaki gunung pada malam hari lebih berisiko dan memiliki banyak keterbatasan.

"Usahakan tidak melakukan pendakian pada malam hari, kecuali sifatnya darurat. Mendakilah pada siang hari, saat jarak pandang cukup jauh, kondisi fisik tidak capek dan ngantuk, serta cuaca juga baik," kata Zai.

Himbauan itu ia sampaikan, karena dia juga pernah menjumpai keadaan yang berbahaya. Saat itu ia mendapat tugas menaklukkan gunung Rinjani. Tetapi saat ekspedisi dilakukan, ternyata berbarengan dengan musim badai, dan itu memberikan ancaman yang sangat berat.

Mereka salah memperkirakan, ternyata saat itu musim badai. Bahkan, para pendaki di Lombok juga melarang untuk melanjutkan misi. Tetapi Zuhdi sudah terlanjur sampai di NTB, sehingga misi harus tetap berjalan.

Karuan saja, saat pendakian dilakukan banyak sekali halangan yang ditemui. Bukan hanya badai yang sangat besar, tapi juga hujan lebat. Beruntung ekspedisi bisa diselesaikan, meski harus bersusah payah. ❑

MBO

Sosialisasi Empat Pilar Bersama ILUNI UI

Lestari Moerdijat Ajak Alumni UI Jaga Nilai-Nilai Kebangsaan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN anggota Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), mahasiswa UI, akademisi, serta pejabat rektorat UI, pada Sabtu (11/6/2022), memenuhi Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/ DPR Senayan, Jakarta. Mereka datang dari berbagai wilayah sejak pukul 07.00 WIB untuk mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau Empat Pilar MPR.

Di antara keluarga besar UI yang hadir dalam sosialisasi dengan tema 'Reinvensi Keindonesiaan Kita, Kepemimpinan Keindonesiaan dan Patriotisme Dalam Indonesia Pasca Pandemi' itu adalah Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Anggota MPR/DPR sekaligus Sekjen PAN Eddy Soeparno, Wakil Menteri Desa PDT Budi Arie Setiadi, dan Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian.

Lestari Moerdijat dalam sambutan menyatakan bangga dan senang bisa berkumpul dengan rekan-rekannya di ILUNI UI. "Saya merupakan alumni UI", ujarnya. Lebih lanjut politisi Partai Nasdem itu mengungkapkan, sosialiasi yang digelar pada pagi itu bentuk kerja sama antara ILUNI UI dengan MPR untuk mengingatkan kembali nilai-nilai kebangsaan. "Kerja sama yang dilakukan merupakan langkah yang tepat, sebab kegiatan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab MPR.

Perempuan yang akrab disapa Mbak Rerie itu menuturkan, pesan yang ingin disampaikan dalam kegiatan itu adalah bahwa ILUNI UI dan UI merupakan rumah besar untuk semua. Dikatakan, dari UI lahir berbagai tokoh. Mereka ada di berbagai lini kehidupan masyarakat. Banyak tokoh lahir dari kampus yang beralamat di Depok dan Salemba Jakarta itu. "Alumni UI tersebar di berbagai partai politik", tuturnya.

Kepada wartawan, Lestari Moerdijat menuturkan, bangsa Indonesia telah berhasil melewati masa-masa yang sulit di masa pandemi Covid-19. Hal demikian, menurutnya, berkat kerja keras dari semua pihak. Setelah masa pandemi, bangsa ini akan memasuki tahun politik. Di masa kini dan akan datang, dia mengajak keluarga besar UI untuk ikut mengambil peran agar proses yang ada bisa menuju titik yang betul-betul menuju ke arah Indonesia yang dicita-citakan. Polarisasi politik yang tajam di pemilu sebelumnya diharap tidak terjadi lagi. "ILUNI UI mempunyai tanggung jawab dan mengambil peran dalam proses politik dan kebangsaan", ujarnya.

Lestari menegaskan, ILUNI UI harus mampu mendudukkan atau mengembalikan semua politik dan kebangsaan dengan berdasarkan

pada nilai-nilai dasar atau pondasi kebangsaan apapun garis politiknya. Sebab polarisasi yang terjadi pada pemilu sebelumnya juga terjadi di kampus. "Nah di ILUNI UI yang beragam garis politik harus mampu memberi contoh untuk itu", ujarnya. Beragam pikiran yang ada disatukan dalam ILUNI UI. "Semua dilakukan untuk membangun Indonesia dengan landasan nilai-nilai kebangsaan", ujarnya. Lewat ILUNI UI itulah, menurutnya, cita-cita itu bisa diperjuangkan.

Lestari Moerdijat mengatakan, sosialisasi yang melibatkan perguruan tinggi dan alumninya tidak hanya dengan ILUNI UI dan UI. "MPR terbuka melakukan sosialisasi dengan berbagai perguruan tinggi dan alumninya", ujarnya. "Saya kerap datang di berbagai kampus yang ada di Indonesia", tambahnya. Karena, memang, MPR tidak menutup pintu bagi perguruan tinggi dan alumni lainnya.

Andre Rahadian dalam kesempatan itu mengatakan, sosialisasi Empat Pilar MPR RI merupakan momen untuk menyegarkan kembali ingatan kita kepada nilai-nilai kebangsaan. Dia sepakat dengan Lestari Moerdijat bahwa keragaman yang ada tidak harus menimbulkan perpecahan, namun harus mampu menghadirkan kerja sama hingga menyukseskan pembangunan. Dia berharap, program kerja sama sosialisasi itu bisa dilanjutkan. ❑

MUI Jakarta Selatan

HNW Ajak Ulama dan MUI Jaksel Mengawal Pancasila

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA., mengingatkan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Selatan tentang peran besar ulama dalam mendirikan bangsa dan menyepakati Pancasila. Pada kesempatan itu, Hidayat juga mengajak MUI Jaksel bekerja sama berkolaborasi mengawal pengamalan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD NRI Tahun 1945.

Ajakan tersebut disampaikan Hidayat Nur Wahid di depan ratusan ulama dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI diselenggarakan oleh MPR bekerja sama dengan MUI Jaksel di Jakarta, Kamis (16/7/2022).

"Kehadiran Saya di sini bukan untuk menggarami air laut. Karena, para ulama tentu sudah sangat paham mengenai Empat Pilar MPR RI, yakni: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Para ulama berperan besar dalam membentuk, menjaga, dan menyelamatkan pilar-pilar berbangsa tersebut," ujarnya.

HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, mengaku, perlu mengingatkan kembali dan mengajak para ulama untuk bersama-sama mengawal kesepakatan para pendiri bangsa dari segala bentuk penyimpangan yang sudah terjadi di sepanjang sejarah NKRI. "Ini merupakan lanjutan dari peran ulama di masa lalu yang telah berjuang di BPUPKI, Panitia Sembilan, PPKI. Para ulama itu berasal dari beragam latar belakang, baik organisasi kemasyarakatan Islam maupun organisasi politik Islam," tukasnya.

Para ulama, kata HNW, bersama para tokoh bangsa lainnya dari lintas organisasi dan agama aktif memperjuangkan Indonesia merdeka. Mereka menyepakati Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Serta menjadikan dan mengembalikan NKRI sebagai bentuk negara.

Menurut HNW, bukan hanya melalui pengajian dan khutbah, para ulama juga telah menunjukkan perjuangan turun langsung ke medan juang. "Seperti Fatwa Jihad dari KH. Hasyim Asy'ari (Nahdlatul Ulama) dan Amanat Jihad dari Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah) untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia," tukasnya.

Selain itu, ada pula terobosan M. Natsir yang mampu merealisir cita-cita Indonesia Merdeka agar menjadi NKRI. Melalui Mosi Integral-nya berhasil mengembalikan NKRI sebagai bentuk Negara, setelah Indonesia dipecah belah oleh Belanda menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat). Ini perlu selalu diingat bersama, terutama di kalangan para ulama, bahwa peran ulama dan umat untuk negara ini sangatlah banyak dan nyata. Sehingga warisan dan hasil perjuangan mereka perlu dilanjutkan dengan terus mengawal agar tak terjadi penyimpangan dari cita-cita Indonesia Merdeka.

Oleh karena itu, HNW mengajak para ulama untuk semakin memahami Empat Pilar MPR RI agar bersama dengan komponen bangsa yang lain dapat mengawal pengamalannya, dan mengoreksi bila ada penyimpangan dari Empat Pilar tersebut. "Seperti dilakukan para ulama terdahulu, bersama TNI dan masyarakat, menyelamatkan Indonesia dari pemberontakan PKI pada tahun 1948 dan tahun 1965. Juga sekarang ketika bangsa dan negara menjumpai tantangan baru di era reformasi, globalisasi, dan pasca Covid-19, agar warisan perjuangan para ulama bersama tokoh bangsa tersebut dapat diwariskan dengan baik dan benar kepada Generasi Z, hingga peringatan 100 tahun Indonesia merdeka dan seterusnya," tukasnya.

Lebih lanjut, HNW mengatakan, sosialisasi ini dilakukan secara dua arah. "Tujuannya agar kami yang berada di MPR RI mendapat nasihat dan masukan dari ulama, sehingga kita bisa bersama-sama mengawal pengamalan Pancasila, NKRI, UUD NRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar cita-cita Proklamasi dan Reformasi terselamatkan, dan dijauhkan dari segala bentuk penyimpangan," pungkasnya. ❑

MBO

Terima Puteri Otonomi Indonesia 2022

Bamsoet Ajak Serukan Pesan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi peran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di bawah koordinasi Direktur Eksekutif Sarman Simanjorang yang sukses menyelenggarakan pemilihan Puteri Otonomi Indonesia 2022. Selain melahirkan Gresita Fenny Yohana Siahaan dari Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Juara I, juga turut melahirkan Nur Latifah dari Kabupaten Deli Serdang yang terpilih menjadi Duta Empat Pilar Kebangsaan.

Para finalis Puteri Otonomi Indonesia 2022, khususnya Duta Empat Pilar Kebangsaan, akan menjadi partner MPR RI dalam memasifkan pemberian vaksin ideologi berupa sosialisasi Empat Pilar MPR RI ke berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Sehingga mampu menangkal masuknya ideologi lain, seperti radikalisme, ekstrimisme, hingga intoleransi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Khusus untuk Juara I Puteri Otonomi Indonesia 2022, saya berikan apresiasi satu unit sepeda motor listrik Bike Smart Elektrik (BS Elektrik). Sebagai dukungan terhadap ajang Puteri Otonomi Indonesia 2022, karena selain menyuarakan pesan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, juga turut mengampanyekan pelestarian lingkungan hidup, yang salah satunya bisa dilakukan dengan percepatan migrasi kendaraan dari berbahan bakar minyak ke bermotor listrik," ujar Bamsoet usai menerima para finalis Puteri Otonomi Indonesia 2022, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Senin (20/6/22).

Para finalis Puteri Otonomi Indonesia 2022 yang hadir, antara lain: Juara I Gresita Fenny Yohana Siahaan, Runner Up 1 Faradissa Djasmine Anderson, Runner Up II Safira Hasna Nada, dan Runner Up III Shafira Zahrah Nabilla. Hadir pula para finalis Puteri Otonomi Indonesia 2022 yang menjadi duta di berbagai bidang, antara lain Duta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Widyah Agustivany, Duta Investasi Rizqita Cahyani Mulia, Duta Keluarga Berencana Aqeela Jenifer Thurai, Duta Lingkungan Hidup Susiko Loipebina br. Ginting, Duta Anti Narkoba Bonanza Octykora Fayaseaco P.M, serta Duta Energi Baru Terbarukan Estevina Fiona Gabriel Dien.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, para finalis Puteri Otonomi Indonesia 2022 merupakan perempuan pilihan yang telah melalui berbagai uji kompetensi, dari mulai tingkat daerah hingga nasional. Posisi mereka sangat strategis dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, swasta, hingga berbagai kalangan masyarakat dan stakeholders terkait lainnya. Mereka harus memaksimalkan potensi sebagai finalis Puteri Otonomi Indonesia 2022 sebaik mungkin, khususnya untuk

menyuarakan berbagai kepentingan publik.

"Dalam hal EBT, misalnya, para finalis bisa menyuarakan besarnya potensi EBT di Indonesia yang diperkirakan mencapai 418 Gigawatt (GW). Antara lain bersumber dari matahari/surya yang bisa mencapai 207,8 GW, air mencapai 75 GW, angin mencapai 60,6 GW, bioenergi mencapai 32,6 GW, panas bumi mencapai 23,9 GW, dan arus laut mencapai 17,9 GW. Selain EBT, potensi green economy Indonesia juga terlihat dari besarnya potensi perdagangan karbon di Indonesia yang bisa mencapai Rp 350 triliun," jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini, menerangkan, para finalis Puteri Otonomi Indonesia 2022 juga bisa berkontribusi menyukseskan kepemimpinan Indonesia dalam G-20. Antara lain dengan mempromosikan potensi daerahnya masing-masing, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, hingga pariwisata. Sehingga gegap gempita kepemimpinan Indonesia dalam G-20 juga dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah.

"Kalian bisa memanfaatkan program pemberdayaan desa melalui DEWA (desa wisata agro), DEWI (desa wisata industri), dan DEDI (desa digital) yang dicetuskan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. Slogan tinggal di desa rezeki kota, bisnisnya mendunia, akan menjadi tren dalam menurunkan laju urbanisasi. Sekaligus menjadi magnet yang menarik minat generasi muda untuk kembali ke desa, membangun daerahnya, dan mengoptimalkan berbagai potensi dan peluang," pungkas Bamsoet. ❑

Sarasehan di Universitas Djuanda Bogor

Budi Muliawan Dorong Mahasiswa Jadi Wirausahawan Berbasis Digital

DIGITALISASI yang dalam beberapa tahun belakangan berkembang sangat cepat memberikan ruang dan kemudahan seluas-luasnya dalam menjalankan usaha. Ketika situasi dan kondisi perekonomian global terpuruk akibat pandemi Covid-19 dalam dua tahun belakangan, bisnis berbasis digital justru berjaya.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Biro Humas Setjen MPR Budi Muliawan, SH., MH., menuturkan, konsep marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Alibaba, Amazon, dan lainnya kini merajai dunia usaha karena pemanfaatan teknologi digital.

"Di saat toko-toko ritel konvensional terpuruk akibat pandemi Covid-19, toko-toko digital malah masih bisa meraup laba besar," ujar Budi Muliawan saat menjadi pembicara dalam Sarasehan Kehumasan MPR RI bertajuk Menyapa Sahabat Kebangsaan yang digelar Setjen MPR bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Unversitas Djuanda (FE Unida) di Kampus Unida, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/6/2022).

Hadir dalam sarasehan tersebut Plt. Deputi Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM.; Dekan FE Dr. Dra. Sri Harini, MSi.; tenaga pengajar FE, Rachmat Gunawan, SE., MSi., ratusan mahasiswa serta dosen FE Unida.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Budi Muliawan mendorong para mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change) agar menguasai dan memanfaatkan teknologi digital. Apalagi, belakangan banyak mahasiswa yang lebih memilih menjadi wirausahawan. Hadirnya teknologi digital dikatakan memberi ruang yang lebih luas untuk menjadi seorang wirausahawan.

Menurutnya, ketika teknologi digital belum berkembang sedahsyat saat ini, bila seseorang ingin menjadi wirausahawan, ia harus berupaya keras memikirkan pemenuhan fasilitas fisik, seperti modal yang besar, bangunan toko, dan berapa banyak karyawan yang dimiliki. Kini, kondisinya berubah total. "Lihat saja konsep marketplace, seperti Tokopedia, Bukalapak, Alibaba, Amazon, dan lainnya," katanya.

Karena itulah, Budi Muliawan mengajak mereka yang hadir, khususnya para mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi

digital yang aplikasinya mudah didapat. “Saya mendorong mahasiswa berani menjadi seorang wirausahawan. Sebab apa? Ada banyak peluang menjadi wirausahawan saat ini, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang aplikasinya bisa diunduh di handphone. Hal yang dibutuhkan adalah niat tulus, semangat, dan keinginan kuat untuk maju,” tutur alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur itu.

Di sisi lain, Budi Muliawan mengingatkan para mahasiswa bahwa sebagai kaum terpelajar, mahasiswa juga berperan sebagai ‘agent of change’, ‘guardian of value’, dan ‘moral force’. “Dalam sejarah bangsa, peran-peran itu telah dilakukan oleh mahasiswa di tengah kesibukan mereka menimba ilmu,” tuturnya.

Dia mencontohkan Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, dan peralihan kekuasaan tahun 1966 dan 1998, semua dilakukan oleh kalangan mahasiswa. Tantangan kebangsaan bagi mahasiswa berbeda dari masa ke masa. Di era teknologi digital yang canggih dan masif memudahkan arus informasi masuk ke berbagai belahan dunia, tanpa kecuali termasuk Indonesia. Persoalannya tidak semua informasi yang masuk bisa memberikan dampak positif dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan. “Yang dikhawatirkan kalau nilai-nilai yang masuk merusak nilai-nilai kebangsaan,” ujar Budi Muliawan.

Budi Muliawan mencontohkan, budaya K-Pop dari Korea Selatan yang kini digemari kaum muda. “Mereka lebih mengenal artis-artis K-Pop daripada pahlawan daerah sendiri,” ungkapnya. Hal demikian harus dijaga. Mahasiswa tidak hanya menjaga nilai-nilai kebangsaan, namun mereka diharapkan juga mampu menjadi agen perubahan dan mampu menempatkan diri sebagai sosok yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut mahasiswa perlu mempersiapkan diri. “Berbuat sesuatu yang bermanfaat mulai dari sekarang adalah kunci berhasilnya mahasiswa sebagai agen perubahan,” tuturnya.

Disisi lain, mahasiswa juga harus menjadi penjaga nilai-nilai moral dan bisa memahami serta mengaktualisasikan nilai moral yang ada. Dimulai dari yang dekat-dekat dulu. Misalkan di Bogor ada budaya yang selalu menyapa dengan ramah antar warga. Kebiasaan ini sudah melekat di masyarakat. “Tegur sapa adalah satu identitas moral yang harus terjaga. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenali nilai yang baik itu. Budaya baik yang telah hidup di masyarakat itu tidak dipungkiri dapat memperkaya kemampuan dalam berwirausaha, menjadikan lebih customer fokus misalnya, mengedepankan aspirasi pelanggan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan sehingga dapat meningkatkan pencapaian dalam usaha” katanya. ❑

Menyapa Sahabat Kebangsaan

Siti Fauziah: Mahasiswa Punya Peran Strategis dalam Pembangunan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PELAKSANA Tugas (Plt) Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI Siti Fauziah, SE., MM., menyebutkan, mahasiswa memiliki peran dalam konteks pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Fungsi dan peran mahasiswa menjadi hal yang sangat strategis bagi pembangunan bangsa dan negara.

“Peran mahasiswa menjadi hal yang sangat strategis bagi pembangunan bangsa dan Negara, karena semua yang hari ini masih menjadi mahasiswa 20 tahun ke depan adalah orang-orang yang akan menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia, orang-orang yang akan menjalankan roda pemerintahan di berbagai bidang,” kata Siti Fauziah ketika membuka Sarasehan Kehumasan MPR RI Menyapa Sahabat Kebangsaan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Kamis (23/6/2022).

Kegiatan Sarasehan Kehumasan MPR RI Menyapa Sahabat Kebangsaan bertema: “Peran Mahasiswa dalam Pembangunan Nasional” merupakan kerjasama Setjen MPR RI dan UPI. Tampak hadir Drs. Maifrizal, MM.Akt., (Inspektur Setjen MPR RI), Dr. Agus Mulyana, M.Hum., (Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI), Dr.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Susan Fitriasari, M.Pd., (Ketua Prodi Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI), Budi Muliawan, SH., MH., (Kabag Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR RI), Prof. Dr. Cecep Darmawan (Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia).

Menurut Siti Fauziah, sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, para pemuda dan mahasiswa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa dan negara. "Tahun 1928, para pemuda berkumpul untuk mengikrarkan apa yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda, tahun 1945 para pemuda juga mendorong agar kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, kemudian setelah kemerdekaan sejarah mencatat bagaimana peran mahasiswa pada tahun 1965 serta reformasi tahun 1998," paparnya.

Dalam menjalankan perannya, lanjut Siti Fauziah, mahasiswa memiliki fungsi sebagai penjaga nilai, sebagai penerus bangsa, sebagai penjaga moral, sebagai control social serta sebagai penggerak bagi masyarakat. "Karena itu, tema peran mahasiswa dalam pembangunan nasional dalam Sarasehan Kehumasan MPR RI Menyapa Sahabat Kebangsaan ini menjadi penting," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Siti Fauziah, yang akrab disapa Ibu Titi, menjelaskan, kegiatan Sarasehan Kehumasan MPR yang bertajuk Menyapa Sahabat Kebangsaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI bekerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia.

MPR Menyapa Sahabat Kebangsaan memiliki makna para mahasiswa adalah sahabat kebangsaan. Sahabat itu memiliki arti yang mendalam daripada teman.

"Sehingga kami berharap bahwa semua yang hadir menjadi sahabat kebangsaan dari MPR. Dengan mengenal lebih dekat, lebih mengetahui apa saja yang menjadi tugas dan wewenang Lembaga MPR, maka semua sahabat kebangsaan yang ada akan berjalan beriringan dengan MPR untuk mengukuhkan peran MPR sebagai Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat," terangnya.

Siti Fauziah mengundang staf pengajar atau mahasiswa yang ingin berkunjung ke MPR dengan berkirim surat ke Biro Humas dan Sistem Informasi MPR. "Perpustakaan kami juga memiliki koleksi buku yang cukup banyak dan khusus hanya ada di MPR. Jadi apabila sudah berkunjung ke MPR bisa sekalian melihat koleksi perpustakaan kami. Kalau ada hasil skripsi, tesis atau desertasi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang ingin ditaruh di perpustakaan MPR kami juga sangat terbuka menerima hal tersebut," sebutnya.

Siti Fauziah juga memperkenalkan digitalisasi layanan melalui aplikasi Buku Digital MPR RI. "Silahkan didownload di google play store Buku Digital MPR. Di dalamnya tersedia majalah Majelis MPR, jurnal, hasil kajian dan banyak produk-produk MPR lainnya. Namun, sampai dengan hari ini baru tersedia di platform Android, mudah-mudahan ke depan bisa juga di download di platform IOS," ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) UPI, Agus Mulyana mengatakan ada dua kekuatan mahasiswa. Pertama, mahasiswa memiliki kekuatan intelektualitas. Sebab, mahasiswa berada di lembaga perguruan tinggi yang mengembangkan aspek akademis. Sehingga mahasiswa bisa bersikap kritis ketika menghadapi berbagai perubahan.

Kedua, karena jumlahnya yang banyak maka mahasiswa memiliki massa. Aksi demo mahasiswa sebagai bagian demokrasi menjadi kekuatan mahasiswa dalam menentukan dan memberikan kontribusi bagi perubahan tatanan masyarakat maupun bangsa.

"Kebangsaan harus dikedepankan dalam membangun negeri ini. Perubahan pada tahun 1945, 1966, 1970, 1980 dan 1998 menjadi pelajaran. Apa yang terjadi di Indonesia di masa depan, ditentukan juga dari kampus," katanya. ❑

MPR Menyapa Sahabat Kebangsaan

Budi Muliawan: Mahasiswa Harus Siap Hadapi Era Disrupsi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

REVOLUSI industri 4.0 membawa perubahan dalam pola hidup, pola pikir, dan pola kerja manusia. Perkembangan teknologi juga memicu terjadinya era disrupsi.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Sekretariat Jenderal MPR Budi Muliawan, SH., MH., menyebutkan bahwa era disrupsi nyata adanya dan tidak bisa dihindari. Karena itu, mahasiswa harus mempersiapkan diri menghadapi era disrupsi.

"Upaya untuk menghadapi era disrupsi adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, transformasi digital, dan tidak berhenti untuk berinovasi," ujar Budi Muliawan ketika menjadi narasumber dalam Sarasehan Kehumasan MPR RI Menyapa Sahabat Kebangsaan di Auditorium Lantai 6 Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Gedung Muhammad Nu'man Somantri Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/6/2022).

Dialog bertema "Peran Mahasiswa dalam Pembangunan Nasional" hasil kerjasama Setjen MPR RI dengan UPI itu juga menghadirkan Guru Besar Ilmu Politik UPI Prof Dr Cecep Darmawan, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM., Inspektur Setjen MPR RI Drs. Maifrizal, MM. Akt., Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI Dr. Agus Mulyana, M.Hum., dan Ketua Prodi Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI Dr. Susan Fitriasari, M.Pd.

Budi Muliawan menjelaskan, era disrupsi adalah masa di mana terjadi inovasi dan perubahan secara masif. Perubahan tersebut terjadi secara fundamental sehingga mengubah berbagai sistem dan tatanan ke cara yang baru. Era disrupsi ini didorong revolusi industri 4.0. "Perubahan yang muncul pada era revolusi industri ditandai dengan berkembangnya kecerdasan buatan (artificial intelegence), teknologi nano, dan rekayasa genetika.. Apabila ketiga teknologi tersebut diaplikasikan maka jutaan orang akan kehilangan pekerjaan," kata alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang ini.

Secara sederhana, contoh era disrupsi antara lain pemesanan transportasi lewat GoJek atau Grab, pemesanan makanan melalui aplikasi Go Food, informasi yang dulu diperoleh dari media konvensional seperti koran, majalah, atau televisi, sekarang seseorang memperoleh informasi dari internet (browsing di Google, termasuk informasi dari media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, dan lain-lain), transfer uang yang lebih cepat melalui aplikasi di handphone.

"Dulu kiriman uang dari orangtua untuk mahasiswa memerlukan waktu cukup lama pakai wesel di kantor pos. Sekarang, cukup dengan aplikasi di handphone, saat ini uang ditransfer maka saat itu pula kita bisa mengecek uang transfer itu," katanya memberi contoh.

Menurut Budi Muliawan, fenomena yang terjadi saat ini, banyak department store yang kehilangan konsumen karena maraknya market place. Lewat handphone bisa dilakukan transaksi perdagangan dengan mudah. Saat ini omzet terbesar penjualan adalah melalui transaksi online. Bisnis yang tidak melakukan transformasi digital pasti akan tertinggal.

Begitu juga terjadi perubahan dalam pendidikan dan pengajaran. Selama dua tahun pandemi Covid-19, belajar mengajar dilakukan secara virtual. "Itulah contoh paling sederhana tentang perkembangan era disrupsi. Artinya, kondisi saat ini sudah berubah semua. Pola hidup, pola pikir, dan pola kerja berubah. Itulah perubahan yang mendasar dan fundamental," kata Budi Muliawan.

Bagaimana mahasiswa mengambil peran dan posisi di era disrupsi ini? Menurut Budi Muliawan, mahasiswa harus ikut beradaptasi dengan perubahan. "Mahasiswa tidak bisa menolak era disrupsi ini. Kita tidak bisa lagi seperti dulu. Semua harus bertransformasi dan harus siap menghadapi era disrupsi ini," tuturnya.

Budi Muliawan mengungkapkan, para mahasiswa merupakan Generasi Z yang

jumlahnya sekitar 27,94% dari 270 juta populasi penduduk Indonesia. Generasi Z adalah generasi yang lahir di era internet atau lahir tahun 1997 – 2012, atau saat ini (tahun 2022) berada di usia antara 10 – 25 tahun. Inilah rata-rata usia para mahasiswa saat ini. Salah satu karakter generasi Z adalah sudah beradaptasi dengan era digital.

"Mahasiswa harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan di era digital. Mahasiswa harus melakukan inovasi. Mahasiswa tidak hanya mempelajari bidang yang ia pelajari tapi juga mengaplikasikan serta mampu menginovasi dan berkreativitas tinggi dalam bidang tersebut," imbuhnya.

Selain itu, Budi Muliawan menambahkan, mahasiswa berperan sebagai agent of change (agen perubahan), mempunyai peran sebagai social control (kontrol sosial), menjadi iron stock (generasi penerus), serta mendorong moral force (gerakan moral). "Peran mahasiswa harus menjaga moral yang baik. Mahasiswa mempersiapkan diri sebagai calon penerus bangsa. Mahasiswa juga harus menjaga nilai-nilai luhur yang ada dengan mempertahankan kebenaran. Sebab, mahasiswa bisa bersuara secara bebas dan lantang menyatakan apa yang benar dan tidak benar," jelasnya.

Menghadapi era disrupsi, sambung Budi Muliawan, para mahasiswa agar jangan meninggalkan Empat Pilar, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan tertinggi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yaitu keragaman yang harus dipandang sebagai kekayaan khasanah sosio – kultural.

Kepada mahasiswa FPIPS UPI sebagai calon pendidik, Budi Muliawan berpesan agar selalu mengedepankan ilmu dan adab. Sebab, ilmu tanpa adab akan menjadi tidak berguna dan bermanfaat. "Adab lebih tinggi dari ilmu. Selain memberikan ilmu yang baik, guru juga mengajarkan adab, etika, moral, menjunjung nilai-nilai kebenaran. Guru adalah teladan bagi kita semua. Mari kita memuliakan guru," pesannya.

Senada dengan Budi Muliawan, Prof. Dr. Cecep Darmawan mengungkapkan peran dan tanggungjawab pemuda atau mahasiswa dalam pembangunan nasional mengacu pada UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dalam UU itu disebutkan pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional. Peran pemuda atau mahasiswa, antara lain menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, menjaga keutuhan NKRI, memperkuat persatuan bangsa, dan melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum. "Juga peran meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan budaya nasional, dan meningkatkan daya saing serta kemandirian ekonomi bangsa," ujarnya. ❑

Sosialisasi Empat Pilar MPR di Tarakan

HNW: Peristiwa Lepasnya Sipadan-Ligitan Jangan Terulang

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN orang berkumpul di Gedung Serbaguna di Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), Jumat (24/6/2022). Mereka berasal dari berbagai organisasi keagamaan, persaudaraan etnis, dan organisasi kepemudaan, sejak pukul 19.00 Waktu Indonesia Tengah, hari itu, berkumpul di lantai 2 gedung serba guna tersebut untuk mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR, yaitu: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Acara tersebut cukup semarak, menghadirkan (secara online) Wakil Ketua MPR RI, Dr. Hidayat Nur Wahid, MA., sebagai narasumber. Bersama HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, hadir pula sebagai narasumber anggota MPR Fraksi PKS Ahmad Syaikhu. Juga Nampak hadir dalam acara itu adalah Walikota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes., dan Wakil Walikota Effendi Djuprianto.

Dalam pemaparan, HNW mengatakan, Sosialisasi Empat Pilar MPR perlu terus dilakukan dengan berbagai macam cara dan metode. “Meski secara online, kita harus tetap menggelorakan cinta tanah air dan bangsa,” ujar alumni Pondok Pesantren Gontor itu. HNW mengaku senang, karena bisa bertatap muka dengan masyarakat Tarakan meski dari Jakarta.

HNW menyatakan, begitu mendengar nama Kalimantan Utara, ia langsung teringat pada masa lalu, ketika bangsa Indonesia masih memiliki dua pulau yang bernama Sipadan dan Ligitan. Pulau tersebut keberadaannya tidak jauh dari Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pulau tersebut rupanya juga diklaim oleh Malaysia sehingga terjadi sengketa.

Pria asal Klaten, Jawa Tengah, merasa sedih saat pengadilan internasional memenangkan Malaysia atas sengketa pulau Sipadan dan Ligitan. “Di tahun 2003, akhirnya kita kehilangan Sipadan dan Ligitan”, ujarnya. Hilangnya Sipadan dan Ligitan, menurut HNW, harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia. “Dari kasus itu, kita bisa memetik pelajaran yang menyentuh bahwa kita harus terus mencintai Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut HNW menegaskan, mencintai Indonesia adalah hal penting yang harus diusahakan agar wilayah Indonesia tetap utuh. “Kita tidak bisa membiarkan sejengkal tanah pun lepas dari Indonesia”, tegasnya. Jangan sampai peristiwa lepasnya Sipadan dan Ligitan terjadi kembali.

“Menjaga keutuhan wilayah NKRI merupakan salah satu tantangan buat bangsa ini. Potensi lepasnya pulau-pulau yang ada karena diklaim oleh bangsa lain bisa terulang. Buktinya, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengklaim Kepulauan Riau milik Malaysia. Hal demikian tak boleh dibiarkan, Kepulauan Riau adalah bagian dari NKRI”, tegasnya.

HNW dengan tegas menyatakan, bangsa ini harus mempertahankan Kepulauan Riau agar tetap milik Indonesia. Sejarah membuktikan, Sultan-sultan Riau banyak

memberi kontribusi bagi berdirinya NKRI. "Sumbangan dan bantuan uang yang tidak sedikit telah diberikan kepada republik ini," ungkap HNW.

Untuk membela keutuhan wilayah NKRI, menurut HNW, banyak hal harus dilakukan dan dengan berbagai macam cara. Salah satunya, dengan sosialisasi Empat Pilar MPR ini, kita segarkan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, acara seperti ini sangat penting dilakukan. "Bila tidak ada sosialisasi, kita akan semakin asing dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika", tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, HNW juga menanggapi pemaparan Walikota Tarakan, Khairul, bahwa di sana ada keberagaman penduduk. Di Tarakan, katanya, terdapat berbagai macam etnis, suku, dan bahasa masing-masing. "Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam," ujar HNW membenarkan apa yang dikemukan oleh Walikota Tarakan tersebut.

HNW lalu memaparkan sejarah penyusunan dasar Negara Pancasila oleh Panitia 9. Jadi, menurut HNW, saat hendak menyusun dasar Negara, dibentuklah Panitia 9 beranggotakan perwakilan yang memiliki latar belakang berbeda, beraga, suku, agama, ormas, dan aliran kebangsaan. Meski keberagaman tidak membuat konflik atau deadlock dalam mengambil keputusan.

"Keberagaman itu justru membuat para pendiri bangsa bisa bersatu", tutur HNW. Jadi, pendiri bangsa memberikan nilai-nilai keteladanan, yakni mengedepankan persatuan. Dan, nilai-nilai ini perlu disegarkan kembali apalagi dalam menghadapi tahun-tahun politik. "Kerawanan di tahun politik bisa dicegah dengan cara mengingatkn kembali tujuan dan hakekat apa negara ini dilahirkan," katanya. ❑

Simposium Nasional Masika ICMI

Syarief Hasan Ajak Generasi Muda Merawat Nilai Kebangsaan

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., (Syarief Hasan) mengatakan bahwa nilai-nilai kebangsaan adalah nilai atau norma yang melekat pada diri dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk itu, merawat nilai kebangsaan harus dilakukan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi mudanya, agar tidak luntur tergerus kemajuan zaman, serta berbagai pemikiran dan faham baru yang tidak sesuai jati diri bangsa.

Cara untuk merawatnya adalah dengan terus mempelajari, memahami, dan berupaya

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

mengamalkan nilai kebangsaan itu yang juga dikenal Empat Pilar MPR dalam kehidupan bemasyarakat. “Sering menggelar dan menghadiri berbagai diskusi, symposium, dan pembahasan soal Empat Pilar, saya rasa salah satu upaya riil merawat nilai kebangsaan,” katanya.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini saat memberikan key-note speech di hadapan puluhan mahasiswa dan generasi muda, peserta Simposium Nasional bertema ‘Merawat Nilai Kebangsaan Dalam Meneguhkan Pancasila’ yang digelar Akademi Tunas Cendekia Indonesia MASIKA ICMI Sulawesi Selatan (Sulsel), di Kota Makassar, Jumat (10/6/2022).

Hadir dalam acara itu Waketum Pengurus Nasional MASIKA ICMI Prof. Dr. Ismail Suardi Wekke, Kepala Badan Kesbangpol Makassar Zainal Ibrahim, Direktur Insting Institute Syamsul Bahri, dan Direktur Eksekutif Akademi Tunas Cendekia Muhammad Ikhsan

Generasi muda atau milenials, lanjut Syarief Hasan, memang elemen bangsa yang harus terus didorong dan didukung dalam upaya merawat nilai kebangsaan. Sebab, para milenials ini dalam 10 atau 20 tahun lagi akan menjadi pemimpin bangsa yang akan menentukan arah perjalanan negara ini selanjutnya.

“Bayangkan jika Pancasila dan milenials bangsa berkolaborasi erat tak terpisahkan maka cita-cita Indonesia sejahtera bukan khayalan semata. Makanya, saya sangat antusias diundang di acara yang digelar anak-anak muda ini membahas soal Pancasila. Respon saya kepada staf, saya ingin hadir secara langsung bertatap muka supaya lebih dekat,” ungkapnya.

Dikatakan Syarief Hasan, selain mendorong para milenials untuk memahami nilai kebangsaan, mereka juga harus diberi akses dan kesempatan untuk berkiprah di politik. Sebab, di politiklah calon-calon potensial pemimpin akan terlihat.

“Partai politik mesti memberi ruang pada mereka. Di Partai Demokrat sendiri, hal ini sudah sejak lama kami lakukan. Demokrat membuka jalan seluasnya untuk anak muda berpartisipasi aktif, sesuai moto kami ‘Muda Adalah Kekuatan’,” tandas Syarief Hasan.

Di sesi akhir, Syarief Hasan mengajak generasi muda bangsa mengambil kesempatan yang diberikan parpol itu dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan.

“Sebab, menuju Indonesia Emas 2045 negara ini harus memiliki generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Usia muda 18-20 tahun saat ini, maka memasuki Indonesia Emas 2045, beberapa dari kalian telah matang serta siap untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan bangsa. Sekarang, persiapkan diri dengan belajar yang rajin, kuasai ilmu pengetahuan, dan isi relung hati dan jiwa kalian dengan nilai-nilai kebangsaan,” pungkasnya. ❑

Peringatan Bulan Bung Karno di Belanda

Megawati : Negara Wajib Lindungi Ideologi Warganya Di Luar Negeri

SEMINAR Pancasila bertajuk "Bung Karno, Pancasila dan Jiwa Bangsa Indonesia" yang diselenggarakan atas kerja sama MPR RI, BPIP dan KBRI Belanda di Kota Eindhoven dibuka secara virtual oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri, dan menghadirkan secara ofline narasumber Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Duta Besar RI untuk Belanda Mayerfas, dan Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi.

Hadir sebagai peserta dalam seminar yang berlangsung Sabtu, 25 Juni 2022, itu adalah masyarakat Indonesia di Belanda, Aktifis Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda, pimpinan organisasi keagamaan, pengamat Indonesia dan pengurus Dewan Perwakilan Partai Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan Belanda dan Eropa.

Kegiatan ini merupakan rangkaian agenda Bulan Bung Karno tahun 2022 yang diselenggarakan di Eropa oleh DPP PDI Perjuangan. Sehari sebelumnya, yaitu Jumat (24 Juni 2022), di Kota Paris, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah, meresmikan pembukaan Pameran Foto Bung Karno. Pameran foto bertema "Soekarno Sang Visioner" di Kota Paris ini berlangsung hingga 11 Juli 2022.

Dalam sambutannya, Megawati menyambut baik penyelenggaraan Seminar Pancasila bagi masyakat Indonesia di luar negeri. Megawati mengatakan, "Salah satu janji negara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia. Salah satu hal yang harus dilindungi negara itu adalah perlindungan warga negara Indonesia dari segala kemungkinan pengaruh ideologi-ideologi bangsa lain, termasuk terhadap warga negara Indonesia yang berada dan tinggal di luar negeri," tandas Megawati.

Megawati menyampaikan harapannya agar di manapun warga Indonesia berada, hendaknya nilai-nilai Pancasila harus tetap dibawa dan senantiasa melekat dalam pikiran, hati dan jiwa mereka. "Ini harus dicamkan karena kita telah bersepakat bahwa Pancasila adalah falsafah dan ideologi negara, pemersatu bangsa Indonesia, perjanjian luhur pendiri bangsa, dan menjadi cita-cita bangsa Indonesia," tandas Megawati lagi.

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dalam ceramahnya mengatakan bahwa sejatinya Pancasila adalah ideologi perdamaian bagi bangsa Indonesia sendiri dan bagi bangsa-bangsa lainnya di muka bumi. Pancasila jika diamalkan dalam praktik berbangsa dan bernegara akan menciptakan perdamaian dalam masyarakat Indonesia dan dalam tatanan masyarakat dunia.

Ahmad Basarah menjelaskan, bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah ideologi pembebasan juga sekaligus ideologi perdamaian yang bersifat universal. Pancasila dapat digunakan secara internasional menghadirkan nilai kemanusiaan dalam wujud perdamaian dunia, karena memang tiada bangsa yang dapat menolak nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial.

Pancasila, kata Basarah, adalah lima dasar negara yang tidak berpangkal kepada gagasan Manifesto Komunis atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Pancasila adalah pengangkatan ke taraf yang lebih tinggi, satu hogere optrekking daripada Declaration of Independence dan Manifesto Komunis. "Sehingga Pancasila ini adalah karya jenius dan visioner bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain di dunia" ujar Basarah yang juga dosen Universitas Islam Malang (Unisma) itu.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, mengatakan bahwa bangsa Indonesia demikian beruntung mempunyai sosok besar seperti Bung Karno dan Pancasila.

Zuhairi mengatakan, Bung Karno telah meletakkan pondasi sangat luar biasa bagi perdamaian dunia melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan Gerakan Non Blok. Bahkan, konstitusi Iran dan Tunisia ada tertulis istilah Non Blok. Mereka mengakui mengambil dari pemikiran Bung Karno. Bahkan, sambungnya, Tunisia juga mengakui bahwa kemerdekaannya diinspirasi oleh Bung Karno.

Menurut Dubes Zuhairi , untuk menyebarluaskan ajaran Bung Karno, dirinya sebagai duta besar di Tunisia melakukan penerjemahan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 ke dalam bahasa arab.

Menurutnya, hal ini karena nilai-nilai Pancasila adalah solusi bagi dunia Islam dan dunia internasional.

"Oleh karena itu, kita bangga memiliki Bung Karno sehingga pemikiran dan perjuangan Bung Karno harus terus-menerus kita hidupkan agar menjadi warisan penting bagi dunia", pungkas Zuhairi.

Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Mayerfas, dalam paparannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan terlibat aktif dalam menyelenggarakan acara seminar ini. "Kita harapkan melalui seminar ini kita bisa memperdalam dan mengkaji lebih jauh lagi mengenai Pancasila sebagai warisan Bung Karno dan Pendiri Bangsa lainnya yang menjadi jiwa bangsa Indonesia. Kita harus meyakini nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" ujarnya. ❑

Peringatan Bulan Bung Karno di Kota Paris

Ahmad Basarah: Promosikan Pancasila dan Indonesia kepada Dunia

WAKIL Ketua MPR dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah, meresmikan pembukaan Pameran Foto Bung Karno dengan Tema "Soekarno Sang Visioner" di Kota Paris pada Jumat 24 Juni 2022 pukul 12.00 Waktu Paris. Pameran foto tersebut berlangsung hingga tanggal 11 Juli 2022.

Pameran foto Bung Karno merupakan kerja sama antara Walikota Paris dengan lembaga swadaya masyarakat Nation Emergentes yang berkedudukan di Paris, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Perancis, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan Perancis/Belgia.

Pembukaan pameran foto tersebut dihadiri oleh Walikota Paris Jean Pierre Lecoq, Duta Besar RI Di Perancis Mohammad Oemar, Duta Besar Nepal untuk Perancis Dhipak Adhikari, Duta Besar Myanmar Kyaw Zeya, Duta Besar Saudi Arabia Fahad Al Ruwaily dan Perwakilan kedutaan besar negara-negara sahabat, Direktur LSM Hak Asasi Manusia negara Afrika di Paris, Keita S Cheick, Direktur Nation Emergentes Doraya Asgarly, dan Pengurus DPLN PDI Perjuangan Perancis/Belgia, Komunitas Banteng Eropa dan masyarakat Indonesia di Perancis.

Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menyampaikan salam hangat dari Presiden RI ke 5 dan Ketua Umum PDI Perjuangan Prof. DR (HC) Megawati Soekarnoputri. Basarah mengatakan, "Pameran foto Bung Karno ini kami laksanakan dalam rangka mempromosikan Indonesia dan Pancasila kepada dunia internasional, karena berbicara tentang Bung Karno berarti kita bicara tentang Indonesia dan Pancasila" ujar Basarah yang juga Anggota Komisi Pendidikan DPR itu.

Basarah menambahkan, "Foto-foto yang dipamerkan tersebut menceritakan tentang perjalanan hidup tokoh Bung Karno sejak dilahirkan dan proses pertumbuhan perkembangan pemikirannya hingga menjadi seorang pejuang pemikir dan pemikir pejuang yang visioner serta mendarma baktikan hidupnya untuk kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia," terang Basarah

"Selain itu, ada juga foto-foto tentang peran Bung Karno dalam dunia internasional, seperti antara lain, penyelenggan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, penyelenggaraan KTT Non Blok dan Pidato Presiden Soekarno di PBB tahun 1960," urai Basarah yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri itu.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis, Mohammad Oemar mengatakan, "Pameran foto Bung Karno sebagai Proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia yang visioner ini akan dapat membangun citra positif Indonesia dan Pancasila di Perancis dan Eropa," ujar mantan sekretaris Wakil Presiden Jusuf Kalla itu.

Direktur Nations Emergentes Doraya Asgarly menjelaskan bahwa pihaknya mau bekerja sama menyelenggarakan pameran foto Bung Karno ini karena kagum terhadap perjuangan Bung Karno untuk Indonesia dan dunia. "Meskipun saya warga negara Perancis tetapi saya dan banyak masyarakat Perancis lainnya mengagumi Soekarno karena dia seorang pemimpin Indonesia dan dunia yang hebat dan visioner," jelas Douraya Agarly.

Ketua DPLN Perancis/Belgia, Angga Perima, berharap, agar event kerja sama pameran foto ini akan semakin meningkatkan pengenalan masyarakat Perancis dan Eropa terhadap Bung Karno dan Indonesia. "Saya berharap pameran foto ini juga akan semakin meningkatkan hubungan baik antara Perancis dan Indonesia sebagai dua negara yang bersahabat. Pameran foto ini membuat kami warga negara Indonesia yang tinggal di Perancis ini merasa bangga dan terhormat", ujar Angga Perima. ❑

Sosialisasi Empat Pilar

Perkembangan Teknologi untuk Memperkokoh Nilai-Nilai Kebangsaan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MANFAATKAN teknologi untuk memperkokoh nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda. Pemahaman terhadap nilai kebangsaan harus menjadi modal dasar anak bangsa untuk beradaptasi dan berinovasi dalam rangka menjawab tantangan di masa depan.

"Teknologi yang pintar mesti dihadapi oleh manusia yang pintar. Manusia harus menjadi tuan atas teknologi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat melakukan Sosialisasi Empat Pilar pada Pelatihan Kader III (Advance Training) oleh Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (Badko HMI) Jawa Tengah-D.I.Yogyakarta, Ahad (26/6), di Balai Latihan Kerja Semarang 2, Semarang, Jawa Tengah.

Pada sosialisasi bertema 'Menguatkan Nilai Nasionalisme Demi Terciptanya Kader Yang Mampu Mentransformasikan Pemikiran Menuju Indonesia Emas' itu, juga dihadiri Haerudin, S.H., M.H., (Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah), Dr. dr. Masyrifan Djamil (Presidium KAHMI Jawa Tengah), Nur Kholis, S.HI., M.H., (Ketua Umum Badko HMI Jawa Tengah dan DIY), dan seluruh peserta pelatihan Badko HMI Jateng-DIY.

Menurut Lestari, diperlukan kesadaran akan identitas yang melekat dan kemampuan untuk berpikir kritis sekaligus futuristik, mengantisipasi serta berjalan menyambut masa depan. Apalagi, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, perjalanan sejarah manusia selalu mengalami perjumpaan dengan krisis.

Setiap situasi krisis dengan sejumlah penyebab, tambah Rerie, selalu menyebabkan gejolak, ketidakpastian, kompleksitas masalah dan ambigu pada setiap solusinya. Kondisi saat ini, seperti pandemi Covid-19, dan konflik antarnegara di dunia, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, menghadirkan sejumlah situasi krisis di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

"Kita dituntut beradaptasi dalam setiap krisis untuk mengubah pola perilaku. Dan, situasi tidak pernah kembali seperti sediakala. Selalu ada nilai-nilai baru yang menjadi pegangan

Misalnya, protokol kesehatan dan kenormalan baru," ujar Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, itu.

Menurut Rerie, generasi muda perlu merefleksikan kembali warisan nilai yang terdapat dalam Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan BhinnekaTunggal Ika. Karena, tegas Rerie, konsensus kebangsaan mesti menjadi fondasi dalam setiap proses pembelajaran, penciptaan pengetahuan, mengasah kemampuan adaptif dan kapasitas dinamis yang mengantar anak bangsa pada kemampuan inovasi.

Daya adaptasi dan inovasi yang mumpuni dari setiap anak bangsa yang didasari nilai-nilai kebangsaan sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan bangsa di masa datang. ❑

Kunjungan Kerja di Kota Solo

Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., (Syarief Hasan) mendukung penuh kebijakan pemerintah yang akan menetapkan Pancasila menjadi mata pelajaran (Mapel) wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan nasional yang diberlakukan mulai tahun ajaran baru, Juli 2022.

Kebijakan ini, lanjut Syarief Hasan, sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang di antaranya berbunyi 'bahwa dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan'.

"Di tetapkannya Pancasila sebagai mapel wajib merupakan salah satu strategi negara dalam memasyarakatkan ideologi serta dasar negara ini kepada generasi muda bangsa. Melalui pendidikan yang terarah dan berkesinambungan, Pancasila diharap akan melekat dan mewarnai serta menjadi way of life generasi milenials, baik di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, ataupun di mana saja," katanya, di Kota Solo, di tengah kunjungan kerjanya di beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah, Ahad (26/6/2022).

Pemahaman Pancasila melalui pendidikan, lanjut Syaref Hasan, juga diharapkan akan merekatkan seluruh anak bangsa dalam ikatan persatuan yang kuat tak tergoyahkan, menjadi benteng untuk menahan setiap pengaruh radikalisme dan pemahaman luar yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

Namun, Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini mengingatkan agar dalam penyusunan kurikulum soal Pancasila sebaiknya bersinergi atau meminta sumbang saran dengan elemen bangsa lainnya, seperti lembaga MPR RI, BPIP yang sangat concern kepada pemasyarakatan Pancasila .

Para guru dan dosen, menurut Syarief Hasan, juga harus membekali diri dengan pengetahuan yang luas seputar Pancasila, sebab mereka akan berhadapan langsung peserta didik di depan kelas membawakan mata pelajaran ini kepada pelajar dan mahasiswa.

"Hal itu sangat penting, sebab kita ingin anak-anak kita itu mendapatkan pembelajaran soal Pancasila secara utuh," tegas Guru Besar Universitas Negeri Makassar ini.

Melihat luar biasanya dampak positif pendidikan Pancasila ini untuk masa depan bangsa, Syarief Hasan mengajak para pemuda pelajar dan mahasiswa Indonesia, agar belajar dengan giat seluruh materi mapel Pancasila yang diajarkan guru dan dosen.

"Yang kalian harus pahami adalah Pancasila ini adalah modal kita dalam membangun bangsa. Interaksi, komunikasi, persaudaraan yang kuat terbangun karena Pancasila ini, akan memudahkan bangsa bangkit menuju Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera," pungkasnya. ❑

Pancasila Mata Pelajaran Wajib di Sekolah

HNW: Untuk Sukses Pemerintah Mestinya Memberi Keteladanan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid, MA., menyambut baik keputusan pemerintah yang menetapkan Pancasila menjadi mata pelajaran wajib di semua tingkatan pendidikan, mulai tahun ajaran baru 2022/2023. Artinya, pemerintah sudah siap hadir menjadi contoh terbaik dalam pemahaman dan pelaksanaan Pancasila. "Sebab, methode pendidikan dan pengajaran yang terbaik adalah adalah dengan keteladanan," ujar HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid.

Berbicara di hadapan ratusan guru dari Pusat Pendidikan Islam untuk Anak (PPIA) Baitul Maal, Banten, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/6/2022), HNW menyatakan, dengan mewajibkan mata pelajaran Pancasila di sekolah maka pemerintah sudah siap memosisikan diri sebagai teladan dalam melaksanakan Pancasila dengan baik dan benar. Berbicara anggota MPR dari Fraksi PKS, Dr. Mulyanto, MM, serta dihadiri Kepala PPIA Baitul Maal, Dr. Maya Yunus, M.Ag.

Menurut Hidayat, ideologi negara Pancasila memang harus diajarkan secara formal di seluruh jenjang pendidikan dengan baik dan benar, dan terutama dengan keteladanan. Apalagi bangsa Indonesia masih paternalistik. "Bila sila Ketuhanan Yang Maha Esa diajarkan, hendaknya para peserta didik mendapatkan keteladanan bagaimana sila itu dijalankan dengan baik, benar dan solutif," ungkap HNW.

"Jadi, jangan sampai sila Ketuhanan yang Maha Esa diajarkan, tapi terjadi perilaku anti-agama, bahkan atheis, atau membenarkan tindakan tidak sesuai dengan ajaran Agama yang *rahmatan lil 'alamin*," HNW yang dalam acara itu tampil bersama anggota MPR Fraksi PKS, Dr. Mulyanto, MM., selaku pembicara. Dan, dihadiri Kepala PPIA Baitul Maal, Dr. Maya Yunus, M.Ag.

Lebih lanjut HNW menjelaskan, begitu juga dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Maka pelaksanaan sila kedua ini harus menghadirkan perilaku dalam berbangsa dan bernegara yang bisa menjadi teladan, yaitu perilaku manusiawi yang adil dan beradab.

"Sehingga hukum yang diterapkan benar-benar hukum yang memberi keadilan dan berdampak pada hadirnya kemanusiaan yang beradab, bukan laku biadab dengan hukum yang tebang pilih, atau hukum yang menyasar pihak-pihak berdasarkan like dan dislike," kata politisi PKS ini.

Selanjutnya, sila Persatuan Indonesia. Agar pemahaman sila ini bisa sukses, peserta didik perlu mendapatkan keteladanan dari pemerintah yang berorientasi merawat dan menguatkan persatuan Indonesia. "Bisa menerima perbedaan, keragaman dalam konteks untuk mempersatukan. Jangan malah peserta didik mendapat kesan para buzzer dibiarkan menyebar kebencian dan memecah belah persaudaraan dan persatuan bangsa.

Demikian pula separatis dan separatisme mestinya tidak dibiarkan menyebar dan menguat, karena membahayakan Persatuan Indonesia," imbuhnya.

Pancasila, lanjut Hidayat, juga sangat gamblang menyebutkan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. "Sehingga mestinya orientasi pemerintah adalah menguatkan semangat bermusyawarah dan mementingkan maslahat rakyat melalui para wakilnya. Dengan demikian prinsip mencari solusi atasi masalah, agar bisa hidup rukun dan damai selalu bisa dihadirkan. Jangan malah memberi kesan sebaliknya, keputusan sering diambil dengan menang-menangan, banyak-banyakan suara atau melalui voting"jelasnya.

Hidayat menambahkan kalau kita ber-Pancasila dengan baik dan benar maka orientasinya juga adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan, terkait dengan pelajaran wajib Pancasila, pemerintah penting tampil sebagai teladan. Apalagi di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 disebutkan,"…serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial…." Artinya, ini adalah perintah. Maka akan menjadi pelajaran yang menarik dan meyakinkan peserta didik, bila pemerintah tampilkan contoh teladan, realisasi daripada sila ke-5 ini. Atau apa hambatanya sehingga yang terlihat dan dirasakan rakyat adalah ketimpangan dan belum terwujudnya keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan SARA,"katanya.

Hidayat melanjutkan dalam perumusan dasar dan ideologi Negara, Pancasila, selain tokoh-tokoh Nasionalis Kebangsaan, juga menghadirkan keterlibatan aktif tokoh-tokoh Nasionalis dari umat Islam, baik dari latarbelakang ormas maupun partai politik Islam. "Mereka bermusyawarah bersama dan memutuskan hal-hal yang sangat mendasar bagi cita-cita Indonesia Merdeka, baik ideologi dan dasar negara Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Para tokoh umat Islam juga menyelamatkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan menerima perubahan tujuh kata dalam Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan tambahan penjelasan, yang dimaksud Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tauhid. Dengan kenegarawanan semacam itulah Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia terselamatkan.

Semua itu membuktikan bahwa Pancasila telah terlaksana dengan penuh keteladanan oleh para Bapak dan Ibu Bangsa. Sekali lagi perlu ditegaskan, agar Pancasila sebagai mata pelajaran wajib akan sukses diajarkan dan dipraktikkan untuk memandu dan mewariskan NKRI secara baik dan benar kepada generasi penerus bangsa, generasi milenial, generasi Z," ujarnya. ❑

Acara Bicara Buku
Siti Fauziah Tegaskan, Pancasila Mampu Kokohkan NKRI

PELAKSANA Tugas Deputi Administrasi Setjen MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., menghadiri acara Bicara Buku Pustaka Bersama Wakil Rakyat membahas buku berjudul: 'Pancasila: Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara' karya Prof. Dr. Jimly Asshiddqie, SH., di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Bersama anggota MPR dari Kelompok DPD Jimly Asshiddiqie, Ketua Bidang Pendidikan Seni Budaya dan Pariwisata DPP PCTA Dr (c) Soenarto Sardiatmadja, MBA., MM., sebagai narasumber, serta Wisesa Utama Dewan Ketahanan Nasional Dr. Epin Saepudin, M.Pd., Siti Fauziah memasuki ruang acara dan disambut oleh Kepala Perpustakaan Setjen MPR Yusniar.

Dalam sambutannya, Siti Fauziah yang akrab disapa Ibu Titi ini menyampaikan bahwa pembahasan buku Jimly Asshiddiqie sangat menarik dan berkualitas, yakni tentang Pancasila sebagai identitas konstitusional bangsa. Apalagi diskusi ini bersamaan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, sehingga momennya sangat pas.

Jimly Asshiddiqie

Siti Fauziah

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Pancasila. menurut saya, adalah semangat kita semua. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila sampai saat ini terbukti mampu menjadi pemersatu dan mengokohkan rakyat Indonesia tetap menyatu dalam wadah NKRI, tidak ada perpecahan," katanya.

Di tengah sambutan untuk mencairkan suasana, Siti Fauziah menyapa para peserta yang hadir di lokasi acara dan secara daring via zoom, perwakilan perguruan tinggi dan komunitas seperti mahasiswa UIN Banten, anggota DPP PCTA, perwakilan Asia Africa Reading Club, dan perwakilan komunitas Relawan Literasi (Relasi).

"Salam Pancasila," sapa Siti Fauziah, dibalas koor bareng pekikan salam Pancasila seluruh peserta. "Semangat sekali, inilah semangat rakyat Indonesia. Biarpun banyak peserta yang harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah ke tempat acara ini, tapi demi Pancasila, demi NKRI tetap dijalani. Saya sangat apresiasi," tambahnya.

Pancasila, lanjut Ibu Titi, juga merupakan bagian dari Empat Pilar MPR RI. MPR RI adalah lembaga yang memiliki tugas amanah dari UU untuk melakukan Sosialisasi Empat Pilar kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Di tengah penjelasannya soal Empat Pilar, Ibu Titi melakukan dialog interaktif kepada peserta dengan melemparkan pertanyaan dadakan soal Empat Pilar. "Siapa yang bisa sebutkan Empat Pilar MPR secara lengkap," tanyanya. Beberapa peserta antusias berusaha menjawab walaupun tidak sempurna. "Tidak apa, yang penting berani dan semangat," hibur Ibu Titi. "Empat Pilar MPR adalah Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat Pilar ini harus diingat, dipahami, kemudian diamalkan," jelasnya ramah.

Di ujung sambutan, Ibu Titi mengajak seluruh generasi milenials Indonesia untuk tetap memegang teguh Pancasila sampai kapanpun. "Berusahalah mempelajari Pancasila dari semua sumber yang baik, salah satunya hadir di acara Bicara Buku ini. Saya berharap, acara ini akan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua," pungkasnya.

Tentang acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat, Siti Fauziah juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut adalah program periodik yang digagas Perpustakaan Biro Humas Setjen MPR dengan agenda utama membedah buku-buku berkualitas, dipadu diskusi seru dan interaktif antara narasumber bersama peserta.

"Terkait perpustakaan, saya informasikan, perpustakaan MPR membuka pintu seluas-luasnya kepada masyarakat baik mahasiswa, pelajar atau umum untuk datang membaca atau meminjam buku-buku berbobot yang tersedia gratis di sini, terutama buku tentang MPR, amandemen, seputar UUD dan sejarahnya. Intinya, perpustakaan MPR tersedia untuk rakyat Indonesia, sebab MPR adalah Rumah Rakyat, Rumah Kebangsaan," tandasnya. ❑

DER

Tingkatkan Reformasi Birokrasi, Setjen MPR Gunakan Aplikasi E-RB

PLT. DEPUTI Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR Siti Fauziah, S.E., M.M., mengajak kepada semua kelompok kerja tim RB Setjen MPR untuk mendukung penggunaan aplikasi E-RB guna meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di lingkungan Setjen MPR. “Ayo kita konsen untuk menerapkan E-RB”, ujarnya.

Hal demikian disampaikan oleh Siti Fauziah saat memberi pengantar dalam “Rapat Koordinasi Tim RB Dalam Rangka Implementasi Aplikasi E-RB Tahun 2022”. Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Samithi III, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 29 Juni 2022, itu diikuti oleh para asesor, baik dari Asesor I, Asesor II, Asesor III, dan para asisten asesor.

Lebih lanjut dikatakan oleh Ibu Titi -sapaan akrabnya-, penggunaan aplikasi E-RB perlu dan penting, sebab saat ini semua aktivitas masyarakat dan pemerintahan sudah berbasis elektronik. “Saat ini eranya aplikasi elektronik”, tuturnya. Untuk itu, penggunaan aplikasi E-RB di lingkungan Setjen MPR harus didukung. Penggunaan aplikasi itu disebut mampu sebagai pengungkit nilai dari pelaksanaan RB.

Penggunaan E-RB, menurut perempuan asal Bandung, Jawa Barat, itu sangat bermanfaat. Dengan aplikasi itu, penerapan RB bisa dipantau secara langsung. Untuk itu, dia berharap, semua aparatur sipil negara (ASN) yang ada sudah care pada E-RB. Penggunaan aplikasi itu disebut bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan RB di Setjen MPR. “Toh bila hasilnya bagus nanti juga akan kembali kepada para ASN”, ujarnya.

Menurut Kabag Organisasi dan Tata Laksana Novinda Efrilla, S.E., M.M., dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen MPR adalah:

(1). Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
(2). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
(3). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
(4). Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
(5). Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
(6). Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 5 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 Sekretariat Jenderal MPR RI;
(7). Surat Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 67 W tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2022; “Serta Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi”, ujarnya.

Menurut Novinda, Aplikasi E-RB merupakan aplikasi berbasis web sebagai alat bantu dalam Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), khususnya dalam pengolahan data dukung pelaksanaan RB pada masing-masing area perubahan sesuai dengan form LKE PMPRB.

Aplikasi itu, urai Novinda, dapat dimanfaatkan untuk pengisian LKE PMPRB berdasarkan Permenpan Nomor 26 Tahun 2020, pengumpulan Data Dukung Pelaksanaan RB, monitoring Data Dukung yang telah dikumpulkan, dan monitoring Nilai Evaluasi RB secara Mandiri.

Asesor I Muhamad Jaya S.IP., M.Si., dalam rapat koordinasi itu mengatakan, Setjen MPR telah selesai melakukan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan melakukan pengisian LKE dan sudah menyampaikan kepada Kemenpan RB pada 15 Juni 2022. Tahapan mekanisme PMPRB dilalui secara baik mulai dari pengisian LKE unit hingga LKE final diterima oleh Kemenpan RB.

Dalam rangka memudahkan pengisian LKE dan penyampaian kepada evaluator Kemenpan RB digunakan aplikasi E-RB. Aplikasi E-RB ini memiliki kriteria dan standar pengukuran/penilaian yang sama dengan PMPRB online yang dimiliki oleh Kemenpan RB. Penggunaan E-RB ini juga dilakukan dalam rangka penguatan review berjenjang mulai dari asesor hingga Ketua RB dalam hal ini Setjen MPR. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kualitas dan memastikan LKE telah diisi sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.

Setjen MPR menyampaikan hasil PMPRB ini kepada Kementerian PAN RB melalui surat Sekretaris Jenderal MPR dengan memberikan alamat link akses aplikasi E-RB disertai dengan user id dan password sehingga evaluator dapat langsung mengakses LKE Setjen MPR. Pada surat penyampaian PMPRB tersebut kami juga melampirkan surat pernyataan bahwa proses PMPRB ini telah direview oleh Inspektorat yang ditandatangani oleh inspektur.

“Semoga apa yang kita upayakan ini berjalan lancar hingga pelaksanaan evaluasi verifikasi lapangan oleh evaluator dari Kemenpan RB dan memperoleh hasil yang baik pula”, ujarnya. ❑

DER-AWG

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

H. Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Penyelenggaraan Haji 2022 Berbeda dengan Tahun Sebelumnya

SETELAH dua tahun berturut-turut tidak memberangkatkan calon jemaah haji, pada tahun 2022 ini pemerintah Indonesia memberangkatkan calon jemaah haji setelah pemerintah Arab Saudi memberikan kesempatan ibadah haji. Namun, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M sangat berbeda dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi jumlah jemaah, kondisi Arab Saudi, dan kebijakan lainnya.

Pada penyelenggaraan haji tahun 1443 H/2022 M, Indonesia akan memberangkatkan 100.051 jemaah haji. Kloter pertama jemaah sudah berangkat pada awal Juni lalu. Pemerintah bersama DPR pun telah menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah haji tahun ini rata-rata sebesar Rp 39,89 juta. Biaya ini meliputi penerbangan, sebagian akomodasi di Makkah dan Madinah, biaya hidup (*living cost*), dan biaya visa. Namun, ada kebijakan pemerintah Arab Saudi yang membuat biaya ibadah haji membengkak. Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR pun menyetujui penambahan biaya operasional penyelenggaraan haji sebesar Rp 1,5 triliun.

Bagaimana penyelenggaraan ibadah haji yang pertama kali di masa pandemi ini? Berikut pemaparan H. Marwan Dasopang, anggota MPR dari Fraksi PKB yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang membidangi masalah agama, dalam satu kesempatan di Media Center Kompleks Parlemen, Jakarta Senayan. Petikannya.

Bagaimana persiapan penyelenggaran ibadah haji pada tahun 2022 ini setelah dua tahun pemerintah tidak memberangkatkan calon jemaah haji karena pandemi Covid-19?

Kalau kita berbicara mengenai ibadah haji pada tahun 2022 ini memang agak panjang prosesnya. Sebab, pada awalnya tidak ada kepastian soal kuota jemaah haji Indonesia. Pada saat kita mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji pun, kita masih belum mendapat kepastian kuota. Namun, kita hanya bisa memprediksi dari berbagai sumber infomasi.

Selama ini kita mendapatkan kuota reguler sebanyak 222.000 jemaah. Maka, kita memprediksi dari berbagai informasi ketika kita mengunjungi Arab Saudi, kita akan mendapatkan kuota setengah dari kuota reguler. Karena itu, membuat perkiraan di sekitar 110.000, kira-kira di atas 100.000 jemaah. Lalu, dari perkiraan ini kita menghitung biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).

Kita sudah memutuskan biaya yang dibebankan kepada calon jemaah haji sekitar Rp 42 juta. Sementara biaya perjalanan ibadah haji hampir Rp 90 juta. Angka ini berdasarkan asumsi jumlah calon jemaah haji Indonesia setengah dari kuota reguler pada haji tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita mendapat kepastian dari Arab Saudi bahwa Indonesia mendapatkan kuota hanya 100.051 calon jemaah haji.

Pertanyaannya pada saat itu adalah apakah DPR perlu melakukan revisi tentang

keputusan Bipih. Saya menyampaikan bahwa ada klausul, jika belum ada kepastian soal kuota maka tidak perlu dimasukkan dalam klausul pasal, karena begitu ada kepastian soal kuota dan angkanya tidak terlalu jauh, meskipun ada perubahan. Jumlah 100.000 jemaah atau 110.000 jemaah itu sebetulnya memengaruhi angka-angka, termasuk pembiayaan. Tetapi, dengan klausul pasal terakhir itu, kita menyimpulkan tidak terlalu rumit untuk diberikan wewenang kepada Dirjen Haji Kemenag melakukan penyesuaian. Untuk masalah ini kita sudah selesai.

Persiapan kita kemudian bergeser ke hal-hal teknis. Sebab, penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini agak berbeda dengan penyelenggaraan haji sebelumnya.

Apa yang membedakan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini, setelah dua tahun masa pandemi?

Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini memang memiliki perbedaan yang mendasar dengan ibadah haji tahun sebelum pandemi. Pertama, Arab Saudi masih memberlakukan kehati-hatian dalam hal kesehatan berkaitan dengan pandemi. Karena itu, pemerintah Saudi memutuskan calon jemaah haji yang berusia di atas 65 tahun tidak diperkenankan berangkat. Menurut pemerintah Saudi, dalam ibadah haji diperlukan ketahanan fisik dan ketahanan untuk menghadapi perubahan cuaca dan lain-lain. Situasi ini rawan bagi jemaah haji yang berusia di atas 65 tahun karena itu diputuskan dibatasi hanya sampai usia 65 tahun.

Kedua, para calon jemaah haji tetap melakukan tes PCR. Untuk itu kita berharap pemerintah segera melakukan pendataan dari Siskohat. Dari data itu bisa diperkirakan calon jemaah haji yang berusia sampai dengan 65 tahun.

Ketiga, kebijakan pembatasan usia 65 tahun bisa berdampak pada pasangan suami istri calon jemaah haji. Pasangan suami istri itu harus mengambil keputusan jika salah satu pasangannya berusia di atas 65 tahun. Maka, salah satu tidak ada yang berangkat haji. Pemerintah harus bisa mengidentifikasi ini agar kuota jemaah haji yang sedikit jangan sampai sia-sia karena persoalan teknis. Dari informasi yang kita terima, jika salah satu tidak berangkat, biasanya pasangan itu membatalkan keberangkatan pergi haji. Dengan informasi ini, pemerintah bisa mengisi lewat daftar cadangan. Ini adalah saran kita ke pemerintah.

Pemerintah menyebutkan perlu tambahan Rp 1,5 Triliun dalam penyelenggaraan ibadah haji. Bagaimana dengan soal ini?

Pada saat kita mempersiapkan secara teknis, baik persiapan bandara, pesawat, dan lain-lain, tiba-tiba Arab Saudi mengeluarkan kebijakan bahwa layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) dikenakan pembiayaan dan disebut dengan *masyair*. *Masyair* adalah layanan

transportasi dan akomodasi jemaah dari Makkah ke Arafah.

Padahal kita sudah hitung kebutuhan pembiayaan mulai dari Madinah terkait pemondokan, katering, transportasi. Begitu juga di Makkah, termasuk Armuzna, yang dalam istilah masa lalu disebut dengan Muassasah. Jadi, Muassasah semacam kepanitian haji. Kita sudah bayar untuk di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Di Arafah, layanan di sana adalah tenda, katering, transportasi bus untuk mengantar dan membawa pulang lagi. Layanan di Muzdalifah adalah layanan karpet di padang pasir. Jemaah yang bermalam duduk di karpet. Kemudian, layanan di Mina ada tenda, katering. Ada macam-macam tenda, paling tidak ada pendingin ruangan.

Sekarang ada perubahan manajemen dalam pelaksanaan ibadah haji. Arab Saudi mengubah dari sistem Muassasah menjadi sistem syarikah (semacam perusahaan atau PT). Jadi, seluruh transaksi yang terjadi dalam proses pelaksanaan ibadah haji, PT mendapat *fee.* Kita tidak bisa tawar lagi. Seluruh jemaah haji, tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga negara-negara lain, dikenakan *masyair*. Layanan di Armuzna, Musdalifah, dan Mina dikenakan biaya tambahan kira-kira mendekati Rp 20 juta untuk satu orang jemaah.

Padahal kita sudah memutuskan Bipih. Tidak mungkin ada pembatalan. Saat itu kita di Komisi VIII berkomitmen untuk mengambil keputusan karena kloter pertama berangkat 4 Juni 2022. Proses ini tidak boleh berhenti atau berubah karena kalau terjadi persiapannya bisa kacau balau. Juga ada persoalan teknis pesawat, yaitu *technical landing* pesawat berbadan lebar di Surabaya. Muncul lagi pembiayaan dalam proses pemberangkatan jemaah Surabaya, sekitar Rp 25 miliar.

Setelah semua dibedah di Komisi VIII, akhirnya kita berkomitmen tambahan biaya itu tidak dibebankan kepada calon jemaah haji. Kita tidak memakai hasil nilai manfaat yang ada di BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Uangnya memang besar tapi tidak boleh dipakai karena uang itu adalah hak jemaah yang akan datang. Ternyata ada efisiensi pelaksanaan ibadah haji yang selama ini disimpan dan tidak pernah dipakai. Misalnya, pelaksanaan ibadah haji tahun 2017, setelah selesai diaudit BPK, ternyata ada sisa. Sisa itu disetor ke BPKH dan disimpan menjadi dana haji hasil efisiensi. Dari empat tahun pelaksanaan haji, ada anggaran di situ sekitar Rp 740 miliar. Dana itu ditambah nilai manfaat sekitar Rp 791 miliar. Itulah penyelesaiannya.

Saya melihat keuangan haji kita dengan sistem Arab Saudi yang sekarang maka perlu ada revisi undang-undang baik UU Haji dan BPKH (Di antaranya, revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah). Kalau mengikuti visi Arab Saudi tahun 2040, akan banyak hal yang tidak terduga dalam kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang. Karena itu harus ada pasal-pasal yang dibuat (dalam UU Haji dan BPKH) untuk mengantisipasi hal tersebut. ❑

Pidato di Gedung MPR Sampaikan Pesan Kebhinnekaan

Cinta Laura

MENGENAKAN inner batik dan celana biru tua, artis **Cinta Laura** tampil cantik di acara peringatan Hari Pancasila di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, pada 1 Juni 2022. Artis blasteran Indonesia-Jerman ini mendapat undangan resmi untuk hadir di acara itu sebagai perwakilan generasi muda Indonesia.

Artis mungil yang kalau bicara kental dialek Inggrisnya itu mendapat kesempatan menyampaikan pidato atas nama generasi muda Indonesia. “Ada 1.340 suku di negara ini. Oleh karena itu, kita harus berjuang untuk menjadikan Indonesia pelopor dalam merangkul dan mempersatukan setiap perbedaan yang ada. Menjadikan Pancasila sebuah ideologi yang memengaruhi evolusi dunia,” demikian cuplikan pidato Cinta Laura yang disampaikan dengan penuh semangat.

Di laman Instagramnya, Cinta menyalurkan rasa bahagianya. “Sungguh sebuah kehormatan untuk dapat memberikan pidato di depan banyak orang yang saya hormati di Gedung MPR kemarin,” tulisnya. ❑

DER

Pianis Cilik Asal Kendal *Pecahkan* Rekor Dunia di Dubai

PIANIS cilik asal Kendal, Jawa Tengah, **Jefri Setiawan**, baru berusia 16 tahun. Di usianya yang masih belia itu, Jefri telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, dengan mengukir prestasi yang mengagumkan dalam bermain piano.

Di Dubai, Uni Emirat Arab, 18 Mei 2022, Jefri tampil pada World Record Breaking: Playing 170 songs Non-Stop Blinfolded. Dalam acara itu dia berhasil memainkan piano selama 6 jam dengan mata tertutup membawakan 170 lagu non stop.

Atas prestasinya itu, Jefri berhasil mendapatkan dua sertifikat, yaitu dari Universal Records Forum (URF) "Memorizing Songs in Sequence Order While Playing Piano Non-Stop Blindfolded for the Longest Time-Record" dan British World Records-UK.

Pertunjukan di Dubai itu disaksikan, antara lain oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (secara daring), Konsul Jenderal RI dan staf KJRI Dubai, wakil dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selaku sponsor, termasuk pengurus DWP KJRI Dubai, wartawan lokal dan masyarakat Indonesia, yang mengikuti acara ini melalui platform YouTube KJRI Dubai. ❑

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Jefri Setiawan

Lita Zein & Chicha Koeswoyo

Gelar Lomba Cipta Lagu Cinta Indonesia III

ARTIS penyanyi era 90-an **Lita Zein** dan mantan penyanyi cilik **Chicha Koeswoyo** yang tergabung dalam kepengurusan Yayasan Gelora Seniman Nusantara menggelar Lomba Cipta Lagu Cinta Indonesia (LCLCI) III dengan tema 'Nada Cinta Pilar Kebangsaan'.

Untuk keperluan tersebut, Kamis (30/6/2022), Lita dan Chicha melakukan audiensi dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo di Gedung MPR. "Ketua MPR sangat mendukung rencana kegiatan ini, beliau sangat apresiasi dan memberikan beberapa saran dan masukan," ujar Lita.

Pendaftaran dan seleksi lomba berhadiah total Rp 100 juta ini dilaksanakan pada 24 Juni hingga 15 Juli 2022, dan final pada Agustus 2022 di Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta. Kegiatan ini sebagai bagian dari Peringatan HUT RI ke-77 serta HUT MPR dan DPR RI.

"Ayo anak-anak muda Indonesia yang cerdas, kreatif, kaya akan ide, tuangkan harapan dan imajinasimu dalam lirik dan lagu, buruan daftar ya..," cuit Chicha Koeswoyo. ❑

DER

Munggur Park

Bersama-sama Menciptakan Keindahan dan Kesejahteraan

KEBERADAAN Munggur Park, Desa Gatak Kecamatan Delangu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, masih relatif baru. Pasar malam permanen ini baru diresmikan pembukaannya pada Ahad ketiga April 2022 silam. Tetapi tempat rekreasi yang menawarkan berbagai permainan dan kuliner, laiknya pasar malam, ini sudah banyak dikenal masyarakat, khususnya pemakai jasa kereta api.

Maklum, posisinya berada tepat menempel dengan pagar pembatas rel, jalur Yoyakarta-Surakarta. Atau di sebelah utara Desa Gatak, hanya 200 meter dari Stasiun Delangu. Posisi tersebut membuat Munggur Park sangat mudah dikenali. Apalagi pada malam hari, kilauan dan gemerlap lampu-lampu yang menyala di sana, membuat tempat ini makin gampang ditemukan. Sehingga saat kereta melintas pada malam hari banyak di antara para penumpang kereta menoleh, untuk melihat dan mencari tahu, gerangan keramaian apa yang bertabur kemilau cahaya lampu tersebut.

Dengan pemilihan posisinya yang sangat strategis, Munggur Park pun segera menjadi buah bibir. Apalagi, tempat di mana pasar malam permanen ini berada sangat mudah dijangkau. Selain menggunakan Kereta Api Commuterline, lalu berjalan kaki dari stasiun Delangu, Munggur Park juga bisa dijangkau memakai kendaraan pribadi. Melalui jalan Jogja-Solo, setelah gapura Desa Gatak lurus ke arah timur sekitar 300 meter maka tempat aneka mainan dan makanan itu pun akan segera ditemukan.

Dinamakan Pasar Malam Permanen, karena tempat makan dan hiburan ini beroperasi layaknya pasar malam. Tetapi tidak seperti umumnya pasar malam, Munggur Park diharapkan berdiri dan beroperasi dalam kurun waktu lama, dan berada di tempat yang sama. Sedangkan pasar malam pada umumnya akan berpindah-pindah, dari satu tempat ke tempat lainnya. Sehingga tidak salah jika Munggur Park dinamakan pasar malam permanen.

Munggur Park sendiri berdiri di atas lahan seluas 6.000 meter. Tempat hiburan ini memiliki belasan wahana permainan. Antara lain, Jet Coaster, Bianglala, Trampolin, Gajah Terbang, Kora-Kora, Rumah Balon, hingga Rumah Kelinci. Untuk masuk ke tempat ini, pengunjung tidak dikenakan biaya apapun. Kecuali jika hendak menikmati wahana permainan yang ada di sana. Tiket untuk menikmati tiap-tiap wahana permainan ini berbeda-beda, antara Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per orang.

Selain berbagai mainan, pengunjung juga bisa menikmati berbagai makanan yang dijajakan Munggur Park Resto. Bahkan menikmati sajian yang ada di Munggur Park setelah capek bermain akan semakin terasa nikmat. Berbagai makanan disediakan di tempat tersebut. Seperti steak, nasi sambel, hingga ayam geprek, serta berbagai jenis minuman. Setiap hari Munggur Park dibuka pada pukul 16.00 - 22.00 WIB. Sementara Munggur Park Resto sudah dibuka sejak pukul 11.300 WIB.

Usaha Bersama

Munggur Park berdiri berkat kerjasama antara Bumdes Desa Gatak, Kecamatan Delangu, Kabupaten Klaten, Jawa tengah, dengan beberapa pengusaha Muslim Klaten yang tergabung dalam wadah Yayasan Semangat. Yayasan Semangat berinisiatif mengajukan kerjasama dengan Bumdes Desa Gatak untuk merevitalisasi RTH milik desa yang sempat kurang optimal, menjadi area pasar malam. Kerjasama dengan sistem Sirkah (bagi hasil) tersebut ditandatangani

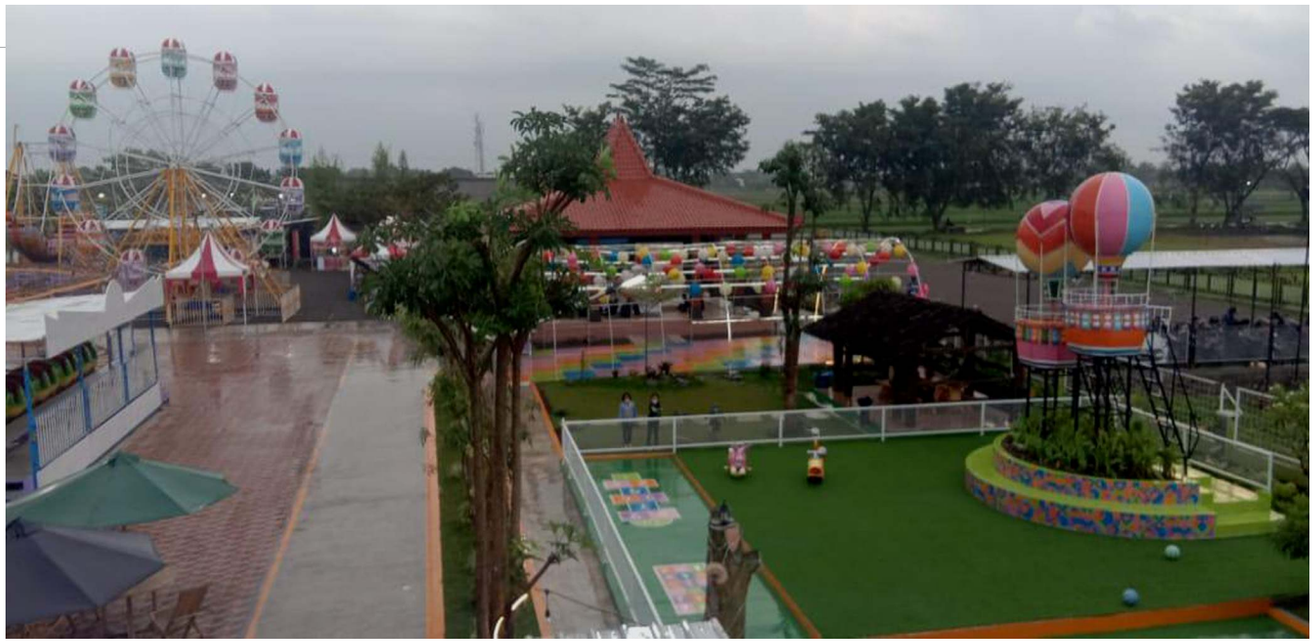

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

akhir Desember 2021. Total dana yang dibutuhkan untuk membangun tempat tersebut mencapai Rp 1,2 miliar.

"Hari pertama setelah dibuka terdapat lebih dari sembilan ribu pengunjung datang menikmati hiburan di tempat ini. Dari sisi parkir saja misalnya, Alhamdulillah pemasukannya tidak kecil. Kendaraan roda empat membayar biaya parkir sebesar Rp 5.000, sementara kendaraan roda dua Rp 2.000. Dan, itu langsung masuk ke BUMDES, sebagai salah satu bentuk partisipasi kerjasama kami membangun desa," kata Ovick Budi Raharjo, Direktur Operasional Munggur Park kepada Majalah *Majelis*.

Sejak itu, menurut Ovick, warga yang berdatangan terus mengalir. Pada hari-hari libur tak kurang dari seribu orang mampir di tempat tersebut. Semakin malam, tempat tersebut semakin ramai. Karena kesejukan dan ketenangan yang disajikan Munggur Park memberikan rasa nyaman tersendiri, sehingga semakin malam warga yang datang mengalir semakin deras.

"Kami mempertahankan konsep Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada di sini sejak lama. Karena itu, kami menggratiskan setiap pengunjung yang masuk, untuk menikmati suasana di tempat ini," kata Ovick menambahkan.

Majalah *Majelis* yang datang menyambangi tempat tersebut beberapa hari lalu merasakan benar hawa segar yang ditemukan di tempat tersebut. Apalagi saat itu wilayah Desa Gatak tengah diguyur gerimis, membuat suasananya semakin tenang. Semilir angin berhembus nakal, turut membantu melepas seluruh penat dan keresahan. Beberapa menu hidangan yang dijajakkan pihak pengelola juga tidak kalah dibanding tempat lain, baik soal rasa maupun harganya. Sehingga cocok untuk dikunjungi selama libur sekolah.

Sayangnya, gerimis terus turun hingga senja menjelang. Mengakibatkan tidak banyak pengunjung yang datang. Tetapi, berbeda suasananya di Munggur Park Resto. Di sana ada puluhan pengunjung yang berasyik masyuk dengan menu hidangan yang mereka pesan. Barangkali, mereka ini sebenarnya berniat untuk bermain, tetapi karena semua wahana basah akibat gerimis, pengunjung tersebut memilih untuk mencicipi hidangan yang ada dulu, sebelum menuju wahana permainan.

Terbukti, setelah senja makin gelap, saat gerimis reda, pengunjung yang semula berjubel di Munggur Park Resto mulai bergeser di wahana permainan. Pada saat bersamaan lampu-lampu di tempat tersebut mulai menyala, menghadirkan pemandangan yang syahdu. Apalagi, saat itu, suara azan magrib berkumandang dengan syahdunya. Lebih syahdu lagi melihat pengunjung menyempatkan diri untuk salat magrib, dan meninggalkan permainan untuk mendirikan salat maghrib. Mereka pun salat di mushola kecil yang ada di Munggur Park dengan khusuknya. ❑

MBO

Dr. Ir. Sodik Mudjahid M,Sc

Menolak Kalau dari Umur

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PEMILU serentak tinggal dua tahun lagi. Tapi, para kontestan yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024 sudah ramai bermanuver, mencari dukungan dan memilih calon Presiden yang akan maju dalam Pemilu 2024. Para calon anggota DPR juga akan semakin sering bertemu dengan masyarakat konstituennya. Memberi janji, menarik simpati dan juga menyerahkan sedikit upeti.

Seperti periode sebelumnya, pada 2024 nanti dipastikan Pileg akan menimbulkan Tsunami tersendiri. Perang mahar antara caleg dengan konsituennya dan tebar pesona akan terjadi secara terbuka. Dan, itu membuat sebagian anggota legislative "incumbent" tidak berani jumawa bahwa ia pasti akan terpilih. Bahkan, tidak sedikit pula di antara anggota DPR petahana merasa harus bekerja ekstra keras seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Salah satu anggota Legislatif yang merasa harus terus bekerja keras, tidak boleh jumawa merasa pasti terpilih pada Pileg 2024 adalah Dr. Ir. Sodik Mudjahid, M.Sc., (65), anggota Fraksi Partai Gerindra MPR RI. Menurut Sodik, pertarungan pada kontestasi pileg akan sengit. Saat ini saja sudah banyak caleg muda yang telah mempersiapkan diri sejak dini untuk bertarung dalam Pileg 2024 .

"Di komisi II banyak anggota yang mulai pesimistis bisa kembali menjadi anggota legislatif pada Pileg 2024. Maklum, komisi II itu tidak seperti beberapa komisi lain yang bisa memberi "oleh-oleh" langsung kepada konsituen. Dalam hal ini, kami memang turut membahas masalah pemilu, tetapi kami tidak boleh jumawa dan yakin akan bisa menang," kata Sodik kepada majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Karaguan tersebut, kata Sodik, didukung oleh fakta bahwa periode sebelum-sebelumnya tak sedikit anggota Komisi II yang gagal melangkah kembali ke Senayan. Dan, itu menambah kekhawatiran sebagian koleganya. Meski begitu, Sodik juga tidak mau larut dalam kekhawatiran. Ia tetap percaya diri, sembari terus bekerja keras menampung aspirasi dan memperjuangkannya di DPR RI.

Sebagai anggota Komisi II, Sodik berharap, pemilu tahun 2024 akan berjalan lebih baik, lebih damai, dan tidak sekeras seperti pada 2014 juga 2019. Harapan tersebut, menurut Sodik, akan lebih mudah dicapai jika kandidat calon presiden beserta wakilnya tidak hanya ada dua pasang, seperti pemilu sebelumnya. Ketegangan dan pertarungan keras seperti dua pemilu sebelumnya akan sedikit berkurang kalau kandidat presiden dan wakil presiden lebih dari dua pasang.

"Kita sudah siapkan regulasi yang representative untuk mengurangi potensi terjadinya guncangan yang hebat pada pemilu nanti. Yaitu, UU Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Kita juga sudah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang turut terlibat dalam melaksanakan pemilu, termasuk Polri dan TNI," kata Sodik lagi.

Pemilih Pemilu

Kepada kandidat presiden dan wakilnya, juga para caleg dan timsesnya, Sodik berharap, senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa, bukan kelompoknya saja. Sebab, rakyat Indonesia senantiasa berlaku paternalistik. Artinya, cenderung ikut kata dan

tindakan pemimpinnya, jika pasangan presiden dan wakil tampil untuk kepentingan bangsa, berintegritas, mengharap kemajuan NKRI maka rakyat akan ikut serta. Karena itu, diperlukan timses yang dewasa, mementingkan kepentingan bangsa. Bukan malah menghalalkan segala cara untuk memperoleh kemenangan.

Satu hal yang masih perlu mendapat perhatikan jelang pelaksanaan pemilu, menurut anak keenam sebelas bersaudara pasangan Hazbullah Hafizi dan Dedeh Ruyati, ini adalah kesiapan pemilih. Hingga kini, para pemilih Indonesia masih belum bisa dikatakan ideal untuk melaksanakan sistem demokrasi. Pemilihan langsung, kata Sodik, hanya akan berhasil guna jika rakyatnya memiliki pendidikan dan pendapatan tertentu. Tetapi, hingga kini syarat tersebut belum terpenuhi.

Karena itu, diperlukan pendidikan politik, edukasi serta sosialisasi secara masif. Bukan saja oleh partai politik, tetapi juga pemerintah daerah dan ormas-ormas. Semua ormas harus ikut aktif melakukan pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat, agar para pemilih pemilu paham akan tujuan berdemokrasi.

"Pemilu adalah hajat rakyat yang akan menentukan para pemimpin dan nasib bangsa. Karena itu, semua ormas dan tokoh masyarakat harus terlibat memberi edukasi yang benar, untuk menghasilkan sebuah pesta demokrasi yang benar," kata Sodik lagi.

Karena itu, setelah pemilu semua pertikaian yang terjadi pada saat kampanye harus selesai. Tidak boleh dibiarkan berkelanjutan. Jika ada pihak-pihak yang masih memperpanjang persoalan selama masa kampanye maka pihak yang berwenang harus menindak tegas. Bukan hanya tegas kepada pihak yang kalah tetapi juga harus tegas kepada pihak yang menang.

"Sekarang ini kita masih merasakan adanya oknum tertentu yang terus memproduksi kegaduhan. Dan, itu tidak pernah mendapatkan perhatian aparatur secara maksimal. Dan, itu yang menyebabkan polarisasi masyarakat akibat Pemilu 2019 masih tetap terjadi hingga sekarang," kata Sodik lagi.

Prabowo Subianto

Di ranah legislatif, Sodik dikenal sebagai salah satu politisi yang kritis. Kritik dan sarannya tidak hanya disampaikan saat sidang. Tetapi juga melalui para wartawan yang senantiasa menunggu pendapat dan komentarnya. Meski begitu, politik sebenarnya bukanlah arah dan tujuan hidup pria kelahiran Bandung, 2 Agustus 1957, ini. Terbukti, lebih dari separuh hidupnya diabdikan untuk mengurusi pendidikan dan kegiatan sosial, juga berwira usaha.

Tetapi, darah politik dari ayahnya yang mengalir dalam tubuh Sodik, tidak memberi izin kepadanya untuk segera menua. Setelah purna tugas dari dunia pendidikan, Ia segera mengambil keputusan bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), setelah sebelumnya ditawari untuk bergabung dengan beberapa partai besar yang lain.

"Saya tertarik untuk bergabung dengan Partai Gerindra, karena tiga alasan. Pertama, karena figure pemimpinnya, kedua visi misi partai, dan ketiga karena teman serta kolega saya ada di sana," kata ayah tiga anak hasil penikahannya dengan Yani Mujhahid.

Setelah terpilih menjadi anggota legislative pada Pemilu 2014, Ia tidak butuh waktu terlalu lama untuk beradaptasi dengan Partai Gerindra dan Lembaga Legislatif. Itu bisa dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya, baik di lingkup partai Gerindra maupun keanggotaannya di DPR RI.

Kemampuan Sodik beradaptasi dengan dunia politik tidak lepas dari pengalaman panjang di dunia pendidikan dan sosial yang pernah diajalani. Karena, dengan aktifitasnya itu ia bergaul dengan berbagai kelompok masyarakat. Dan, itu memudahkannya saat berkontestasi pada Pemilu 2014 dan 2019.

"Masyarakat yang mengenal saya sewaktu menjadi guru dan aktifis sosial, sangat mendukung saya terjun ke dunia politik. Apalagi, mereka sudah mengenal ide, gagasan, dan cita-cita saya, dan berharap saya memperjuangkannya di lembaga lesgislatif," kata Sodik lagi.

Keberhasilan Sodik melangkah ke dunia politik bisa menjadi inspirasi tersendiri bagi masyarakat. Meski dibatasi usia yang membuatnya berhenti mengajar, tetapi Sodik tidak mau berdiam dan pasrah dengan keadaan. Ia banting setir, untuk mengambil peran dan mengubah medan pengabdian menjadi anggota legislatif.

Selama menjadi pengajar, Doktor Manajemen Pendidikan, alumni UPI Bandung, ini hanya bisa melaksanakan setiap kebijakan pemerintah menyangkut pendidikan. Padahal, tidak setiap kebijakan pendidikan dari pemerintah baik untuk diaplikasikan kepada anak didik. Demikian juga sebagai aktifis sosial dan penguasa. Kebijakan penguasa menyangkut aktivitas sosial dan dunia usaha kerap kurang mendukung kemajuan.

Karena itu, dengan menjadi anggota legislatif, Sodik berharap, segala persoalan yang dia temukan selama menjadi pengajar, aktivis sosial hingga pengusaha, bisa diperjuangkan. Karena, sebagai anggota DPR, Sodik berhak ikut dalam pembahasan-pembahasan rancangan undang-undang.

"Kalau punya minat, perhatian dan cita-cita, pensiun dari bidang apapun bisa melanjutkan ke kancah politik. Apalagi, jika ladang pengabdian sebelumnya membuat dia dekat dengan masyarakat dan bisa dikapitalisasi menjadi modal sosial. Kalau itu sudah kita miliki maka kapital yang dibutuhkan untuk kampanye tidaklah terlalu besar," kata Sodik lagi.

HOS. Tjokroaminoto

Sodik menginjakkan kakinya dan bergabung dengan partai politik pada saat usianya tidak muda lagi. Tetapi, Ia antusias meraih sukses di dunia politik. Semua itu tak lepas karena dalam dirinya mengalir darah pergerakan dari ayahnya yang murid biologis HOS. Tjokroaminoto.

Ayahnya, Hazbullah Hafizi, adalah orang yang membimbing Sodik muda menjadi kader bangsa militan. Ia meneruskan pelajaran politik yang di dapat dari HOS. Tjokroaminoto. Ayahnya juga yang mengajar pelajaran agama kepada Sodik. Hazbullah juga mendidik Sodik bertahan hidup dalam kondisi kesederhanaan.

"Selain pendidik dan ustad, bapak adalah pengusaha. Beliau memelihara ternak ikan, ayam, dan itik. Saya diajarkan mencari keong sawah untuk dijadikan pakan bagi hewan ternak itu. Jadi, sawah, sungai, dan lumpur sudah merupakan hal biasa buat saya sejak kecil. Kalau sekarang saya bertemu dengan masyarakat berbagai kelompok, saya menikmatinya tanpa risih," kata Sodik menambahkan.

Meski harus berjuang untuk terus hidup, tetapi ayah Sodik memiliki aturan yang ketat soal pendidikan anak-anaknya. Semua anaknya harus sekolah di tempat terbaik, termasuk Sodik. Selain itu, Sodik dan saudara-saudaranya dituntut aktif diberbagai bidang, tak terkecuali Pramuka dan organisasi lainnya. Jadi, bukan sesuatu yang aneh jika saat ini Sodik mengubah dirinya, dari seorang guru, aktifis social, dan pengusaha menjadi politikus. ❑

MBO

Biodata

Nama	: Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.
Tempat/ tgl lahir	: Bandung, 2 Agustus 1957
Nama/ Pekerjaan Istri	: Yani Mudjahid, Wirausaha

Riwayat Pendidikan:

1. S1 Fakultas Ekonomi Pertanian Upad
6. S2 Manajemen Bisnis Unpad, dan IHS Netherland
7. S3 Manajemen Pendidikan UPI dengan spesialisasi Total Quality Management

Riwayat Pekerjaan:

1. Direktur Perencanaan PT. Tricon Jaya International Connsulting Engineers (1980 - 1995).
2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Manajemen Koperasi Indonesia/ IKOPIN (1990-2005)
3. Direktur Perguruan Darul Hikam, Yayasan Darul Hikam (1990 -sekarang)
4. Komisaris dan Pembimbing Utama PT. QIBLAT TOUR (2002 - sekarang)
5. Pendiri dan Direktur Pusat Data dan Dinamika Ummat (2012)
6. Pendiri CEQU (Centre for Educational Quality Improvement, 2011)
7. Penggagas Smart Islamic Circle (2013)
8. Pengajar dan Pembimbing Soft Skill sebagai pendidikan unggulan dari Yayasan Pendidikan Telkom (YPT), Universitas Telkom Bandung, 2013
9. Mengajar Pendidikan Kepribadian; SMP Darul Hikam, Bandung, 1978-1980
10. Mengajar Metode Penelitian dan Presentasi; SMA Darul Hikam, Bandung, 1990-1992
11. Mengajar Ekonomi Mikro; Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN), Jatinagor, 1995-2000.
12. Mengajar Ekonomi Syariah; Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) Jatinagor,1995-2000.
13. Mengajar Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi; Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN), Jatinagor, 2000-2005

Riwayat Organisasi

1. Sekretaris Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Barat, 1975 - 1980
2. Sekretaris Lembaga Dakwah HMI Kota Bandung, 1977
3. Wakil Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (UNPAD), 1979
4. Redaktur Majalah Kampus Faperta UNPAD, 1978
5. Ketua Yayasan Darul Hikam
6. Wakil Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat 2012 – 2017
7. Anggota Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah (BAP) Jabar periode 2007-2012 dan 2012 -2017
8. Dewan Penasehat Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUD) Propinsi Jawa Barat.
9. Ketua Dewan Penasihat Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bandung

Oleh:
Ahmad Muzani
Wakil Ketua MPR RI

Silaturahim dan Persatuan Bangsa

SILATURAHIM adalah tradisi mulia bangsa ini. Tradisi yang memiliki akar dari nilai-nilai agama dan telah menjadi praktik peradaban, terutama yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penting di negeri ini untuk merajut ke-Indonesiaan.

Praktik ini, mungkin dari sebagian generasi kekinian, bisa saja dianggap kuno, karena di era digital ini silaturahim bisa dilakukan secara virtual. Di mana komunikasi dengan gawai, di mana telepon pintar mampu menghasilkan komunikasi seketika dan bisa seolah berhadapan langsung (*face to face*) dengan beragam aplikasi video call.

Walaupun demikian, di era *post truth* seperti sekarang ini, teknologi memiliki kelemahan. Demi kepentingan tertentu teknologi telah digunakan untuk membuat disinformasi, informasi bohong atau hoax, fake news atau berita palsu, dan sebagainya. Karena itulah, silaturahim secara real *face to face* menjadi jalan di mana segala sesuatu bisa dikonfirmasi langsung atau bertabayun.

Periode puasa Ramadan yang disambung hari raya Idul Fitri atau periode bulan Syawal menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahim dalam kekeluargaan maupun dalam persahabatan. Ibarat rajutan benang yang sudah lama dipakai, di mana terjadi pengenduran di sana-sini, maka silaturahim itu mengencangkan kembali ikatan itu.

Bagi Partai Gerindra, silaturahim itu seperti mengecas baterei. Di ada refueling yang menghasilan energi baru, semangat baru, dan tentu saja harapan baru. Apalagi, jika itu dilakukan kepada para tokoh bangsa, khususnya para ulama.

Dalam setiap kesempatan bertemu dengan para ulama di daerah-daerah, selalu disampaikan bahwa ulama adalah teladan rakyat. Mata hati rakyat, tempat rakyat berkeluh kesah atas segala problematika hidup masyarakat.

Sebab itu, ke dalam internal sudah menjadi tugas sendiri dari Ketua Umum Partai Prabowo Subianto untuk selalu dekat dengan orang soleh dan orang baik. Karenanya, bagi Gerindra, khususnya pada kader-kader yang memiliki jabatan-jabatan publik yang diemban, baik di eksekutif maupun legislative, sudah menjadi kewajiban untuk terus menjaga hubungan baik dengan para ulama, kiai, dan tokoh masyarakat.

Mendengarkan informasi dari para tokoh masyarakat secara langsung, dengan sendirinya menghimpun denyut nadi dan perasaan rakyat. Suara dan harapan rakyat inilah yang harus diartikulasikan dalam perjuangan politik, sehingga harapan-harapan rakyat, terutama terkait perbaikan kehidupan untuk mewujudkan kesejahteraan dapat diwujudkan.

Seperti dalam rangkaian silaturahim bersama Habib Syech di Kota Solo di awal bulan Ramadan lalu, ada satu petuah menarik dari Habib Syech bin Abdul Qodir Asegaff. Maulana Habib yang solawatnya terkenal merdu dan terkenal hingga ke negeri jiran Malaysia ini memberi nasihat yang sangat penting,

"Jabatan itu harus digunakan untuk menyenangkan rakyat. Berjuang untuk rakyat haruslah dengan rasa gembira agar kita bisa menjadi bangsa yang bergembira dan bersyukur. Jadi jangan merasa ada beban dalam menjalankan sebuah amanah. Karena itum, saya bergembira atas kedatangan para pengurus Gerindra," ujar Habib Syech.

Selain dengan para ulama, dalam tradisi Partai Gerindra juga terus menjalin hubungan baik dengan tokoh dari agama lain. Kami ingin meneruskan tradisi baik oleh para pendiri bangsa ini, seperti hubungan pribadi Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta yang tetap hangat secara pribadi. Walaupun terjadi pasang surut karena perbedaan pandangan politik, tetapi ikatan hati persaudaraan keduanya sangatlah erat sebagai Bapak Proklamator.

Atau cerita betapa akrabnya persahabatan tokoh Partai Katolik I.J. Kasimo dengan Tokoh Partai Masyumi M.Natsir. Di mana sekat-sekat politik, juga perbedaan agama tak membuat Kasimo dan Natsir keduanya terpisah dan tetap hangat dalam kehidupan sosial sebagai tokoh bangsa.

Dalam perspektif lebih luas, silaturahim itu akan memperkuat persatuan bangsa. Tonggak-tonggak sejarah bangsa yang penting, seperti kebangkitan nasional, berawal dari pertemuan atau silaturahim para tokoh dari berbagai daerah di Jakarta yang melahirkan Sumpah Pemuda 1928. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dapat diraih dan dipertahankan dengan persatuan kuat seluruh kekuatan bangsa.

Bahkan contoh terbaru, di mana Pandemi Covid 19 tak akan bisa lebih cepat berakhir, tanpa adanya persatuan dan kekompakan segenap elemen bangsa. Di mana persatuan dan kekompakan itu bisa terus dirawat dan dirabuki dengan silaturahim. ❑

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

INI BARU INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI

MAJELIS

"Segera Unduh Aplikasinya!

DI PLAY STORE
http://bit.ly/bukudigitalmprri

Banyak Bicara dari Politisi Baru

Di Komisi III DPR RI, Arsul Sani bukan nama yang asing. Kehadiran dirinya selalu ditunggu dalam rapat-rapat yang digelar. Meski sebagai politisi yang terbilang baru, namun pria asal Pekalongan itu mampu memberi warna dan cerita. Pengalaman di bidang hukum selama 27 tahun sebelum menjadi wakil rakyat, memudahkan dirinya diterima dan dibutuhkan oleh DPR. Semua gagasan selama di Komisi III telah dituangkan dalam buku 'Catatan dari Senayan.'

MESKI terbilang belum senior menjadi politisi, namun kiprah Arsul Sani di MPR/DPR sangat berarti dan mewarnai. Pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah, ini baru menjadi anggota MPR/DPR pada tahun 2014. Dirinya merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebelum menjadi politisi andalan partai berlambang Kabah itu, alumni Fakultas Hukum Univesitas Indonesia (FHUI) ini merupakan seorang jurnalis dan malang melintang dalam dunia advocates. Pernah di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mendirikan biro bantuan hukum, serta kerap menjadi pembela dalam berbagai kasus hukum.

Pengalaman dalam dunia hukum yang digeluti sejak masih tercatat sebagai mahasiswa di Kampus Kuning itulah yang membuat dia mudah beraktivitas, bahkan dibutuhkan di DPR. Setelah dilantik menjadi anggota MPR/DPR periode 2014-2019, beberapa jabatan di DPR langsung diembannya. Di awal periode menjadi wakil rakyat, banyak tugas yang harus dikerjakan oleh Arsul, seperti anggota Pansus RUU Terorisme, badan legislasi, Kapoksi Komisi III, Bamus, Pansus KPK, dan BAKN.

Argumen-argumen yang tegas dan mengena membuat Arsul Sani kerap di-door stop dan di-telewawancarai oleh media massa. Hal demikian membuat nama PPP terangkat. Untuk itulah dalam periode kedua kalinya menjadi anggota MPR/DPR, 2019-2024, Arsul Sani diutus oleh partainya menjadi Wakil Ketua MPR, mendampingi Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Untuk mengetahui sejauh mana kiprah politik pria yang belum lama menjadi seorang politisi itu bisa dilihat dalam buku yang ditulisnya. Di dalam buku yang berjudul *Catatan Dari Senayan, Menuju Konvergensi Hukum, HAM, dan Keamanan Nasional*, itu Arsul Sani memberikan opini, gambaran, dan penjelasan mengenai bidang yang ditanganinya di Komisi III.

Masalah-masalah yang ditangani, semua tersaji dalam bab-bab yang ada. *Bab I Politik Hukum Baru Melawan Terorisme, Bab II KUHP Baru, Hukum Pidana Rasa Indonesia, Bab III IUS Constituendum: Mereformulasi Bagian Kekuasaan Kehakiman & HAM Dalam Proses Hukum* hingga *Bab IX Kompleksitas Pemasyarakatan, Tugas Besar Pengayoman.*

Buku yang ber-cover foto dirinya dengan latar berwarna hijau itu menjadi lebih menarik ketika Guru Besar Fakultas Hukum UI dan mantan Ketua MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie memberi kata pengantar. Dalam pengantarnya, Jimly mengatakan, banyak ide cerdas yang dapat dibaca dalam buju ini. Arsul Sani disebut oleh pria yang saat ini menjadi anggota DPD itu juga membahas perdebatan dengan berbagai perspektif dan cara pandang tentang isu yang dibahasnya. Buku ini lebih lanjut dikatakan berusaha menemukan konvergensi atau mempertemukan berbagai sudut pandang. Untuk itu Jimly mengatakan, tepat bila buku ini diberi judul *Konvergensi Hukum...* "Semuanya patut diacungi jempol dan membuktikan bahwa sebagai politisi yang bekerja di bidangnya, Arsul Sani terus memutar otaknya untuk berpikir dan berefleksi, membuat utuh sebagai seorang intelektual politik", ujarnya dalam *prolog* buku itu.

Arsul Sani dalam *Pendahuluan*, 'mengakui' bahwa ia seorang politisi yang baru. Di halaman 8, Arsul Sani mengatakan, selama kurun waktu duapuluh tujuh tahun sebelumnya, dirinya berada di sektor 'swasta' sebagai advokat dan juga sebagai eksekutif di sebuah perusahaan multinasional, sambil aktif di berbagai wadah masyarakat sipil nirlaba.

Menjadi seorang politisi menurut pria yang pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri IKADIN itu, anggota parlemen harus bicara untuk menyuarakan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Kesadaran akan keharusan bicara inilah yang melatarbelakangi mengapa dirinya sering bersuara, baik di forum MPR/DPR maupun luar forum tersebut.

Keharusan bicara inilah perlu didokumentasikan ke dalam suatu buku. Dia mengatakan, ada tantangan ketika menuliskan kembali perjalanan selama menjadi anggota DPR, terutama saat di Komisi III yang menaungi bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan Nasional, dalam suatu buku. ❑

AWG

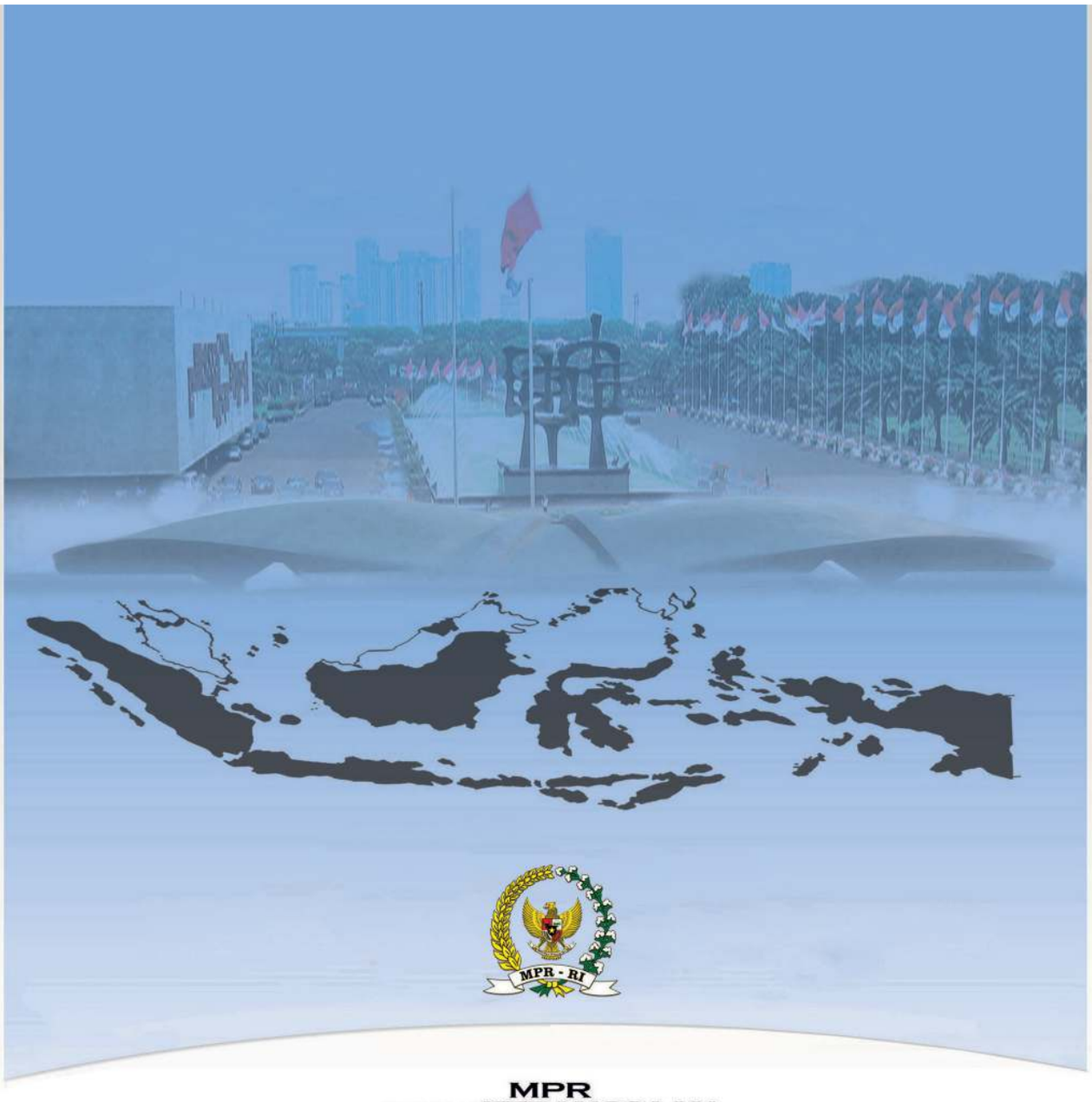

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI